LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
@ 2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelesaikan laporan kinerja tahun 2016 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

LAKIP Kemendikbud tahun 2016 merupakan laporan kinerja yang kedua dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemendikbud tahun 2016. Laporan kinerja ini dilengkapi dengan analisis pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan sampai dengan tahun ke dua pelaksanaan Renstra kemendikbud 2015-2019.

Pada tahun 2016 Kemendikbud menetapkan enam belas sasaran strategis, dengan 45 indikator kinerja. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan melalui delapan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yang meliputi program pendidikan dasar dan menengah; program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; program penelitian dan pengembangan; program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; program guru dan tenaga kependidikan; program pelestarian budaya; program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Dengan 0dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu pendidikan vokasi, peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan sistem pembelajaran, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pemerataan dan pemenuhan guru khususnya di daerah terpencil, peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar, peningkatan keterlibatan publik dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pelestarian bahasa dan budaya Indonesia, serta peningkatan tata kelola *(good*

governance). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Kemendikbud selama tahun 2016. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Kemendikbud tahun 2016.

Jakarta, Februari 2017,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR SINGKATAN iv

IKHTISAR EKSEKUTIF viii

BAB I PENDAHULUAN 1

Berisi uraian mengenai gambaran umum Kemendikbud, tugas dan fungsi, visi, misi dan permasalahan yang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENDIKBUD 7

Menyajikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Menteri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENDIKBUD 11

Menyajikan kinerja yang berhasil dicapai Kemendikbud selama tahun 2016 sesuai perjanjian kinerja 2016

A. CAPAIAN KINERJA KEMENDIKBUD 11

Menyajikan realisasi atas target kinerja yang ditetapkan dengan dilengkapi data dan analisis kinerja

B. REALISASI ANGGARAN 114

Menyajikan realisasi anggaran 2016 dari delapan program yang dilaksanakan dan uraian efisiensi yang berhasil dilakukan

C. CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN 117

Menyajikan tingkat pencapaian tiga program unggulan Kemendikbud, yaotu Program Indonesia Pintar, Program Pendidikan Vokasi, dan Program Pendidikan Karakter

BAB IV PENUTUP 125

LAMPIRAN 127

DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terluar, Terdepan
APBN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara-Perubahan
APE	Alat Peraga Edukatif
APK	Angka Parsitipasi Kasar
APM	Angka Parsitipasi Murni
APS	Angka Putus Sekolah
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional - Sekolah dan Madrasah
BAN-PNF	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BINDIKLAT	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
BIPA	Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing
BMN	Barang Milik Negara
BOMM	Bantuan Operasional Murid Miskin
BOP	Badan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSSM	Bantuan Operasional Sekolah Siswa Miskin
BPCB	Balai Pelestarian Cagar Budaya
BPNB	Balai Pelestarian Nilai Budaya
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPAUDNI	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DARING	Dalam Jaringan
DIKDASMEN	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DITJEN	Direktorat Jenderal
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EFA	*Education For All*
EfSD	*Education For Sustainable Development*
GGD	Guru Garis Depan
GIMM	Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan
HaKI	Hak Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
IAO	*International Astronomy Olympiad*
IBO	*International Biology Olympiad*
ICDE	*International Council Of Distance Education*
IchO	*International Chemistry Olympiad*
ICPC	*International Collegiate Programming Contest*
ICT	*Information And Communication Technology*
IIUN	Indeks Integritas Ujian Naional
IJSO	*International Junior Science Olympiad*
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IMO	*International Mathematics Olympiad*
IMSO	*International Mathematics And Science Olympiad*

INAP	*Indonesia National Assessment Program*
INEPO	*International Environmental Project Olympiad*
INPRES	Instruksi Presiden
IOI	*International Olympiad In Informatics*
IphO	*International Physics Olympiad*
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IKPN	Indeks Kebudayaan Pembangunan Nasional
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISO	*International Standard Organization*
ITJEN	Inspektorat Jenderal
JUKNIS	Petunjuk Teknis
KB	Kelompok Bermain
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBU	Kelompok Belajar Usaha
KEMENDIKBUD	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
KEPRES	Keputusan Presiden
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KKP	Kawah Kepemimpinan Pelajar
KLK	Kelas Layanan Khusus
KNIU	Komite Nasional Indonesia Untuk Unesco
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKBH	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MenPAN RB	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
MDGs	Millenium Development Goals
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
NIGN	Nomor Induk Guru Nasional
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NILEM	Nomor Induk Lembaga
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
OSN	Olimpiade Sains Nasional

O2SN	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
PPPAUDNI	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
P4TK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan DIKMAS	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
PMU	Pendidikan Menengah Universal
PISA	*Programme for Intenational Student Assessment*
PIP	Program Indonesia Pintar
PK	Perjanjian Kinerja
PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKBG	Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKG	Penilaian Kinerja Guru
PKH	Pendidikan Kecakapan Hidup
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PLK	Pendidikan Layanan Khusus
PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PSBG	Pendidikan Sekolah Berwawasan Gender
PSPSL	Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PUG	Pengarusutamaan Gender
RA	Raudhatul Athfal
RENSTRA	Rencana Strategis
RBI	Reformasi Birokrasi Internal
RKB	Ruang Kelas Baru
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	Rencana Kinerja Tahunan
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPNJP	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
S-1	Strata 1/Sarjana
S-2	Strata 2/Pascasarjana
S-3	Strata 3/Pascasarjana
SABMN	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKIP	Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SEA SPF	*South East Asia School Principal Forum*
SEAMEO	*South East Asia Ministers Of Education Organization*
SEAMOLEC	*Southeast Asian Ministers Of Education Organization For Regional Open Learning Center*
SETJEN	*Sekretariat Jenderal*
SILN	Sekolah Indonesia Luar Negeri
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	Sekolah Luar Biasa

SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMP-LB	Sekolah Menengah Pertama - Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPS	Satuan PAUD Sejenis
SUKMA	Surat Keterangan Melek Aksara
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	*Trends In International Mathematics And Science Study*
TK	Taman Kanak-Kanak
TLD	Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat)
TPA	Tempat Penitipan Anak
TPSDP	*Technological And Professional Development Project*
TUK	Tempat Uji Kompetensi
TVE	Televisi Edukasi
UKBI	Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
UKG	Uji Kompetensi Guru
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
ULT	Unit Layaanan Terpadu
UN	Ujian Nasional
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USB	Unit Sekolah Baru
UUD	Undang-Undang Dasar
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WCF	*World Culture Forum*
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Kemendikbud tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan rencana strategis Kemendikbud tahun 2015—2019. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemendikbud tahun 2016 dan capaian tiga program unggulan Kemendikbud.

Sesuai data pengukuran kinerja tahun 2016, dari sebanyak 45 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, sebanyak 27 IKSS atau 60% telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan, 17 IKSS atau atau 38% belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan satu IKSS belum dilakukan pengukuran di tahun 2016 karena pengukuran IKSS tersebut dilakukan tiap tiga tahun sekali, IKSS tersebut adalah 'kemampuan berbahasa dalam Skor PISA'.

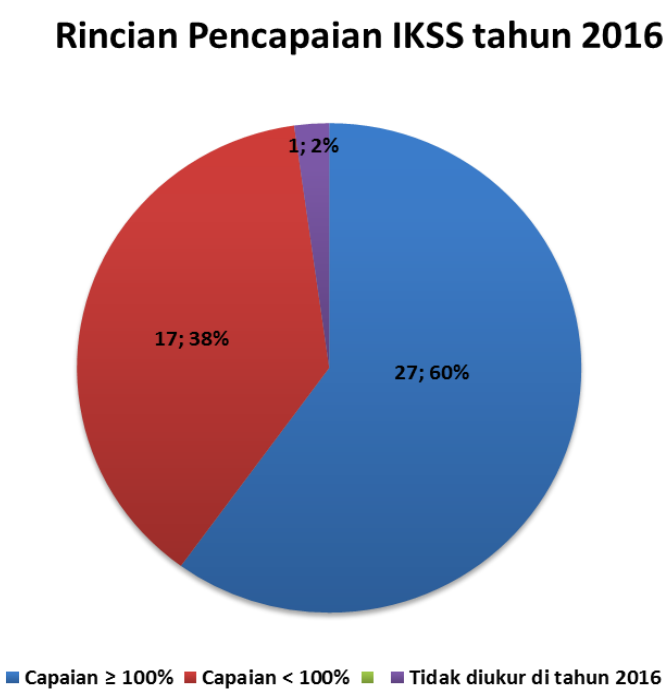

Sedangkan untuk kinerja keuangan, dari total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp43.605.863.439.000, ada *self blocking* sebesar Rp3.925.485.699.000, sehingga pagu Kemendikbud setelah *selfblocking* menjadi Rp39.680.377.740.000. Dari pagu anggaran Rp39.680.377.740.000 telah berhasil terserap sebesar Rp38.554.662.130.586 sehingga persentase daya serap Kemendikbud untuk tahun 2016 adalah sebesar 97,16% setelah *selfblocking,* atau 88,42% dari pagu awal.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain : (1) Beberapa ketercapaian indikator kinerja bukan merupakan tanggung jawab Kemendikbud melainkan tanggung jawab pemerintah daerah,

seperti pemenuhan SPM pendidikan dasar, pendistribusian guru; (2) Keterbatasan lahan yang *clear* dan *clean* untuk membangun unit sekolah baru di daerah; (3) masih rendahnya daya dukung infrastruktur yang dapat mendorong akses pendidikan bagi penduduk setempat; (4) lemahnya pengarusutamaan wajib belajar pendidikan dasar; dan (5) belum terbentuknya pola masyarakat pembelajar.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa upaya penyelesaikan permasalahan dan tantangan di bidang pendidikan dan kebudayaan tidak hanya dapat diselesaikan oleh Kemendikbud sendiri, tapi perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk itu setiap orang, baik dari internal maupun eksternal Kemendikbud diharapkan menjadi penggerak lingkungan sekitarnya dalam penyelesaian masalah pendidikan dan kebudayaan.

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga Kemendikbud dapat menjadi nahkoda dalam penyelesaian masalah pendidikan dan kebudayaan, serta dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

INFOGRAFIS KINERJA KEMENDIKBUD 2016

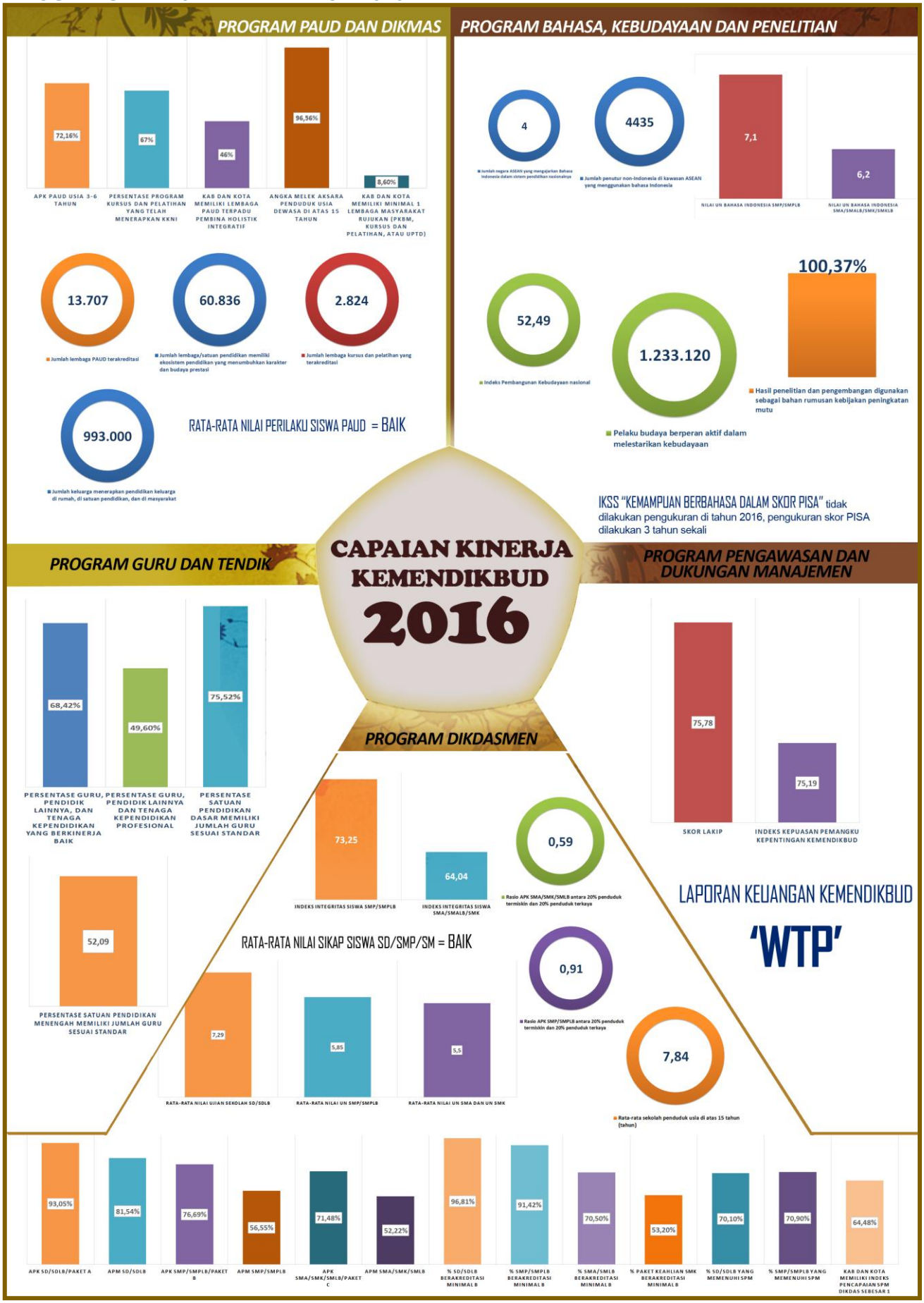

BAB I
PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 juga mengamanatkan agar negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah membentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibentuk pertama kali pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sampai saat ini telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur, terakhir kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kabinet kerjanya. Dasar pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet kerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Bapak Muhadjir Effendy menggantikan Anies Baswedan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat ini, struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai delapan unit kerja eselon I dan empat staf ahli, yang meliputi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain didukung unit kerja yang ada di pusat, Kemendikbud juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Saat ini, Kemendikbud mempunyai 131 UPT yang tersebar di seluruh provinsi.

Berikut struktur organisasi Kemendikbud sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

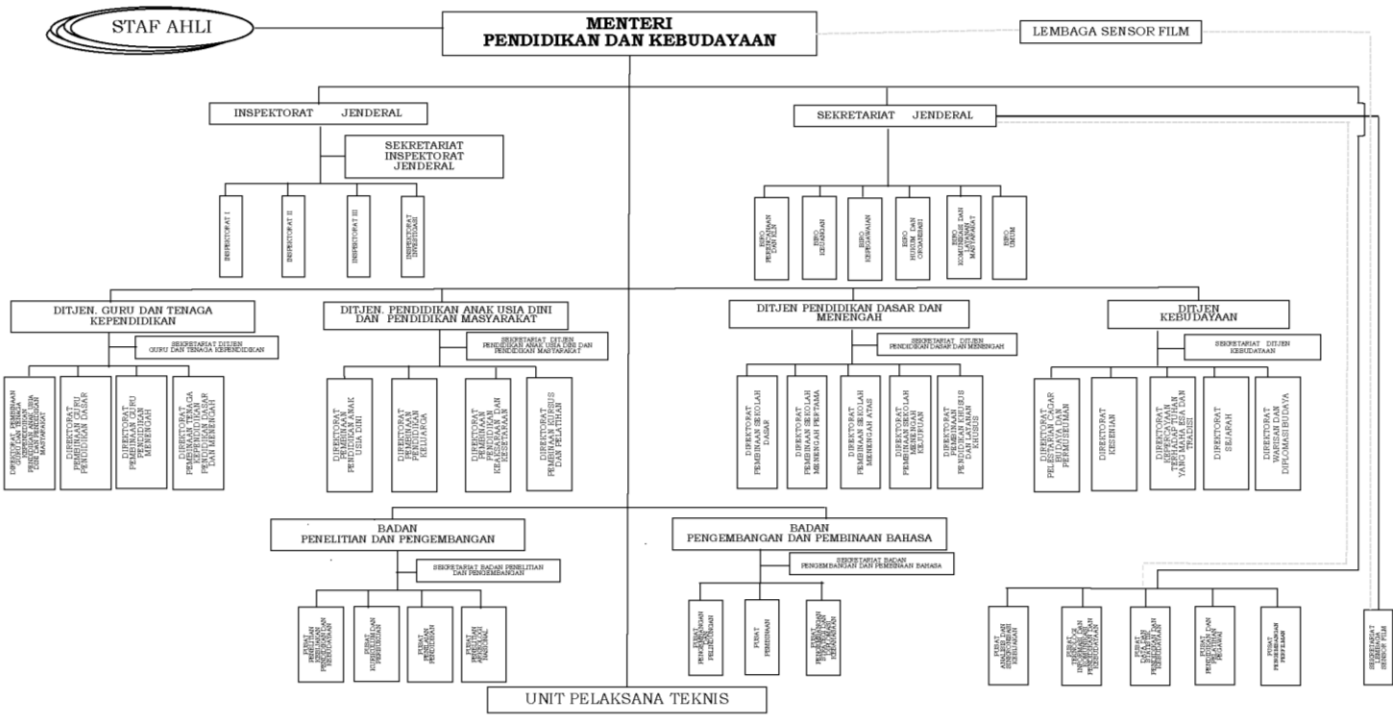

Struktur Organisasi Kemendikbud

Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Kemendikbud telah menetapkan visi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

Visi Kemendikbud tahun 2015-2019 adalah:

"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, Kemendikbud menjalankan lima misi, yaitu:

M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama lima tahun ke depan sebanyak enam tujuan strategis, yaitu:

1. penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
2. pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan;
3. peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus;
4. peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter;
5. peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan;
6. peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Guna mencapai tujuan strategis yang ditetapkan tersebut, Kemendikbud menjalankan delapan program, setiap program dijalankan oleh satu unit kerja eselon I. Berikut delapan program Kemendikbud yang dijalankan unit kerja eselon I.

No	Nama Program	Unit Eselon I Pelaksana
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal
3	Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
4	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7	Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Pelestarian Budaya	Direktorat Jenderal Kebudayaan

Agar visi dan misi yang ditetapkan dapat terwujud dengan baik diperlukan penerapan tata nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tujuh tata nilai yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud antara lain : memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih.

Permasalahan

Sebagai upaya membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter maka permasalahan-permasalahan pendidikan dan kebudayaan harus dapat diselesaikan dengan baik. Kemendikbud telah mengidentifikasi pemasalahan-permasalahan yang dihadapi selama lima tahun ke depan. Berikut permasalahan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Peran pelaku pembangunan pendidikan yang belum optimal, selain itu penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan;
2. Penguatan pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah;
3. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan;
4. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas;
5. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal, seperti:
   a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal
   b) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas
   c) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal
6. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal;
7. Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum maksimal, seperti :
   a) Jumlah dan distribusi guru perlu ditata secara lebih baik;
   b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih perlu ditingkatkan;
   c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas.
8. Peningkatan ketrampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal;
9. Pengentasan keniraksaraan belum merata;
10. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan;
11. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah;
12. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa;
13. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
14. Pelestarian warisan budaya belum efektif;
15. Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya;
16. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal;
17. Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien;
18. Belum optimalnya pendidikan vokasi yang ada;
19. Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud;

Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Kemendikbud sedang mengikuti prosesi pelantikan di Aula Utama Gedung A. Pejabat yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi terbuka yang dilakukan oleh Kemendikbud.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA KEMENDIKBUD

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, Kemendikbud membuat perjanjian kinerja tahun 2016. Perjanjian kinerja menyajikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016. Target kinerja tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan, setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja secara periodik dan pada akhir tahun capaian kinerjanya disajikan dalam laporan kinerja tahunan.

Untuk membiayai pencapaian target kinerja tahun 2016, Kemendikbud memperoleh pagu anggaran sebesar Rp49.232.799.474.000. Setelah ada kebijakan pemotongan anggaran (efisiensi) direvisi menjadi sebesar Rp43.605.863.439.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada delapan program yang dilaksanakan oleh delapan unit kerja eselon I di lingkungan Kemendikbud, dengan rincian sebagai berikut.

Nama Program	Unit Kerja	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal	2.603.949.701.000
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal	166.550.467.000
3. Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	24.195.401.503.000
4. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.826.883.710.000
5. Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan pengembangan	1.253.314.938.000
6. Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	415.666.040.000
7. Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	11.596.822.351.000
8. Pelestarian Budaya	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.547.274.729.000

Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan enam belas sasaran strategis dengan 45 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kemendikbud tahun 2016.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	70 dan 72
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	970.900
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	70%
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.200.000
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	72,10%
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	46%
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	2.621
		4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,43%
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	9%
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	97,85%
		2. APM SD/SDLB	82,51%
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	81,89%
		4. APM SMP/SMPLB	72,69%
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	79,31%
		6. APM SMA/SMK/SMLB	66,87%
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,87
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,55
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,3 tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	36.051
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55,30%
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	66%
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	62%
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	80,24%
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	54,90%
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,24%
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,01%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	55%
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,5
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,5
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,5
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	70%
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	50,9%
		2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	68,13%
		3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	67%
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	52.628
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional	34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	402
		2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,3 dan 6,8
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	3
		2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	1.310
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	75
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	74

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENDIKBUD

Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA KEMENDIKBUD

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan enam belas sasaran strategis dengan 45 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut tingkat ketercapaian enam belas sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2016.

SS1 Meningkatnya perilaku positif siswa

Sasaran strategis meningkatnya perilaku posistif siswa ditetapkan guna melihat sejauhmana tingkat perilaku dan sikap siswa mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis pertama yaitu penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan (T1).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya perilaku positif siswa didukung melalui ketercapaian tiga indikator kinerja, yaitu:

1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD;
2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK;
3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM

Perilaku posistif siswa mulai dari PAUD sampai dengan jenjang pendidikan menengah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dari rata-rata nilai perilaku/sikap siswa. Peningkatan juga terlihat dari naiknya indeks integritas baik siswa SMP sederajat maupun tingkat SMA sederajat.

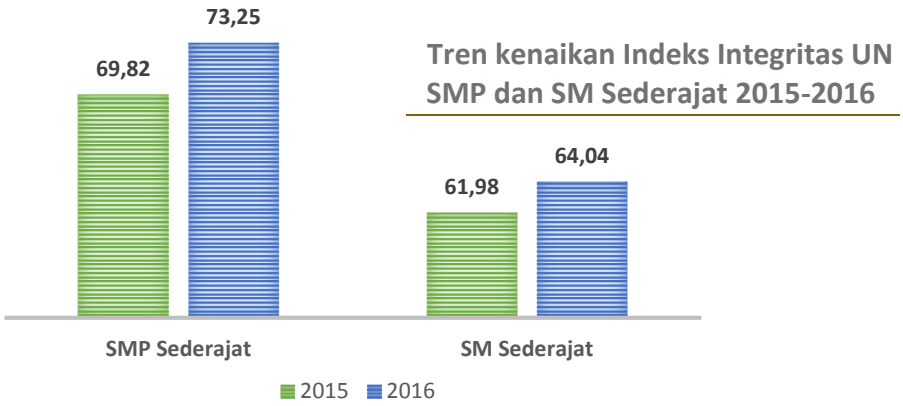

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya perilaku positif siswa.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	**Cukup**	Baik	**Baik**	-
	2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	**69,82 dan 61,98**	70 dan 72	**73,25 dan 64,04**	**104,6 dan 88,94**
	3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	**Baik**	Baik	**Baik**	-

IKSS 1.1 "Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD" untuk tahun 2016 mencapai predikat 'Baik'. Realisasi tersebut telah sesuai dengan yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan.

Pencapaian target tersebut juga didukung adanya program yang dijalankan Kemendikbud yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penguatan karakter bangsa merupakan salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Untuk mendukung keberhasilan tersebut Kemendikbud menindaklanjuti dengan mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Dalam pengimplementasian Program PPK tersebut, Kemendikbud menfokuskan pada lima nilai utama yaitu **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas.**

Satuan PAUD merupakan fondasi yang memberi dasar kuat bagi pembentukan karakter budi pekerti. Pembentukan budi pekerti di satuan PAUD dilakukan melalui pembiasaan rutin. Kegiatan pembiasaan sebagai bagian besar dari pengejawantahan dari kurikulum PAUD yang disesuaikan dengan visi misi satuan PAUD dan diterjemahkan ke

dalam kegiatan harian. Perilaku berbudi pekerti diantaranya disiplin antri, perilaku hidup bersih dan sehat, bekerjasama, saling menghargai, berbagi, dan sebagainya.

Sesungguhnya penanaman perilaku budi pekerti yang sangat mudah dilakukan pada usia dini, karena anak mampu menerima dan menerapkan contoh yang diberikan guru lebih cepat dari kelompok usia di atasnya. Ketercapaian sikap anak usia dini melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra yakni mencapai nilai baik. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk mendukung pencapaian indikator ini telah menyusun pedoman pembentukan Karakter sebagai implementasi Kurikulum PAUD dan sarana lainnya.

Secara bergotong-royong siswa PAUD melakukan kegiatan kebersihan lingkungan sebagai bagian pembiasan berperilaku hidup sehat.

Pencapain indikator kinerja ini mempunyai beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya pelaporan atau evaluasi siswa PAUD yang tersistemasi dengan baik, sehingga cukup sulit mendapatkan data kuantitatif untuk melihat rata-rata perilaku siswa PAUD. Perilaku siswa PAUD adalah impact dari hasil semua pembelajaran di lembaga PAUD yang dapat dilihat perubahannya oleh lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar lainnya.

IKSS 1.2 "Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK" Secara umum, Indeks integritas Ujian Nasional (IIUN) tahun 2016 untuk jenjang SMP dan Sekolah Menengah sederajat mengalami kenaikan secara signifikan jika dibandingkan dengan IIUN tahun 2015. Dengan kenaikan indeks integritas ini menunjukkan praktik kecurangan UN yang sistematik di sekolah-sekolah menurun.

INDEKS INTEGRITAS SISWA SMP DAN SM SEDERAJAT MENINGKAT SIGNIFIKAN

Untuk jenjang SMP, dari indeks yang ditargetkan sebesar 70 berhasil terealisasi 73,25%, dengan persentase capaian sebesar 104,6%. Berbeda dengan jenjang SMP sederajat, Indeks integritas untuk jenjang Sekolah Menengah sederajat belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 72 baru berhasil terealisasi sebesar 64,04, dengan persentase capaian sebesar 88,94%.

Keberhasilan peningkatan indeks Integritas tidak terlepas dari penggunaan moda ujian berbasis computer *(Computer Based Test)* yang biasa disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan adanya kebijakan UN tidak lagi menjadi acuan dalam

kelulusan siswa. Selain itu, keberhasilan juga didukung adanya (1) sosialisasi hasil UN, yang di dalamnya mencakup informasi tentang indeks integritas; (2) kampanye pentingnya kejujuran dan objektivitas penyelenggaraan UN yang sangat terkait dengan kredibilitas dan validitas hasil ujian untuk digunakan sebagai dasar dalam pemetaan mutu pendidikan dan pembinaan satuan pendidikan, (3) pemberian penghargaan kepada 503 sekolah yang secara konsisten memiliki IIUN tinggi selama beberapa tahun terakhir.

Meningkatnya indeks integritas tersebut juga didukung para kepala daerah yang secara serius menunjukkan tekad mewujudkan UN di wilayahnya dilaksanakan dengan jujur. Urutan daerah dengan kenaikan IIUN tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sumatera Selatan di peringkat kedua, diikuti Sulawesi Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Utara. Sedangkan, daerah dengan nilai IIUN tertinggi tahun ini adalah DI Yogyakarta, diikuti oleh DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, indeks integritas pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada jenjang SMP dan sederajat, IIUN mengalami peningkatan sebesar 3,43 poin, yaitu dari 69,82 pada tahun 2015 menjadi 73,25 di tahun 2016. Persentase sekolah yang memiliki IIUN dengan kategori tinggi (di atas 80) meningkat dari 23% menjadi 40%. Berikut perbandingan antara IIUN SMP dan sederajat tahun 2015 dan tahun 2016.

SMP Sederajat	2015		2016		Perubahan	
	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	UN	IIUN
NEGERI & SWASTA	62.18	69.82	58.56	73.25	-3.62	3.43
NEGERI	62.37	68.32	58.85	71.64	-3.52	3.32
SWASTA	61.63	72.26	57.7	75.85	-3.93	3.59

Pada jenjang SMA dan sederajat, IIUN mengalami peningkatan sebesar 2,06 poin, yaitu dari 61,93 pada tahun 2015 menjadi 64,04 di tahun 2016. Persentase sekolah yang memiliki IIUN dengan kategori tinggi (di atas 80) meningkat dari 35% menjadi 61%. Berikut perbandingan antara IIUN SMA dan sederajat pada tahun 2015 dan tahun 2016.

SMA Sederajat	2015		2016		Perubahan	
	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	UN	IIUN
NEGERI & SWASTA	61,93	61,98	55,03	64,04	-6.9	2.06
NEGERI	62,70	61,65	55,45	63,28	-7,25	1.63
SWASTA	59,90	62,39	53,87	64,96	-6,03	2.57

Kenaikan IIUN merupakan hasil dari beberapa upaya antara lain: (1) sosialisasi hasil UN, yang di dalamnya mencakup informasi tentang indeks integritas; (2) kampanye

pentingnya kejujuran dan objektivitas penyelenggaraan UN yang sangat terkait dengan kredibilitas dan validitas hasil ujian untuk digunakan sebagai dasar dalam pemetaan mutu pendidikan dan pembinaan satuan pendidikan, (3) pemberian penghargaan kepada 503 sekolah yang secara konsisten memiliki IIUN tinggi selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, penggunaan moda ujian berbasis computer *(Computer Based Test)* yang biasa disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dapat meningkatkan IIUN secara signifikan.

IKSS 1.3 "Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM" realisasi pada tahun 2016 mencapai 'baik'. Realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut, tidak terlepas dari program/kegiatan yang dijalankan oleh Kemendikbud. Salah satu program yang dijalan Kemendikbud untuk memperbaiki sikap siswa SD/SMP/SM adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Untuk mendukung perbaikan sikap siswa SD/SMP/SM, Kemendikbud juga telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dengan Peraturan tersebut diharapkan setiap sekolah punya pola pembiasaan positif. Dengan pembiasaan tersebut diharapkan akan menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual, nilai-nilai kebangsaaan dan kebhinekaan, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua, mengembangkan interaksi posisif antar peserta didik, merawat diri dan lingkungan, mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh,

Upaya lain yang dijalankan adalah melalui Program penguatan Karakter. Program penguatan pendidikan karakter yang dijalankan Kemendikbud menfokuskan pada penguatan lima nilai utama, kelima nilai tesebut antara lain **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.** Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga/satuan pendidikan. Targetnya, pendidikan karakter dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh siswa. Program PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA/SMK.

Dalam rangka penguatan karakter siswa, sejumlah murid SD sedang memungut sampah di lingkungan sekolah secara bergotong-royong

Implementasi program PPK dilakukan melalui kegiatan pembiasan yang dilakukan disekolah, kegiatan intra-kurikuler, kegiatan ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan diantaranya memulai hari dengan upacara bendera setiap senin,

Apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional dan daerah, berdoa bersama, membaca buku non pelajaran, cerita rakyat selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.

Pelaksanaan program PPK dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2016, sebanyak 542 sekolah dipilih sebagai sekolah uji coba yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 21 SD dan 21 SMP, sedangkan untuk tahap kedua sebanyak 250 SD dan 250 SMP.

Pencapaian target tersebut juga didukung adanya pelaksanaan progam ekstra kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Pada tahun 2016, jumlah sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler sebanyak 4.029 SD, 852 SMP. Selain program ekstrakurikuler, pencapaian juga didukung oleh banyaknya siswa/sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Untuk tahun 2016, jumlah siswa SMA yang menerapkan pendidikan karakter sebanyak 13.409 siswa, sebanyak 764 sekolah SMK menerapkan pendidikan karakter dan jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter sebanyak 100 sekolah.

SS2 Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan ditetapkan bertujuan untuk melihat sejauhmana tingkat partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan keluarga. Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis pertama yaitu penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan (T1).

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja "jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat".

Partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan dalam keterlibatan pendidikan semakin menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya keluarga yang menerapkan pendidikan keluarga baik dirumah, di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Tercatat sampai dengan tahun 2016 ada sebanyak 1.325.000 keluarga menerapkan pendidikan keluarga.

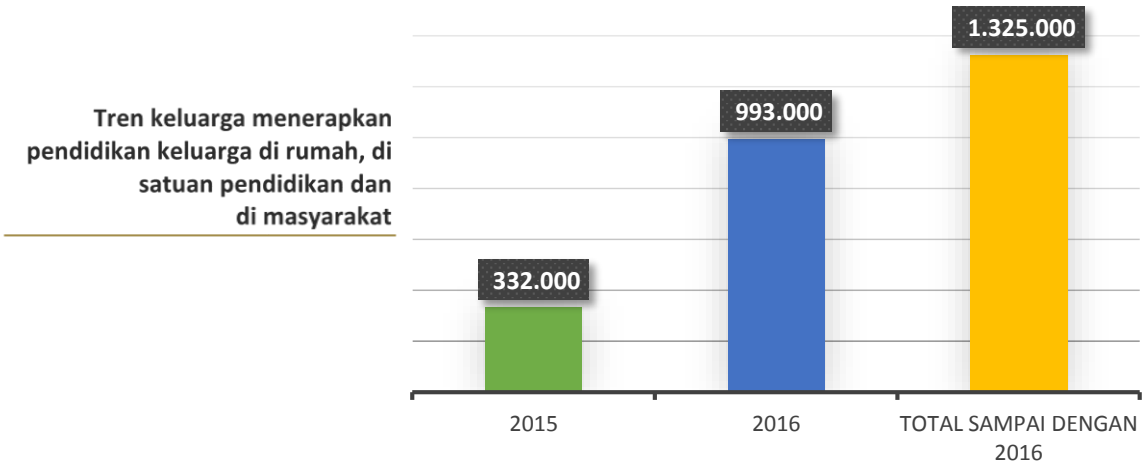

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	**332.000**	970.900	**993.000**	**102.28**

IKSS 2.1 "jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat" pada tahun 2016 realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 970.900 orang, berhasil terealisasi sebanyak 993.000 orang, dengan persentase capaian sebesar 102,28%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 661.000 keluarga. tercatat pada tahun 2015 sendiri jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga sebanyak 332.000 keluarga.

Indikator ini merupakan ukuran keberhasilan dari partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan yang diperoleh dari partisipasi aktif orang dewasa atau keterlibatan orangtua siswa dan satuan pendidikan, baik Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan maupun Pendidikan Non Formal.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh empat kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Penguatan pelaku pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada 62 kabupaten, dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50.416 orang.
2) Bimbingan teknis penyelenggaran pendidikan keluarga di 160 kabupaten/kota, dengan jumlah kepala satuan pendidikan/lembaga pendidikan, dan mitra (antara lain: penilik, pengawas satuan pendidikan, serta organisasi masyarakat pegiat pendidikan keluarga) sebanyak 10.400 orang.
3) Satuan/Lembaga Pendidikan pada nomor (1) dan (2) telah berpartisipasi aktif mensosialisasikan penerapan pendidikan keluarga kepada orangtua/wali siswa disetiap jenjang satuan pendidikan
4) Selain itu, sosialisasi penerapan pendidikan keluarga dilakukan juga melalui laman sahabat keluarga. Sampai tertanggal 28 Desember 2016 telah dikunjungi oleh 479.761 pengunjung laman

Untuk mendukung penerapan pendidikan keluarga di rumah dan satuan pendidikan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga telah mendistribusikan Buku, serta poster dengan tema "Menjadi Orang Tua Hebat" sebagai media sosialisasi kepada masyarakat, orangtua, pendidik dan tenaga kependidikan sehingga memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga sebanyak 2.391.000 eksemplar.

Buku Materi Pendidikan Keluarga "Menjadi Orang Tua Hebat"

Bentuk partisipasi aktif dalam hal ini adalah ikut serta mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan keluarga dan melibatkan orangtua siswa dalam satuan pendidikan, baik satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, maupun Pendidikan Nonformal.

Tantangan ke depan adalah meyakinkan pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/kota) untuk memperkuat pelibatan orang tua dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Hal ini tercermin pada program yang telah disiapkan seperti pelibatan orang tua di hari pertama anak masuk sekolah, terbentuknya paguyuban orang tua, melibatkan orang tua pada kegiatan pentas kelas akhir tahun sekolah dan masih banyak lagi kegiatan inovatif lainnya.

SS3 Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga kependidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis pertama yaitu penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan (T1). Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja "persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	Penilaian Kinerja baru akan mulai dilakukan tahun 2016	70%	**68,42%**	**97,7**

IKSS 3.1 "Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik" untuk tahun 2016, realisasi kinerjanya belum mencapai target. Pada tahun 2016 persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik baru mencapai 68,42% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 70%, dengan persentase capaian sebesar 97,7%.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Bagi guru, PKG merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Bila mengacu kepada empat kompetensi guru, maka PK Guru utamanya menilai terhadap kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

PKG merupakan dasar dalam penetapan perolehan angka kredit guru yang berdampak pada peningkatan mutu peserta didik yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PKG menjadi dasar memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permennegpan & RB No.16/2009. Aktifitas PKG tersebut dilakukan setiap tahun. Lebih lanjut dalam tata kelola guru terdapat dua aktifitas dalam sistem karir fungsional kelola guru yang mensyaratkan nilai PKG minimal baik yaitu (1) pada setiap kenaikan jenjang karir fungsional guru; (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru yang dinilai dalam masa program induksi.

Berdasar hal tersebut, hingga saat ini, Kemendikbud telah dapat mengidentifikasi 1,999,821 guru sudah mempunyai nilai PKG minimal baik. Bila dilihat dari jumlah guru sebanyak 2.922.826 orang maka persentase guru yang telah mempunyai kinerja guru capaian 68.42%. Dengan demikian maka capaian terhadap indikator menjadi 97.7%

Capaian indikator kinerja sebesar 97,7% dikarenakan adanya dukungan oleh sejumlah peraturan yang mewajibkan PKB sebagai persyaratan seperti yang tercantum diatas. Namun demikian terdapat sejumlah hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam ketercapaian target indikator kinerja PKG utamanya implemetasi PKG dilapangan diantaranya (1) guru masih kesulitan dalam pengumpulan nilai PKG dan PKB; (2) para implementator mengangkap PKG dan PKB sebagai formalitas administrasi semata dan menjadi beban dan tugas tambahan; (3) masih ada guru/kepala sekolah/pengawas sekolah yang belum memahami konten/kepentingan dalam PKG dan Pengembangan Karier Guru dalam kenaikan jabatan fungsional guru; (4) masih ada daerah yang tidak memiliki koordinator PKG/PKB.

Beberapa langkah antisipasi yang diambil agar target hambatan tersebut tidak berlanjut dan menjadi masalah yang serius di kemudian hari adalah: (1) bimbingan teknis dan sosialisasi angka kredit tidak saja dilakukan oleh Kemendikbud tapi untuk juga dilakukan oleh BKN; (2) Kemendikbud setiap tahun membantu bimbingan teknis dan ujian bagi Tim Penilai Angka Kredit pusat dan daerah.

SS4 Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis kedua yaitu pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan (T2).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, Mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan didukung melalui ketercapaian indikator kinerja "Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan".

Peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dari jumlah pelaku budaya yang aktif dalam melestarikan kebudayaan. Pada tahun 2016 ada sebanyak 1.233.120 orang yang aktif dalam melestarikan kebudayaan naik jika dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk tahun 2015 sendiri ada sebanyak 1.048.458 pelaku budaya yang aktif dalam melestarikan kebudayaan.

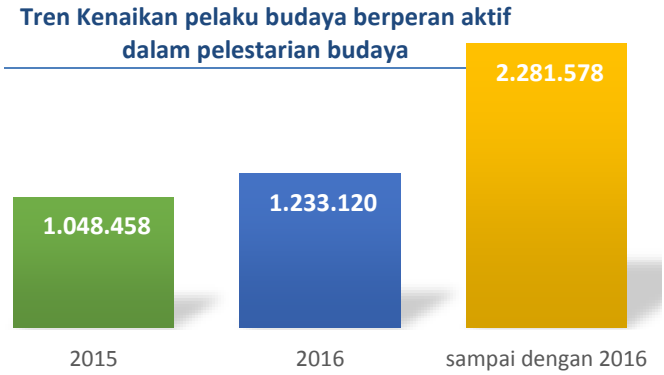

Peserta sedang memainkan musik dalam Festival Musik Tradisional, dengan festival ini diharapkan dapat mengairahkan para pelaku budaya dalam melestarikan budaya

Berikut ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	**1.048.458**	1.200.000	**1.233.120**	**102,76**

IKSS 4.1 "pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan budaya" realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1.200.000 pelaku budaya telah berhasil terealisasi sebanyak 1.233.120 pelaku budaya yang aktif dalam melestarikan kebudayaan, dengan persentase capaian kinerja sebeasr 102,76%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari jumlah pelaku budaya yang aktif dalam melestarikan budaya. Untuk tahun 2015, tercatat ada sebanyak 1.048.458 pelaku budaya naik menjadi 1.233.120 pelaku budaya di tahun 2016. Jumlah sebanyak 1.233.120 pelaku budaya berasal dari enam bidang yaitu cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan dan nilai budaya. Berikut rincian pelaku budaya yang aktif dalam pelestarian kebudayaan tahun 2016.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PELAKU BUDAYA BIDANG:						JUMLAH
		Cagar Budaya	Permuseuman	Kesenian	Perfilman	Kesejarahan	Nilai Budaya	
1	Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman	7.470	44.283					51.753
2	Pembinaan Kesenian			11.015				11.015
3	Pembinaan Kepercayaan Terhadap TYME dan Tradisi						17.655	17.655
4	Pengembangan Sejarah					28.590		28.590
5	Pengembangan Diplomasi Budaya						6.147	6.147
6	Pengembangan Galeri Nasional			1.236				1.236
7	Pengelolaan Permuseuman	345.542	504.097	713	13	659	230	851.254
8	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	208.553	1	154	-	-	1.000	209.708
9	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	32	30	2.680	4	578	46.638	49.962
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan			5.800				5.,800
	Sub Jumlah	**561.597**	**548.,411**	**21.598**	**17**	**29.827**	**71.670**	**1.233,120**
	JUMLAH							**1.233.120**

Realisasi kinerja tersebut dapat juga dilihat per-bidang garapan pelaku budaya, sebagai berikut:

1. Bidang cagar budaya sebanyak 561.597 pelaku atau 45,54%;
2. Bidang permuseuman sebanyak 548.411 pelaku atau 44.47%;
3. Bidang kesenian sebanyak 21.598 pelaku atau 2,42%;
4. Bidang perfilman sebanyak 17 pelaku atau 0,01%;
5. Bidang kesejarahan sebanyak 29.827 pelaku atau 1,75%;
6. Bidang nilai budaya sebanyak 71.670 pelaku atau 5,81%.

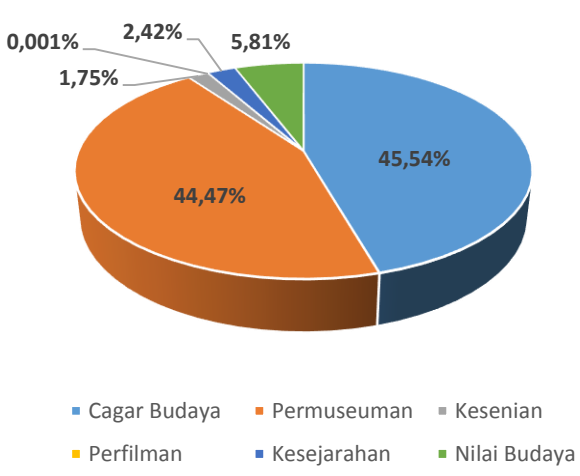

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa peran pelaku budaya dalam rangka pelestarian budaya masih perlu ditingkatkan pada pelaku budaya dengan prioritas bidang perfilman, kesejarahan, kesenian, dan nilai budaya.

Pemberdayaan pelaku budaya merupakan awal dari penguatan peran mereka dalam melestarikan kebudayaan yang dicirikan antara lain dengan meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan. Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya. Secara bersamaan akan terjadi peningkatan mutu karya dan pelaku budaya, serta layanan dalam pelestarian warisan budaya.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan upaya merealisasikan target kinerja ini beberapa kegiatan strategis pemberdayaan pelaku budaya dalam pelestarian kebudayaan, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesadaran Pelaku Budaya Untuk Melestarikan Kebudayaan

1. Registrasi Nasional Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

Penetapan cagar budaya adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pemberdayaan pelaku budaya dalam registrasi nasional cagar budaya sampai tahun 2014 telah dihasilkan sebanyak 64.844 cagar budaya yang tercatat dan ditetapkan sebanyak 953 cagar budaya. Hasil pencatatan dan penetapan cagar budaya tahun 2015, tercatat sebanyak 23.644 cagar budaya dan telah direkomendasikan sebanyak 30 objek yang diduga sebagai cagar budaya yang memiliki kriteria sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Sedangkan hasil pencatatan dan penetapan cagar budaya pada tahun 2016 telah dihasilkan 25.243 cagar budaya yang tercatat dan 12 cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Sehingga sampai tahun 2016 telah tercatat sebanyak 113.731 cagar budaya dan ditetapkan sebanyak 984 cagar budaya nasional.

Hasil penetapan cagar budaya tahun 2016 sebanyak 12 Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

NO	NAMA OBJEK	KATEGORI	LOKASI	NOMOR SK	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN
1.	Situs Cagar Budaya Candi Badut	Situs	Malang – Jawa Timur	203/M/2016	Situs Cagar Budaya Candi Badut dan Situs Cagar Budaya Candi Jago sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional	26 Agustus 2016
2.	Situs Cagar Budaya Candi Jago	Situs	Malang – Jawa Timur	203/M/2016		26 Agustus 2016
3.	Prasasti Muara Cianten	Benda	Bogor – Jawa Barat	204/M/2016	Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak), Prasasti Cidanghiang, Prasasti Pasir Awi dari Kerajaan Tarumanegara Masa Raja Purnawarman dan Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional	26 Agustus 2016
4.	Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak)	Benda	Bogor – Jawa Barat	204/M/2016		26 Agustus 2016
5.	Prasasti Cidanghiang	Benda	Pandeglang – Banten	204/M/2016		26 Agustus 2016
6.	Prasasti Pasir Awi	Benda	Bogor – Jawa Barat	204/M/2016		26 Agustus 2016
7.	Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia	Benda	Jakarta Selatan – DKI Jakarta	204/M/2016		26 Agustus 2016
8.	Bangunan Cagar Budaya Benteng Marlborough	Bangunan	Bengkulu – Bengkulu	205/M/2016	Bangunan Cagar Budaya Benteng Marlborough, Bangunan Cagar Budaya Candi Jabung, Bangunan Cagar Budaya Candi Kidal, Bangunan Cagar Budaya Candi Singosasri, dan Istana Bima"Asi Mbojo" sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional	26 Agustus 2016
9.	Bangunan Cagar Budaya Candi Jabung	Bangunan	Probolinggo – Jawa Timur	205/M/2016		26 Agustus 2016
10.	Bangunan Cagar Budaya Candi Kidal	Bangunan	Malang – Jawa Timur	205/M/2016		26 Agustus 2016
11.	Bangunan Cagar Budaya Candi Singosasri	Bangunan	Malang – Jawa Timur	205/M/2016		26 Agustus 2016
12.	Istana Bima"Asi Mbojo"	Bangunan	Bima – Nusa Tenggara Barat	205/M/2016		26 Agustus 2016

2. Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda

Pencatatan warisan budaya takbenda merupakan upaya penting pendataan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia untuk menambah data karya budaya yang ada di database warisan budaya takbenda Indonesia. Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia bertujuan:

1. Merekam data secara tertulis terhadap hasil Pendaftaran Budaya Takbenda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
2. Pencatatan seluruh kekayaan budaya yang ada di Indonesia untuk upaya pelindungan dari kepunahan dan membangun kesadaran dalam pelestarian kebudayaan;
3. *'Inventory national'* sebagai syarat pengajuan nominasi WBTB untuk diakui oleh UNESCO.

Warisan budaya takbenda Indonesia dengan kategori pencatatan sebagai berikut:

a. Tradisi Lisan	f. Upacara/Ritus	k. Kerajinan Tradisional
b. Bahasa	g. Kearifan Lokal	l. Kuliner Tradisional
c. Naskah Kuno	h. Teknologi Tradisional	m. Pakaian Adat
d. Permainan Tradisional	i. Arsitektur	n. Senjata Tradisional
e. Seni Tradisi	j. Kain Tradisional	

Warisan budaya takbenda Indonesia sampai tahun 2014 tercatat sebanyak 5.231 karya budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia sebanyak 173 karya budaya. Pada tahun 2015, hasil pencatatan sebanyak 475 karya budaya dan hasil penetapan karya budaya sebagai warisan budaya takbenda Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 121 karya budaya.

Hasil pencatatan warisan budaya takbenda tahun 2016 sebanyak 1.004 warisan budaya takbenda, dan ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia sebanyak 150 warisan budaya. Sehingga sampai tahun 2016 telah tercatat sebanyak 7.242 warisan budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia sebanyak 444 karya budaya.

Berikut hasil penetapan warisan budaya takbenda Indonesia tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut:

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
1	Aceh	Mak Meugang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2	Aceh	Nandong	Tradisi dan Ekspresi Lisan
3	Aceh	Guel	Seni Pertunjukan
4	Aceh	Likok Pulo	Seni Pertunjukan
5	Aceh	Pacu Kude	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6	Aceh	Menatakhken Hinei	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
7	Aceh	Canang Kayu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8	Aceh	Maracu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9	SUMUT	Erpangir Ku Lau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
10	SUMUT	Sipaha Lima (Ugamo Malim)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
11	SUMUT	Ni 'Oworu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12	SUMUT	Dayok Binatur	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
13	Kep.Riau	Gasing Kepri	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14	Kep.Riau	Langlang Buana	Tradisi dan Ekspresi Lisan
15	Riau	Randai Kuantan	Seni Pertunjukan
16	Riau	Nyanyi Panjang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
17	Riau	Bedewo Bonai	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
18	Riau	Debus Indragiri Hulu	Seni Pertunjukan
19	Riau	Calempong Oguong	Seni Pertunjukan
20	Riau	Joget Sonde	Seni Pertunjukan
21	BABEL	Telo' Seroja	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
22	BABEL	Besaoh Dalam Beume	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
23	BABEL	Memarung, Panggung	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
24	BABEL	Tari Gajah Menunggang	Seni Pertunjukan
25	BABEL	Sepen Penyok	Seni Pertunjukan
26	BABEL	Rudat Bangka Belitung	Seni Pertunjukan
27	BABEL	Pakaian Pengantin	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
		Paksian	
28	Jambi	Tale Nek Jei (Tale Keberangkatan Haji)	Tradisi dan Ekspresi Lisan
29	Jambi	Upacara Asyeik	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
30	Jambi	Tauh (Betauh)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
31	Jambi	Tari Kain Kromong	Seni Pertunjukan
32	Jambi	Musik Kromong Mandiangin	Seni Pertunjukan
33	Jambi	Musik Kalinong	Seni Pertunjukan
34	Sumatera Barat	Tari Tanduak (Tari Tanduk)	Seni Pertunjukan
35	Sumatera Barat	Tari Piriang (Tari Piring)	Seni Pertunjukan
36	SUMSEL	Ande-Ande	Tradisi dan Ekspresi Lisan
37	SUMSEL	Rejung Sumatera Selatan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
38	SUMSEL	Warahan Sumatera Selatan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
39	SUMSEL	Bidar	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
40	Lampung	Warahan Lampung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
41	Lampung	Kakiceran	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
42	Lampung	Maduaro	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
43	Lampung	Tenun Ikat Inuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
44	Lampung	Tupping	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45	Banten	Seren Taun Banten kidul	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
46	Banten	Angeun Lada	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
47	DKI Jakarta	Samrah Betawi	Seni Pertunjukan
48	DKI Jakarta	Gambang Rancag	Seni Pertunjukan
49	DKI Jakarta	Topeng Jantuk	Seni Pertunjukan
50	DKI Jakarta	Keroncong Tugu	Seni Pertunjukan
51	DKI Jakarta	Topeng Blantek	Seni Pertunjukan
52	DKI Jakarta	Soto Betawi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
53	DKI Jakarta	Gado-gado Betawi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54	DKI Jakarta	Rias Besar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55	Jawa Barat	Mapag Tamba (Nibaaken Tamba)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
56	Jawa Barat	Ngalungsur Geni (Ngalungsur Pusaka)	Tradisi dan Ekspresi Lisan
57	Jawa Barat	Rahengan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
58	Jawa Barat	Penca (Penca Silat Jabar)	Seni Pertunjukan
59	Jawa Barat	Badeng	Seni Pertunjukan
60	Jawa Barat	Lais Garut	Seni Pertunjukan
61	Jawa Barat	Kelom Geulis	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
62	Jawa Barat	Lukis kaca Cirebon	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
63	Jawa Tengah	Jolenan Somongari	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
64	Jawa Tengah	Upacara Adat Apeman Yaqowiyu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
65	Jawa Tengah	Ruwatan Rambut Gimbal	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
66	Jawa Tengah	Meron Pati	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
67	Jawa Tengah	Turonggo Seto Boyolali	Seni Pertunjukan
68	Jawa Tengah	Tari Gambyong	Seni Pertunjukan
69	Jawa Tengah	Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus)	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
70	D.I Yogyakarta	Suran Mbah Demang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
71	D.I Yogyakarta	Upacara Tawur Kesanga Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
72	D.I Yogyakarta	Labuhan Keraton Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
73	D.I Yogyakarta	Langendriya Yogyakarta	Seni Pertunjukan
74	D.I Yogyakarta	Tari Angguk	Seni Pertunjukan
75	D.I Yogyakarta	Langen Mandra Wanara	Seni Pertunjukan
76	D.I Yogyakarta	Jathilan Yogyakarta	Seni Pertunjukan
77	D.I Yogyakarta	Lurik Yogyakarta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
78	D.I Yogyakarta	Bakpia Yogyakarta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
79	Jawa Timur	Entas-Entas Tengger	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
80	Jawa Timur	Keboan-Aliyan Osing	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
81	Jawa Timur	Mecak-Tengger	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
82	Jawa Timur	Jaran Kencak	Seni Pertunjukan
83	Jawa Timur	Wayang Krucil Malangan	Seni Pertunjukan
84	Jawa Timur	Lodho	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
85	Bali	Ngrebeg Mekotek	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
86	Bali	Ter-teran	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
87	Bali	Gebug Ende	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
88	NTB	Pacoa Jara, Pacu Mbojo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
89	NTB	Gegerok Tandak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
90	NTT	Repit	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
91	NTT	Kure	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
92	NTT	Wulla Podu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
93	NTT	Leru Weru (Upacara Pesta Kacang)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
94	NTT	Matekio	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
95	NTT	Reba	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
96	NTT	Tarian Likurai	Seni Pertunjukan
97	NTT	Tarian Pado'a	Seni Pertunjukan
98	NTT	Se'i	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
99	KALBAR	Meriam Karbit	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
100	KALBAR	Upacara Robo-robo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
101	KALSEL	Batatamba	Tradisi dan Ekspresi Lisan
102	KALSEL	Mamanda	Tradisi dan Ekspresi Lisan
103	KALSEL	Tari Baksa Kambang	Seni Pertunjukan
104	KALSEL	Wayang Kulit Banjar	Seni Pertunjukan
105	KALSEL	Air Guci	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
106	KALTIM	Erau Kartanegara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
107	KALTIM	Sarung Tenun Samarinda	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
108	KALTIM	Petis Udang Paser	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
109	Kalimantan Utara	Na' Ngadan Amai Bio (Upacara Adat Kenyah)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
110	Kalimantan Utara	Ngukab Fulung, Ngripak Ulung (Upacara Adat Dayak Lundayeh)	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
111	Kalimantan Utara	Jugit Demaring (Tari Klasik Kesultanan Bulungan)	Seni Pertunjukan
112	Kalimantan Utara	Bening dayak kenyah kalimantan utara (Gendongan Bayi)	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
113	SULSEL	A'raga/Ma'raga	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
114	SULSEL	Mappadendang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
115	SULSEL	Tudang Sipulung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
116	SULSEL	Mappalili Sigeri	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
117	SULSEL	Maudu Lompoa	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
118	SULSEL	Lipa Sabbe	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
119	Sulawesi Barat	Mangaro	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
120	Sulawesi Barat	Perkawinan adat Mandar	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
121	Sulawesi Barat	Keke/ pakeke	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
122	Sulawesi Barat	Calong	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
123	Sulawesi Barat	Masossor Manurung /Manossor Manurung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
124	Sulawesi Utara	Tagonggong	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
125	Sulawesi Utara	Mogama	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
126	Sulawesi Utara	Monibi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
127	SULTENG	Padungku	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
128	Gorontalo	Lohidu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
129	Gorontalo	Tahuli	Tradisi dan Ekspresi Lisan
130	Gorontalo	Dayango/ Wumbungo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
131	Gorontalo	Langga	Seni Pertunjukan
132	Gorontalo	Binthe Biluhuta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
133	Maluku	Sasi Maluku	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
134	Maluku	Pukul Sapu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
135	Maluku	Belang Banda	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
136	Maluku	Sopi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
137	Maluku	Baileo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
138	Maluku Utara	Seri Godoba	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
139	Maluku Utara	Tide-Tide	Seni Pertunjukan
140	Maluku Utara	Kukuhana	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
141	Papua	Wor Biak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
142	Papua	Elha	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
143	Papua	Aker	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
144	Papua	Honai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
145	Papua	Khombow	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
146	Papua	Terfo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
147	Papua Barat	Banondit (Rumput Kebar)	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
148	Papua Barat	Bihim (Tari Tumbutana)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
149	Papua Barat	Mod Aki Aksa Igkojei	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
150	Papua Barat	Igya Ser Hanjop	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta

b. Dukungan pemerintah untuk pelestarian budaya yang diinisiasi pelaku budaya

1. Revitalisasi dan pembangunan museum

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Revitalisasi Museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat kunjungan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemendikbud melalui Direktorat Kebudayaan telah melakukan revitalisasi dan pembangunan museum di Indonesia. Pada tahun 2016, Kemendikbud berhasil

membangun tujuh Museum dan merevitalisasi 20 Museum. Berikut 20 Museum yang telah dilakukan revitalisasi dan tujuh museum yang dibangun pada tahun 2016.

No	Museum yang Direvitalisasi	Museum Yang di Bangun
1.	Museum Mpu Purwa, Kota Malang	Museum PDRI, Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Museum Panji, Kabupaten Malang	Museum Kerinci, Kabupaten Kerinci
3.	Museum Provinsi Aceh	Museum Subak, Kabupaten Gianyar
4.	Museum Kota Tanjung Pinang	Museum Coelacant Ark, Manado
5.	Museum Budaya Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur	Museum Natuna, Kabupaten Natuna
6.	Museum Goedang Ransoem, Kota Sawah Lunto	Museum Angklung, Provinsi Jawa Barat
7.	Museum Provinsi Kalimantan Selatan	Museum Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang
8.	Museum Ranggawarsita, Provinsi Jawa Tengah	
9.	Museum Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	
10.	Museum Provinsi Bengkulu	
11.	Museum Provinsi Sulawesi Tengah	
12.	Museum Provinsi Riau	
13.	Museum Baanjuang Sumatera Barat	
14.	Museum Kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan	
15.	Museum Provinsi Gorontalo	
16.	Museum Provinsi Maluku	
17.	Museum Provinsi Jambi	
18.	Museum Kota Makassar	
19.	Museum 1000 Moko, Kabupaten Alor	
20.	Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur	

2. Revitalisasi cagar budaya

Revitalisasi cagar budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yag tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Pelaksanaan revitalisasi cagar budaya tahun 2015 telah melibatkan para pelaku dan pengelola budaya dengan hasil revitalisasi: Situs Samudera Pasai Aceh Utara; Situs Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat; dan Bangunan Cagar Budaya Eks Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan, Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud telah melakukan revitalisasi cagar budaya sebanyak 6 cagar budaya/situs. Berikut daftar cagar budaya/situs yang berhasil direvitalisasi

No	Cagar Budaya/Situs
1	Rumah Cagar Budaya Linggar Jati, Kabupaten Kuningan
2	Situs Samudera Pasai, Kabupaten Aceh Utara
3	Keraton Kanoman, Cirebon
4	Keraton Kadriah, Kota Pontianak
5	Keraton Tayan, Kabupaten Sanggau
6	Keraton Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

3. Revitalisasi taman budaya

Sejak tahun 2012-2015, Revitalisasi Taman Budaya telah tersusun sebanyak 25 materplan dan DED, penguatan program, dan penguatan kualitas sumber daya manusia, dan revitalisasi fisik terhadap 6 Taman Budaya yaitu: Taman Budaya Banda Aceh; Taman Budaya Lampung; Taman Budaya Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Taman Budaya Jawa Barat; Taman Budaya Jawa Tengah; dan Taman Budaya Nusa Tenggara Barat.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud berhasil melakukan revitalisasi fisik terhadap tiga taman budaya, yaitu:

1. Taman Budaya Sulawesi Tenggara;
2. Taman Budaya Kalimantan Tengah; dan
3. Taman Budaya Kalimantan Selatan.

4. Bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan

Pemberian bantuan pemerintah untuk pelestarian budaya diharapkan mampu memfasilitasi para pelaku budaya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas karya budaya dan pelaku dalam melestarikan budaya. Pemberian bantuan pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam program ini, yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat yang melakukan pelestarian budaya baik di dunia pendidikan maupun komunitas budaya meliputi: Keraton, Komunitas Adat, Lembaga Adat, Desa Adat, Sanggar, Organisasi Penghayat Kepercayaan, serta Lembaga Keagamaan.

Realisasi pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2016 sebagai berikut.

1) Fasilitasi Komunitas Budaya sebanyak 348 komunitas budaya;
2) Fasilitasi Alat Kesenian di Sekolah sebanyak 200 sekolah;
3) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film sebanyak 4 sekolah;
4) Fasilitasi Desa Adat sebanyak 139 desa adat.

c. Sinergi kerjasama pelaku budaya, masyarakat, pemerintah, sebagai satu kesatuan ekosistem kebudayaan

1. *World Culture Forum 2016*

World Culture Forum (WCF) 2016 sebagai forum budaya global di bidang kebudayaan telah sukses dilaksanakan pada tanggal 10-14 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali. Forum ini merupakan upaya untuk menjadikan kebudayaan sebagai penyokong dan pendorong pembangunan berkelanjutan. Forum dunia yang telah berlangsung dan menghasilkan Deklarasi Bali tersebut dihadiri oleh 1808 orang peserta, yang berasal dari 63 negara di seluruh dunia. Presiden Indonesia ke-5 turut hadir menjadi pembicara kunci dalam puncak pelaksanaan WCF 2016. Selain itu Irina Bokova dan Ban Ki Moon juga turut mengirimkan rekaman video untuk menyampaikan pesan akan pentingnya kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan,

Tema World Culture Forum 2016 adalah **"Kebudayaan Untuk Dunia yang Berkelanjutan dan Inklusif"**, dengan tujuan untuk menciptakan ruang untuk berdiskusi, berdebat dan beradu ide, dan untuk melakukannya dengan rekomendasi:

- Jalur baru untuk mencari budaya sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan
- Kerangka etika untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan
- Saling memahami dan menghargai antar budaya yang berbeda
- Indikator budaya kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur pembangunan berkelanjutan
- Membangun masyarakat lokal yang harmonis.

WCF tahun 2016 menghasilkan deklarasi Bali. Berikut isi deklarasi Bali tersebut.

BALI DECLARATION

We, the participants of the 2nd World Culture Forum 2016: Culture for an Inclusive Sustainable Planet in Bali, from 10 to 14 October 2016, initiated by the Government of the Republic of Indonesia, commit to strengthen our efforts in mainstreaming culture as both a driver and an enabler of sustainable development,

Recognizing the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions adopted on 20 October 2005 in Paris, France, and appreciating UNESCO's mission to promote culture as a driver and an enabler for peace and sustainable development;

Recalling the Bali Promise, which was welcomed in the UN General Assembly Resolution 68/223 on 20 December 2013 and highlighted the power of culture as the fourth dimension of sustainable development;

Reiterating the World Culture Forum as a permanent platform for promoting the role of culture in sustainable development and the safeguarding of the cultural and linguistic diversity of humanity;

Welcoming the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals adopted by World's Leaders in 2015, and recalling that the 2030 Agenda acknowledges the natural and cultural diversity of the world and recognizes that all cultures, civilizations and communities can contribute to, and are crucial enablers of, sustainable development;

Emphasizing that culture-based policies yield better, sustainable, inclusive and equitable development outcomes;

Reaffirming the targets of the Sustainable Development Goals to promote a culture of peace and non-violence, appreciate cultural diversity and culture's contribution to sustainable development, promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products, and protect and safeguard the world's cultural and natural heritage, and reiterating that all Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible;

Recognizing the important contribution of cultural resources, both tangible and intangible, to the attainment of healthy lives and people's well-being, inclusive and equitable quality education, gender equality, sustainable management of natural resources, sustainable consumption and production patterns, and inclusive societies;

Also recognizing the need to continue mainstreaming and integrating the cultural realm into every aspect of sustainable development, in order to synchronize the rhythm of development with that of society;

Underlining, in this regard, the need to ensure a more visible and effective integration of culture into economic, social and environmental development policies and strategies at all levels;

Stressing the need to strengthen the means of implementation and revitalizing the global partnership for effective attainment of the Sustainable Development Goals;

We urge UNESCO member states and the wider civil society to commit themselves to:

1. *Support the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and work towards a more visible and effective integration and mainstreaming of culture into economic, social and environmental development policies and strategies at all levels;*
2. *Promote a culture of peace in our communities that will foster just and inclusive societies, who cherish and value cultural diversity and heritage as well as their protection;*
3. *Taking note of the results of the six symposia/themes of the World Culture Forum, the following actions are recommended to be undertaken:*
    a. *Strengthen the role of culture in the sustainable development paradigm and reaffirm that culture is a crucial enabler and driver for the implementation of the 2030 Agenda and to emphasize the role of local communities and culture to redress the imbalanced relationship of ecosystem services with human demands;*
    b. *Strengthen the interconnectedness of the relevant stakeholders with the planet for creating common best practices for inclusive sustainable development;*
    c. *Develop collective pathways to ensure the transmission of culture to the next generations for cultural continuity;*
    d. *Implement an economic and social development planning approach which is culture-sensitive to overcome the challenges of contemporary urban life;*
    e. *Respect and accommodate traditional knowledge and local wisdom that promote harmonious relationship of human, nature, and spirituality;*
    f. *Position human beings and nature at the center of a bottom-up public policy formulation and implementation;*

g. *Provide universal access to and the ethical use of digital technology to empower civil society and enable digital activism;*

h. *Allow the dynamism of the people in urban communities to flourish and the richness of urban cultural heritage to develop towards the advancement of the right to peaceful, equitable, inclusive and sustainable cities;*

i. *Expand and strengthen the culture of peace and understanding based on dialogue and human rights values;*

j. *Foster dialogue and building bridges to connect cultural divides and strengthen shared understanding between peoples;*

k. *Strengthen the promotion of the values of multiculturalism, peaceful coexistence, and cohabitation;*

l. *Incorporate cultural and ethical water values and traditional knowledge into integrated water resources management from the source to all users in order to resolve socio-political challenges of water management around the world;*

4. *Strengthen the role of youth in economic, cultural and socio-political and environmental activism in order to promote shared understanding and bring positive social transformations and equality toward sustainable development, including to, but not limited to, the promotion of creative economy;*

5. *Recognize the role of international intergovernmental and non-governmental organizations to develop a knowledge network of activities to empower constituencies in advancing progressive culture for inclusive sustainable development;*

6. *Develop a strategy that invest in people and empower the role of local community as well as formulate an action plan to keep the connection between each World Culture Forum Meetings, building upon process of dialog between governments and civil societies to optimize culture as a power in addressing world problem;*

7. *Work closely with all stakeholders to ensure all sustainable development plans under the 2030 Agenda are responsive to cultural contexts to yield better, sustainable and equitable outcomes for an inclusive planet;*

8. *Support UNESCO in its effort to strengthen the protection of cultural heritage including from war and conflict;*

9. *Strengthen the means of implementation and emphasizing the need to mainstream the role of culture into the indicators and reporting mechanisms of the Sustainable Development Goals at all levels.*

10. *Work to develop a Framework for Action to be presented for adoption and launched at a meeting to be organized alongside the 39th Session of the General Conference of UNESCO in October 2017 with a view to strengthen the follow up and review mechanism under Agenda 2030.*

In conjunction with Earth Hour, we encourage the observance of an hour of reflection of our respective cultures defining who we are on this inclusive sustainable planet.

We hope that the World Culture Forum will remain as a permanent platform for promoting the role of culture in the planning and evaluation of development and the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Bali, Indonesia, 13 October 2016

---

2. *International Youth Forum 2016*

Berdampingan dengan pelaksanaan WCF 2016, diselenggarakan juga *International Youth Forum* (IYF) pada tanggal 9–14 Oktober 2016 di empat lokasi desa yang berbeda, yakni di Desa Bongan, Desa Panglipuran, Desa Tenganan, dan

Desa Bedulu. IYF diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari 103 pemuda Indonesia dan 47 pemuda Internasional. 150 pemuda yang terdapat dalam IYF 2016 di empat lokasi desa tersebut mendiskusikan empat topik yang berbeda, yakni: (a) Pemuda dan Keterikatan dengan Publik, (b) Pemuda dan Bentuk-Bentuk Identitas Baru, (c) Aktivisme: Dekonstruksi Konsep Pemuda Sebagai Ancaman, (d) Pemuda dan Permasalahan Ketimpangan Sosio-Ekonomi. IYF 2016 menghasilkan "Rencana Aksi Pemuda" yang juga dibacakan pada saat penutupan WCF 2016.

3. Pekan Budaya Indonesia 2016

Dengan mengusung tema **"Dari Pinggiran Merajut Budaya Nasional"**, Pekan Budaya Indonesia 2016 melibatkan seluruh pelaku budaya yang tergabung dalam berbagai komunitas adat dan seni, termasuk seni jalanan yang belum banyak dikenal masyarakat luas.

Pekan Budaya Indonesia 2016 dibuka pada 1 September 2016 di Pendopo Kabupaten Malang dengan sebuah pementasan bertema "Babad Singasari" yang diperankan oleh Direktur Jenderal Kebudayan, Gubernur Jawa Timur, Walikota Malang, Direktur Kesenian, dan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Pementasan tersebut diakhiri dengan pemukulan gong oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai simbol resmi telah dibukanya Pekan Budaya Indonesia 2016.

Rangkaian kegiatan Pekan Budaya Indonesia 2016 dilaksanakan di tiga lokasi utama, yaitu Pendopo Kabupaten Malang, Taman Krida Budaya, dan Universitas Negeri Malang. Terdapat berbagai macam kegiatan yang disuguhkan dalam Pekan Budaya Indonesia 2016, meliputi pameran, workshop, diskusi budaya, seminar, bedah buku, aneka lomba, dan berbagai pentas. Bioskop Keliling juga turut meramaikan rangkaian kegiatan Pekan Budaya Indonesia 2016 di Alun-Alun Kota Malang, Alun-Alun Kota Batu, dan Lapangan Singosari.

Pekan Budaya Indonesia diharapkan dapat menjadi ruang ekspresi yang menyenangkan bagi masyarakat luas untuk menghargai dan memahami keragaman budaya Indonesia. Di samping itu, rangkaian kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan menumbuhkan sikap tenggang rasa seluruh masyarakat terhadap keragaman warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

SS5 Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis ketiga yaitu peningkatan akses PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKMAS, dan pendidikan anak usia berkebutuhan khusus (T3).

Ketercapaian meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota didukung melalui ketercapaian lima indikator kinerja, yaitu:

1. APK PAUD usia 3-6 tahun
2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi
4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun
5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

Kecenderungan akses masyarakat terhadap pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat terus meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari APK PAUD yang terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat APK PAUD tahun 2016 mencapai 72,16%, meningkat dari tahun 2015 yang baru mencapai 70,1%.

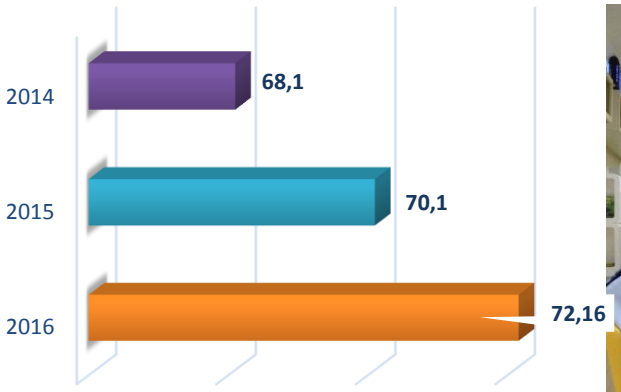

Tren APK PAUD 3-6 Tahun 2014-2016

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi. kabupaten. dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	**70,1%**	**72,10%**	**72,16%**	**100,08**
	2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	**43%**	**46%**	**46%**	**100**
	3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	**2.269**	**2.621**	**2.824**	**107,75**
	4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,39%	**96,43%**	**96,56%**	**100,13**
	5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM kursus dan pelatihan atau UPTD)	7,50%	**9%**	**8,6%**	**96**

IKSS 5.1 "APK PAUD usia 3-6 tahun" untuk tahun 2016 telah mencapai 72,16%. APK sebesar tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,10%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka persentase capaian indikator tersebut mencapai 100,08%. Pada tahun 2016, secara absolut jumlah anak usia 3-6 yang terlayani mencapai 13.875.431 anak dari total 19.229.800 anak usia 3-6 tahun.

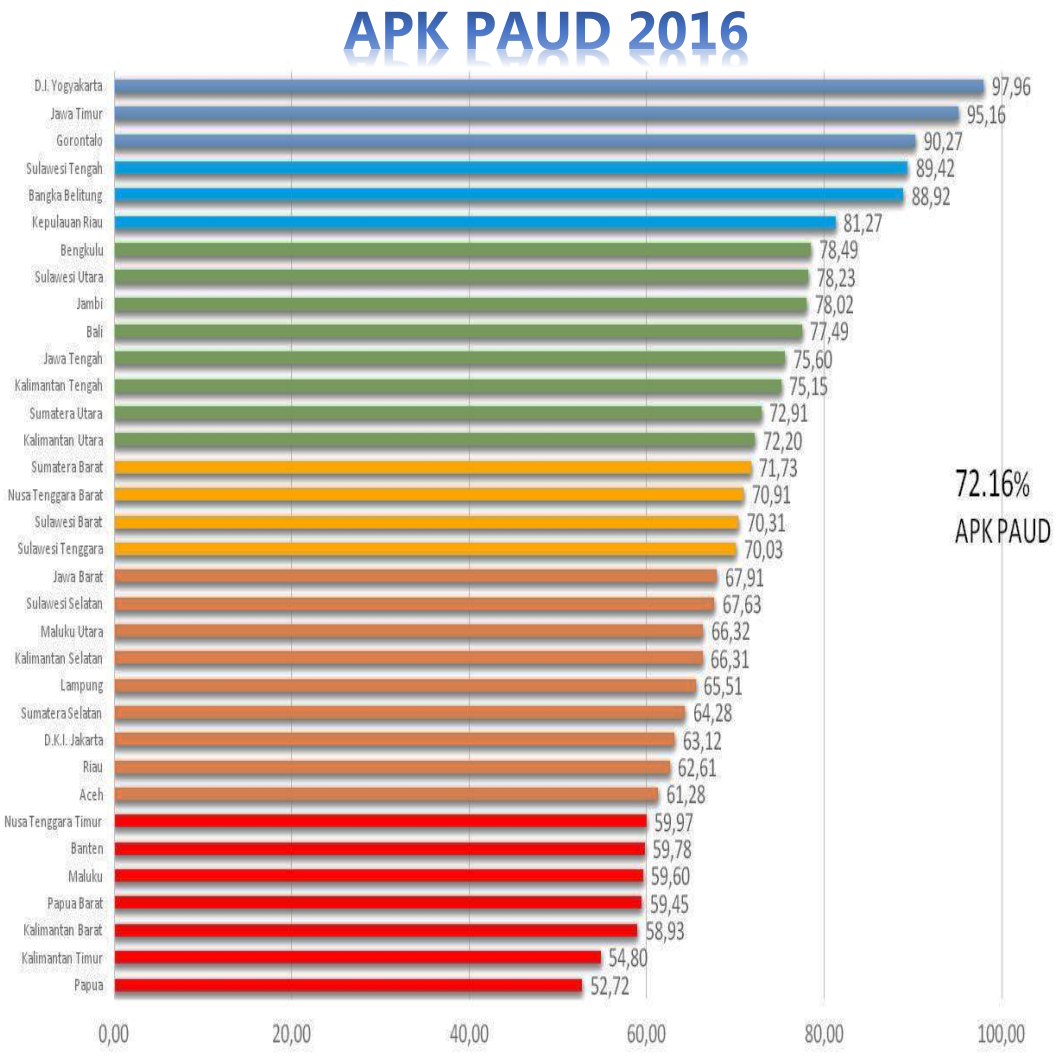

Jika dibandingkan dengan APK tahun 2015 yang sebesar 70,1%, APK tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,06%.

Ketercapaian APK PAUD tidak terlepas dari beberapa program yang dijalankan Kemendikbud. Program yang dijalankan tersebut diantaranya pemberian BOP PAUD dan penyelenggaraan PAUD di daerah 3T dan pembentukan PAUD baru. Diharapkan dengan pemberian BOP dapat meningkatkan jumlah anak yang terlayani dan meningkatkan mutu pembelajaran PAUD.

Pada tahun 2016, Kemendikbud memberikan BOP PAUD kepada 190.161 lembaga, dari total 193.455 lembaga PAUD atau 98%. Dengan pemberian BOP diharapkan dapat meningkatkan jumlah anak yang terlayani dan meningkatkan mutu pembelajaran PAUD.

Selain BOP, kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian APK PAUD adalah penyelenggaraan PAUD di daerah 3T sebanyak 15 lembaga. Sedangkan untuk jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk pada tahun 2016 telah terealisasi 340 lembaga PAUD rintisan baru dari target 350 lembaga PAUD rintisan baru dengan persentase 99%. Pembentukan PAUD rintisan baru diutamakan dibentuk di desa yang belum memiliki PAUD.

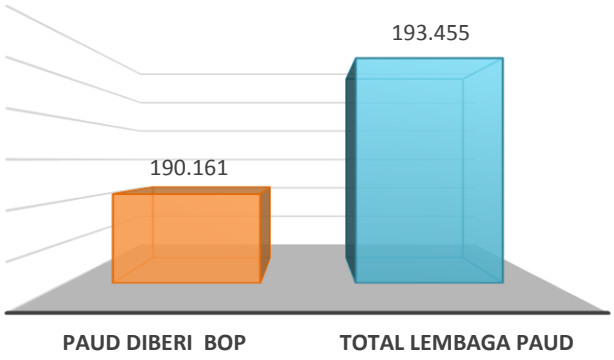

Langkah antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan target APK adalah program perluasan akses PAUD, dengan lebih mengandalkan kemampuan swadaya masyarakat dan pemerintahan daerah, serta adanya program Wajib PAUD Pra SD yang telah dimulai di 5 kab/kota yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, Kota Jambi, Kota Yogjakarta.

Peran serta Bunda PAUD, masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam sosialisasi program PAUD di daerah. Untuk itu peran Bunda PAUD akan terus ditingkatkan ke depannya. Selain melalui bunda PAUD, sosialisasi program PAUD juga dilakukan melalui online. Untuk itu, pada tahun 2016 telah diresmikan pula Anggun PAUD sebagai website resmi untuk sosialisasi program PAUD dan peningkatan mutu PAUD.

IKSS 5.2 "kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif" pada tahun 2016 telah mencapai 46%. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 46%. Dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, sebanyak 236 Kabupaten/Kota telah memiliki lembaga PAUD terpadu Pembina Holistik Integratif.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar

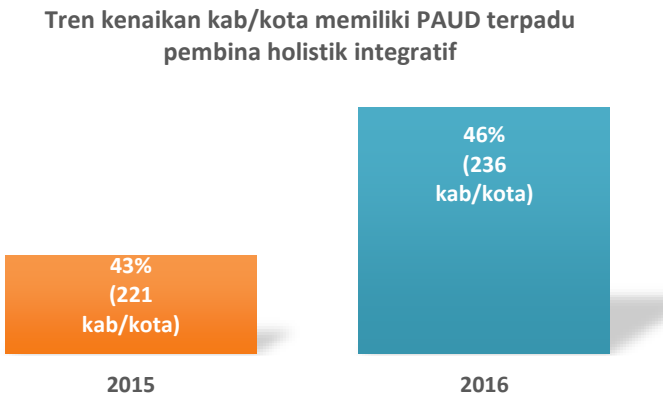

43%, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3%.

Masing-masing kab/kota saat ini telah memiliki Taman Kanak-kanak Pembina tingkat kab/kota, ditambah dengan adanya lembaga PAUD Percontohan yang tersebar di 34 provinsi sebanyak 167 lembaga pada akhir tahun 2015, kemudian ditambah 10 lembaga PAUD percontohan pada tahun 2016 dengan teknis pembinaan langsung dari Pusat, dalam bentuk pelatihan kurikulum 2013, pendampingan dan magang bagi pendidik di lembaga yang telah ditunjuk untuk menjadi PAUD percontohan.

Tantangan dalam pencapaian indikator ini salah satunya adalah memastikan lembaga PAUD tersebut bisa bertahan dan semakin berkembang dalam pelaksanaan PAUD yang holistik integratif serta memberikan imbas kepada lembaga PAUD lain di sekitarnya.

IKSS 5.3 "Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi" sampai dengan tahun 2016 jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi telah mencapai 2.824 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 2.621 lembaga maka capaian tersebut telah melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 107,75%.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang telah berstandar nasional mencapai 2.824 lembaga, yang terdiri dari 2.049 akreditasi program dan 775 akreditasi satuan (lembaga). Dibanding tahun 2015 capaian ini mengalami penurunan sebanyak 555 lembaga. Berikut data lima tahun terakhir program dan satuan LKP yang telah berhasil terakreditasi.

Program/ Satuan		2012		2013		2014		2015		2016		Total Program/ Satuan Terakreditasi 2012 - 2016	Total Lembaga Terakreditasi
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi		
LKP	Program	186	16	229	26	135	17	700	115	555	46	2.049	**2.824**
	Satuan	29	6	57	5	58	11					775	

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Sedangkan Kemendikbud dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas hanya bertugas mempersiapkan dan membantu lembaga agar lembaga tersebut memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Ditjen PAUD dan Dikmas terus melakukan penambahan lembaga yang berstandar nasional. Untuk tahun 2016 ada 3.018 lembaga yang dipersiapkan memenuhi standar nasional.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) LKP, antara lain dilakukan melalui penilaian dan evaluasi kinerja terhadap LKP. Evaluasi kinerja LKP dilakukan melalui dua tahapan yaitu verifikasi dan validasi. Lewat dua tahapan ini didapat lembaga yang sesuai untuk memenuhi standar nasional.

Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (BAN-PAUD dan PNF) selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap LKP, sedangkan peran penyiapan lembaga menuju proses akreditasi merupakan tugas dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di bawah naungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) LKP antara lain dilakukan melalui evaluasi kinerja terhadap LKP. Evaluasi kinerja LKP dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

a. Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikator dari 8 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas yaitu BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat, PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan, BP-PAUD dan Dikmas NTB dan BP-PAUD dan Dikmas Papua dengan melakukan penilaian secara daring di LKP sasaran. Saat ini telah dilaksanakan verifikasi lapangan ke 750 LKP. Satu lembaga dinyatakan gugur dalam proses evaluasi kinerja LKP karena pada saat dilakukan verifikasi lapangan ternyata lembaga tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu belum berdiri selama 3 tahun, sehingga jumlah keseluruhan LKP yang dievaluasi kinerja menjadi 749 lembaga.
b. Validasi adalah tahapan untuk meninjau ulang hasil pelaksanaan verifikasi lapangan. Validasi ini dilakukan oleh tim evaluasi kinerja yang dibentuk oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pelaksanaan validasi di 8 UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan rasio jumlah LKP yang sudah diverifikasi. Saat ini telah dilakukan validasi terhadap 749 LKP pada 8 UPT tersebut.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 555 lembaga. Tercatat untuk tahun 2015 sendiri ada sebanyak 2.269 lembaga yang terakreditasi.

IKSS 5.4 "Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun" pada tahun 2016 realisasinya telah mencapai 96,56% dari target yang ditetapkan sebesar 96,43%. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 100,13%.

Untuk meningkatkan angka melek aksara, Kemendikbud memberikan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar, Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Indonesia Membaca, Pengadaan Buku untuk TBM dan Festival Literasi.

Sampai dengan akhir tahun 2016, ini telah disalurkan untuk kepada sebanyak 64.280 orang utuk pembelajaran. Dengan telah dibelajarkannya 64,280 orang tersebut, maka jumlah penduduk buta aksara pada tahun berkurang menjadi 5.769.270 orang atau 3,44% dari sebanyak 5.833.550 orang atau 3,61% buta aksara pada tahun 2015.

Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis,

berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.

Capaian angka penurunan tuna aksara sebanyak 64.280 orang diperoleh melalui dukungan APBN saja. Apabila ditambah dengan dukungan APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, angka niraksara penduduk dewasa tersebut diperkirakan menjadi lebih kecil.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung melalui strategi pelaksanaan *sistem block*, yaitu memberikan afirmasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif, seperti di Papua dan Papua Barat.

Selain pemberian BOP keaksaraan dasar, untuk meningkatkan melek aksara, Kemendikbud juga melaksanakan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Dengan GLN ini diharapkan menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosisten pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk terus menjaga penduduk usia dewasa tetap melek aksara, Kemendikbud melalui Gerakan Indonesia Membaca, mencanangkan Kampung Literasi pada 20 kabupaten/kota kantong tuna aksara. Kampung literasi diharapkan akan meingkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdayanya.

Seorang ibu sedang berpartisipasi dalam program Gerakan Indonesia Membaca (GIM), GIM merupakan program dalam rangka menuntaskan angka buta akrasa

Selain itu, untuk untuk menstimulus gemar membaca, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas melakukan pengadaan buku khususnya untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Pada tahun 2016 telah disalurkan sebanyak 50.976 eksemplar buku ke 310 TBM di 40 Kabupaten/Kota.

Festival literasi diselenggarakan Kemendikbud untuk mendukung penuntasan buta aksara. Selama bulan literasi yaitu bulan Oktober, lebih dari 2000 orang telah mengikuti festival literasi dari 34 provinsi yang terdiri dari siswa siswi sekolah formal, pegiat literasi, pengurus dan anggota TBM, serta fasilitator dan komunitas literasi non-TBM.

Upaya di tahun 2016 ini tetap menemui beberapa hambatan dan kendala, di mana berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan

anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri *(self blocking)*, yang pada akhirnya mengakibatkan: (1) pengurangan target anggaran dalam DIPA; (2) penyaluran bantuan ke lembaga menjadi lebih sedikit dari target yang ditetapkan dan (3) terdapat satu kabupaten (Kab. Asmat) yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 tercapai adalah: (1) minta pengarahan dari pimpinan; (2) memaksimalkan target satuan walaupun dengan anggaran yang tersedia; (3) mengutamakan daerah 3T dalam penyaluran bantuan meskipun dana terbatas, (4) mengalihkan kuota bagi kabupaten yang tidak bisa mengakses bantuan akan dialihkan ke tempat lain.

IKSS 5.5 "Kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)" untuk tahun 2016 capaian kinerjanya belum mencapai target. Pada tahun 2016, kab/kota yang memiliki satu lembaga masyarakat rujukan ditargetkan sebanyak 9% atau 46 Kab/kota dari jumlah keseluruhan kab/kota sebanyak 514. Dari target tersebut, sampai dengan tahun 2016 ada sebanyak 8,6% atau sebanyak 44 kab/kota yang telah memiliki minimal satu lembaga masyarakat rujukan.

Untuk tahun 2016 sendiri, Kemendikbud melalui Ditjen PAUD telah merealisasikan lima kabupaten/kota untuk memiliki 1 lembaga masyarakat rujukan. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan melaksanakan program peningkatan kapasitas SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan. Program ini merupakan program pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan program kursus dan pelatihan pada satuan pendidikan SKB. Dengan program tersebut, SKB tersebut dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan/atau masyarakat yang berminat akan menyelenggarakan kursus dan pelatihan. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan berikut:

a. Identifikasi potensi dan visitasi peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan;
b. Orientasi teknis peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan;
c. Pendampingan teknis peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan.

Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan artinya mewujudkan satuan pendidikan SKB sebagai pengelola layanan kursus dan pelatihan yang bermutu, meliputi rehabilitasi prasarana penyelenggaraan kursus dan pelatihan (mencakup perencanaan, pengawasan, rehabilitasi fisik dan pengelola teknis), pengadaan sarana pembelajaran kursus dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi SDM dan penyelenggaraan kursus kepada masyarakat sesuai keterampilan yang diajukan. Untuk mencapai hal ini, program dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rehabilitasi prasarana: alokasi bantuan digulirkan secara bertahap: pertama sebesar 70%, sisanya sebesar 30% apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%;

b. Pengadaan sarana pembelajaran: dilakukan melalui proses lelang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Pemda setempat;
c. Peningkatan kompetensi SDM: dilakukan melalui dua jenis kegiatan yaitu peningkatan kompetensi SDM SKB (mengirim pamong belajar dan/atau tenaga kependidikan ke lembaga pelatihan atau Perguruan Tinggi atau menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang onstruktur dari lembaga pelatihan atau Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan) dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kepada masyarakat sebanyak minimal 30 peserta didik sesuai jenis keterampilan yang diusulkan.

Sasaran program ini adalah SKB di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat menjadi satuan pendidikan nonformal, memiliki kepala kantor dan karyawan/pamong belajar definitif, memiliki unit pengelola keuangan (sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, pemberi perintah pembayaran, dan melaksanakan pembayaran), memiliki tanah/gedung yang diperuntukkan bagi SKB, dan tidak sedang menerima bantuan program sejenis yang bersumber dari APBN. Berikut lima SKB yang diberi bantuan kursus dan pelatihan untuk menjadi SKB rujukan di tahun 2016.

No.	Kab/Kota	Nama Lembaga	Jenis Keterampilan	Dana (Rp)
1	Kab. Ngada	SPNF Negeri SKB Ngada*	Aplikasi Perkantoran/ Menjahit	333.000.000
2	Kab. Ketapang	SPNF Negeri SKB Ketapang	Tata Rias Pengantin, Tata Rias Rambut, Menjahit	259.000.000
3	Kab. Kendal	SPNF Negeri SKB Kendal	Tata Rias Pengantin, Tata Rias Rambut, Menjahit	200.000.000
4	Kab. Bantul	SPNF Negeri SKB Bantul*	Otomotif, Komputer, Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, Hantaran	365.000.000
5	Kab. Ponorogo	SPNF Negeri SKB Ponorogo*	Komputer, Desain Grafis, Video Editing, Tata Busana, Bordir, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, Kerajinan pernak-pernik aksesoris Reog	343.000.000
			Jumlah	**1.500.000.000**

*Keterangan: * = SKB yang melakukan rehabilitasi prasarana.*

Tidak tecapainya target yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan *selfblocking* anggaran yang menyebabkan target turun menjadi 5 kabupaten/kota. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada anggaran setelah adanya *selfblocking,* tapi dengan tetap mempertahankan target sasaran program yang sudah ditetapkan sebanyak 5 SKB di 5 kabupaten/kota. Strategi yang digunakan adalah dengan mengurangi satuan biaya bantuan dari maksimal Rp715.000.000 menjadi maksimal setengahnya saja. Hal ini terjadi karena tidak seluruh sasaran mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehabilitasi prasarana.

SS6 Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis ketiga yaitu peningkatan akses PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKMAS, dan pendidikan anak usia berkebutuhan khusus (T3).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dan menengah didukung melalui ketercapaian sembilan indikator kinerja, yaitu:

a. APK SD/SDLB/Paket A
b. APM SD/SDLB
c. APK SMP/SMPLB/Paket B
d. APM SMP/SMPLB
e. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C
f. APM SMA/SMK/SMLB
g. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
h. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
i. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Sampai dengan tahun 2016 (tahun kedua renstra 2015-2019), capaian angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah telah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya angka partisipasi untuk usia pendidikan dasar dan menengah serta rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun.

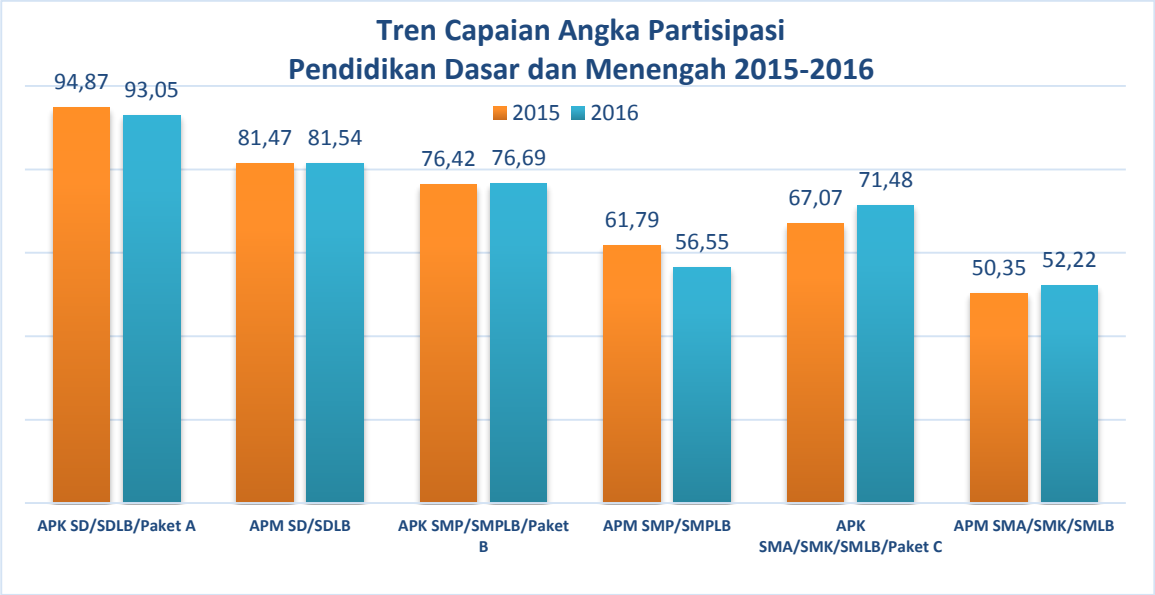

** belum termasuk paket A di dalam perhitungannya*

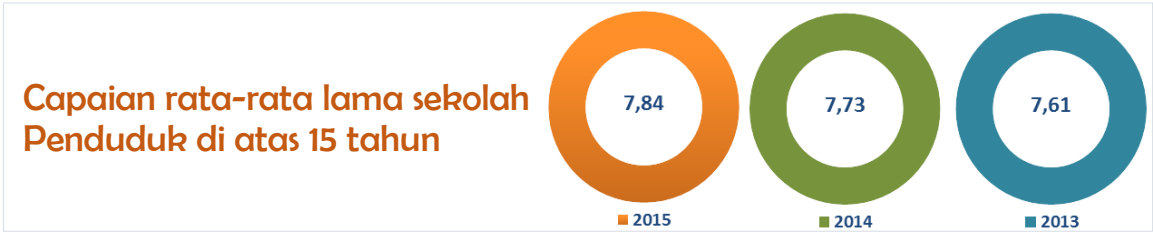

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	**94,87%**	97,85%	**93,5%**	**95**
	2. APM SD/SDLB	**81,47%**	82,51%	**81,54%**	**99**
	3. APK SMP/SMPLB/Paket B	**76,42%**	81,89%	**76,69%**	**94**
	4. APM SMP/SMPLB	**61,79%**	72,69%	**56,55%**	**78**
	5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	**67,07%**	79,31%	**71,48%**	**90**
	6. APM SMA/SMK/SMLB	**50,35%**	66,87%	**52,22%**	**78**
	7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	**0,54**	0,87	**0,91**	**105**
	8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	**0,55**	0,55	**0,59**	**107**
	9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	**7,73 tahun**	8,3 tahun	**7,84 tahun**	**94**

IKSS 6.1 "APK SD/SDLB/Paket A" capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2016 APK SD/SDLB/Paket A yang ditargetkan sebesar 97,85%, namun dari target tersebut baru berhasil terealisasi sebesar 93,05%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 95%. Jika ditambahkan dengan jumlah siswa MI dan Salafiyah ULA maka pada tahun 2016 APK SD sederajat sebesar 106,44%. APK SD sederajat terbesar berada di provinsi Papua Barat yaitu sebesar 115,04% sedangkan APK SD sederajat terkecil berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 88,75%.

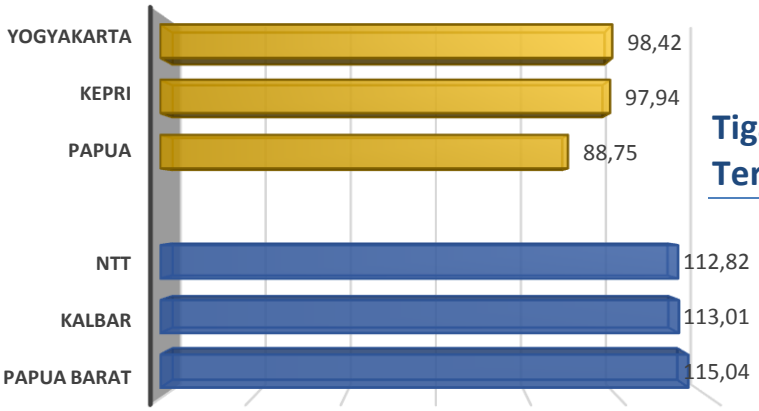

Tiga Provinsi dengan APK SD Tertinggi dan Terendah

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.574.800 orang. Sedangkan jumlah siswa SD sebanyak 25.618.078 siswa; SDLB 28.784 siswa; dan Paket A sebanyak 12.640 siswa. Dibandingkan dengan data tahun 2015, terjadi penurunan jumlah

siswa SD sebanyak 266.941 siswa, siswa SDLB sebanyak 51.150 siswa. Sedangkan untuk siswa Paket A mengalami kenaikan sebanyak 1.057 siswa.

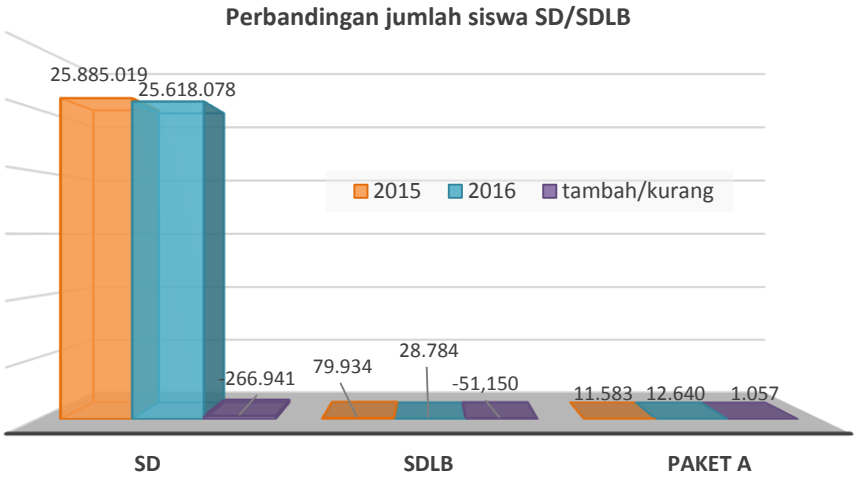

Dibandingkan dengan capaian tahun 2015, APK SD/SDLB/Paket A capaian tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,81%. Penurunan dimungkinkan adanya penambahan jumlah penduduk usia 7-12 yang pada tahun 2015 sebanyak 27.381.500 bertambah menjadi 27.574.800 pada tahun 2016. Selain itu, penurunan diakibatkan adanya penurunan jumlah siswa SD sebanyak 266.941, dan SDLB sebanyak 51.150 siswa.

Beberapa hal yang menyebabkan APK SD/SDLB/Paket A belum mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya antara lain:

1. meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kecenderungan tersebut tampak dari peningkatan jumlah siswa MI dari 3.566.358 peserta didik pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 3.671.812 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017;
2. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk menyekolahkan anaknya;
3. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi);
4. kurangnya layanan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T;
5. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
6. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah.

Upaya lebih lanjut yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan APK adalah melalui peningkatan peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menjalin komunikasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan industri, serta melibatkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.

IKSS 6.2 "APM SD/SDLB" pada tahun 2016 baru mencapai 81,54% dari target yang ditetapkan sebesar 82,51%, dengan persentase capaian sebesar 99%. APM sebesar 81,54% tersebut belum termasuk MI, Salafiyah ULA dan Paket A. Jika ditambah dengan MI, Salafiyah ULA dan Paket maka APM SD sederajat menjadi sebesar 93,73%. Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan APM SD sederajat tertinggi yaitu sebesar 96,15%; sedangkan provinsi Papua menjadi provinsi dengan APM SD sederajat terendah yaitu sebesar 72,30%.

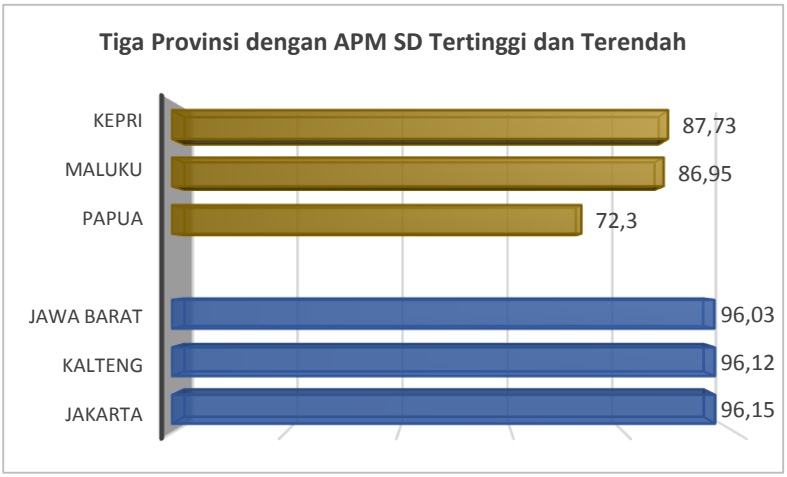

Beberapa hal yang menyebabkan APM SD/SDLB belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MI umur 7-12 tahun dari 3.236.426 peserta didik pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 3.348.305 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017;
2. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk menyekolahkan anaknya;
3. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi);
4. kurangnya layanan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T;
5. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
6. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.574.800 orang. Sedangkan jumlah siswa SD usia 7-12 tahun sebanyak 22.475.742 siswa; SDLB usia 7-12 sebanyak 8.146 siswa; dan Paket A usia 7-12 sebanyak 4.098 siswa. Dibandingkan dengan

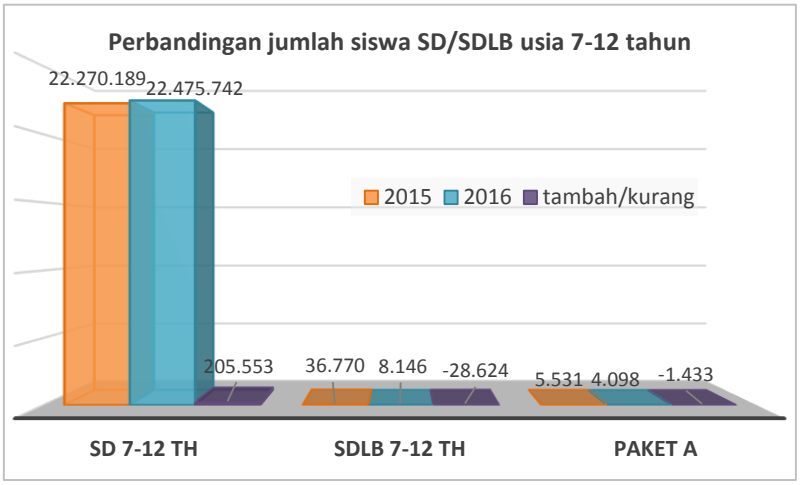

data tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah siswa SD usia 7-12 tahun sebanyak 205.553 siswa, sedangkan untuk siswa SDLB dan paket A mengalami penurunan masing-masing 28.624 siswa dan 1.433 siswa. Dibandingkan dengan APM SD/SDLB tahun 2015, APM SD/SDLB tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,07%.

Adanya peningkatan APM SD/SDLB/Paket A, merupakan hasil dari telah dilaksanakan beberapan program diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian BOS, pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan Sekolah SD, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa di luar negeri (SILN), dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi.

Untuk SD, pada tahun 2016 telah disalurkan bantuan melalui KIP kepada 10.927.652 siswa SD. Adapun sekolah SD yang berhasil dibangun sebanyak 24 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 1.141 ruang, ruang kelas yang berhasil direhabilitasi sebanyak 4.811 ruang, pemberian beasiswa bakat dan prestasi kepada sebanyak 1.870 siswa, dan bantuan siswa pendidikan dasar di luar negeri sebanyak 3.890 siswa.

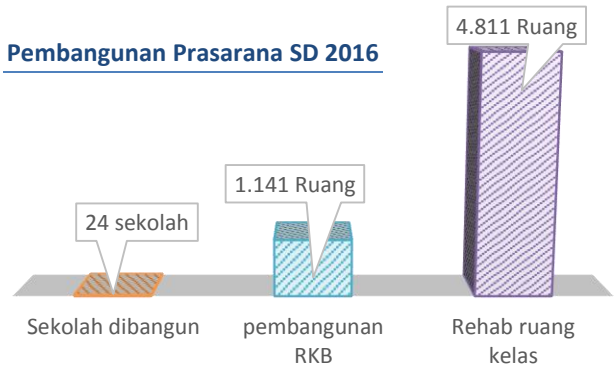

Dengan dilaksanakannya program pemberian kartu indonesia pintar tersebut, Kemendkbud berhasil menurunkan angkat putus sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Berikut tren penurunan jumlah siswa angka putus sekolah dasar selama tiga tahun terakhir.

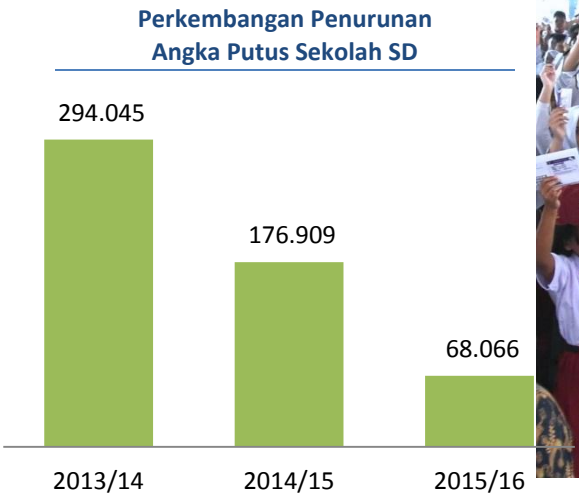

Presiden Joko Widodo melakukan pembagian KIP kepada siswa SD,SMP dan SM. Dengan KIP diharapkan akan menurunkan angka putus sekolah

Untuk tahun 2016 angka putus sekolah SD sebesar 0,26%. Beberapa kondisi yang menyebabkan siswa putus sekolah antara lain. Pada lingkungan perkotaan angka putus sekolah dipicu oleh tingkat kemiskinan. Pada beberapa kasus anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki status kependudukan tetap mengalami kesulitan bagi anak-anaknya untuk memperoleh akses pendidikan formal. Hal ini mendorong munculnya anak-anak jalanan. pengemis dan gelandangan.

Selain itu, angka putus sekolah siswa sekolah dasar untuk daerah pedalaman, daerah pertanian atau perkebunan didorong oleh budaya membantu ekonomi rumah tangga dengan bekerja menjadi buruh tani ataupun buruh perkebunan.

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarjinalisasi agar bersekolah kembali. Program pemberian kartu Indonesia Pintar juga diberikan kepada anak yatim piatu. Program retrieval merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah. Pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran dana PIP yang kontroversi. Sementara siswa yang benar-benar dari keluarga miskin tidak menerima bantuan sedang siswa yang berasal dari keluarga dengan konsdisi ekonomi lebih baik mendapat bantuan.

Dalam upaya meningkatkan APM ini pada beberapa daerah mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada rencana pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru yang terkendala oleh keterbatasan lahan, sehingga menghambat upaya pembangunan USB dan RKB. Permasalahan tersebut akan selalu menjadi kendala bilamana tidak dilakukan upaya untuk mengantisipasinya. Selain itu munculnya beberapa kasus tuntutan atau gugatan dari ahli waris terhadap lahan sekolah yang sudah berdiri maupun yang sedang dalam proses pembangunan.

Untuk memperkuat status kepemilikan lahan oleh pemerintah/sekolah, setiap perolehan lahan untuk fasilitas pendidikan hendaknya sesegera mungkin disahkan kepemilikannya oleh pejabat yang berwewenang dan dilakukan pencatatan atas nama Barang Milik Negara (BMN). Sementara itu untuk mengantisipasi keterbatasan lahan dalam penambahan ruang kelas baru atau unit sekolah baru diperlukan regulasi teknis tentang tata cara pembangunan sekolah/ruang kelas bertingkat.

IKSS 6.3 "APK SMP/SMPLB/Paket B" untuk tahun 2016 realisasinya baru mencapai 76,69% dari target yang ditetapkan 81,89%, dengan persentase capaian sebesar 94%. APK sebesar 76.69% tersebut belum termasuk MTs dan Salafiyah Wustha. Jika ditambah dengan jumlah siswa MTs dan Salafiyah Wustha maka APK SMP sederajat menjadi sebesar 101,05%.

Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan APK SMP tertinggi yaitu sebesar 108,78%, sedangkan provinsi Papua menjadi Provinsi dengan APK SMP terendah yaitu 64,93%.

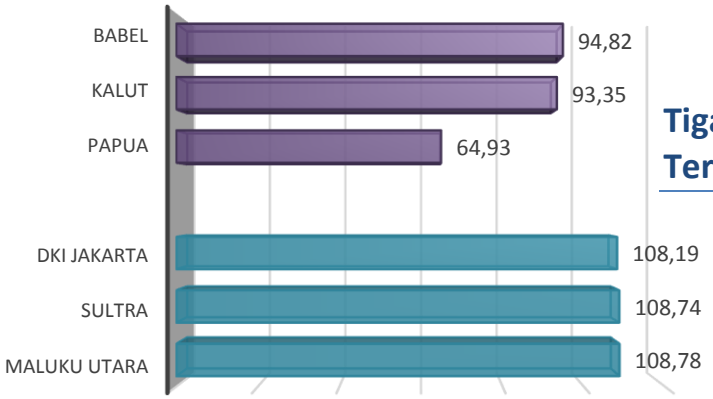

Tiga Provinsi dengan APK SMP Tertinggi dan Terendah

Beberapa hal yang menyebabkan APK SMP/SMPLB/Paket B belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MTs. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MTs dari 3.159.756 peserta didik pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 3.198.624 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017;
2. masih banyaknya siswa SD usia 13-15 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SD. Tercatat ada 422.082 siswa SD yang mengulang pada tahun ajaran 2015/2016.
3. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke SMP. Tercatat sebanyak 956.013 anak lulusan SD tidak melanjutkan sekolah SMP;
4. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke SMP/setara sangat jauh (tidak semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3 s.d. 8 km);
5. kurangnya layanan pendidikan SMP yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T;
6. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
7. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah.

Untuk tahun 2016 jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 13.425.000 anak. Sedangkan jumlah siswa SMP sebanyak 10.145.416 siswa, SMPLB sebanyak 26.592 siswa, dan paket B sebanyak 123.160 siswa. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah siswa SMP

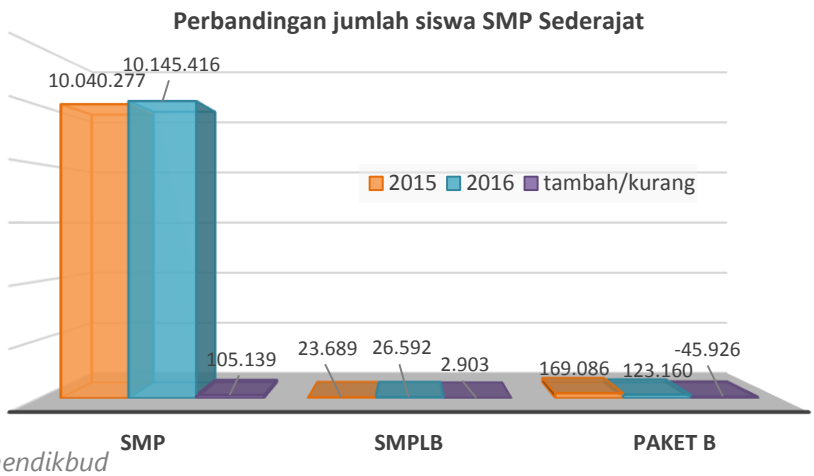

untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 105.139 siswa, SMPLB sebanyak 2.903 siswa. Sedangkan siswa Paket B mengalami penurunan sebanyak 45.926 siswa.

Jika Dibandingkan dengan tahun 2015, APK SMP/SMPLB/Paket B mengalami peningkatan sebesar 0,27%. Pencapaian APK SMP/SMPLB yang berada di bawah target ini jika dilihat dari karakter daerah disebabkan oleh rendahnya daya dukung infrastruktur yang dapat mendorong akses pendidikan bagi penduduk setempat. lemahnya pengarusutamaan wajib belajar pendidikan dasar dan belum terbentuknya pola masyarakat pembelajar.

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarjinalisasi agar bersekolah kembali. Program retrieval merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah. Pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran dana PIP yang kontroversi. Sementara siswa yang benar-benar dari keluarga miskin tidak menerima bantuan sedang siswa yang berasal dari keluarga dengan konsdisi ekonomi lebih baik mendapat bantuan.

IKSS 6.4 "APM SMP/SMPLB" tingkat realisasi untuk tahun 2016 baru mencapai 56,55% dari target yang ditetapkan sebesar 72,69%, dengan persentase capaian sebesar 75%. APM sebesar 56,66% tersebut belum termasuk Paket B, MTs dan Salafiyah Wustha. Jika ditambahkan dengan Paket B, MTs dan Salafiyah Wustha maka APM SMP sederajat mencapai 76,29%. Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan APM SMP sederajat tertinggi yaitu sebesar 84,79%, sedangkan APM SMP sederajat terendah berada di provinsi Papua yaitu sebesar 42,86%.

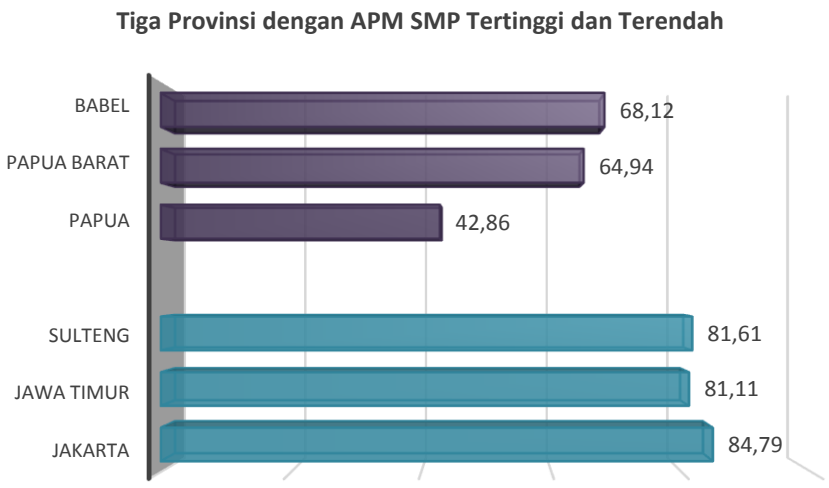

Beberapa hal yang menyebabkan APK SMP/SMPLB/Paket B belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MTs. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MTs usia 13-15 dari 2.480.300 peserta didik pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 2.567.101 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017;

2. masih banyaknya siswa SD usia 13-15 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SD. Tercatat ada 422.082 siswa SD yang mengulang pada tahun ajaran 2015/2016.
3. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke SMP. Tercatat sebanyak 956.013 anak lulusan SD tidak melanjutkan sekolah SMP;
4. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke SMP/setara sangat jauh (tidak semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3 s.d. 8 km);
5. kurangnya layanan pendidikan SMP yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T;
6. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
7. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah.

Untuk tahun 2016 jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 13.425.000 anak. Sedangkan jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun sebanyak 7.590.420 siswa, SMPLB usia 13-15 tahun sebanyak 1.240 siswa, dan Paket B usia 13-15 sebanyak 54.980 siswa.

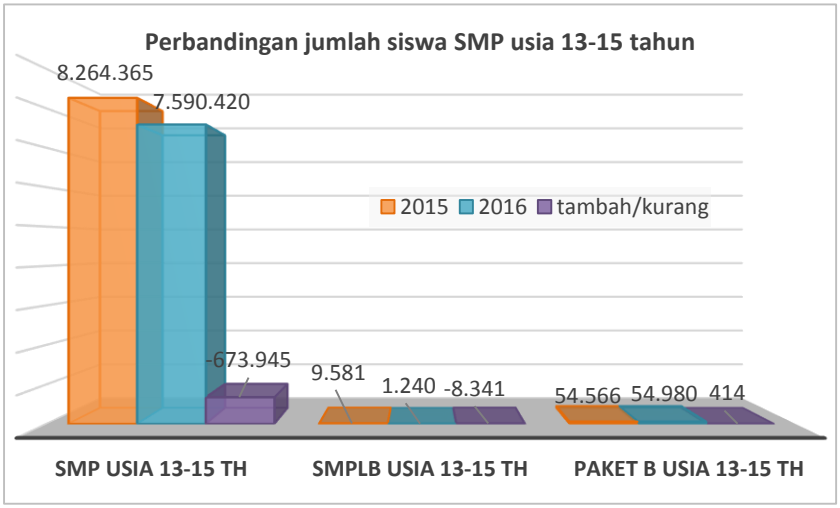

Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 673.945 siswa, SMPLB usia 13-15 tahun sebanyak 8.341 siswa. Untuk siswa Paket B sendiri meningkat sebanyak 414 siswa. Dibandingkan dengan tahun 2015, APK SMP/SMPLB/Paket B mengalami penurunan sebesar 5,24%.

Untuk mendukung peningkatan APK maupun APM SMP sederajat, Kemendikbud telah dilaksanakan beberapan program diantaranya pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian BOS, pembangunan ruang kelas baru SMP, pembangunan Sekolah SMP, sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi.

Untuk SMP, pada tahun 2016 telah disalurkan bantuan melalui KIP kepada 4.797.073 siswa SMP. Adapun sekolah SMP yang berhasil dibangun sebanyak 196 sekolah, sekolah berasrama yang dibangun 25 sekolah, Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun sebanyak 109 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 2.807 ruang, ruang kelas yang berhasil direhabilitasi sebanyak 5.350 ruang, pemberian beasiswa bakat dan prestasi kepada siswa SMP sebanyak 2.976 siswa.

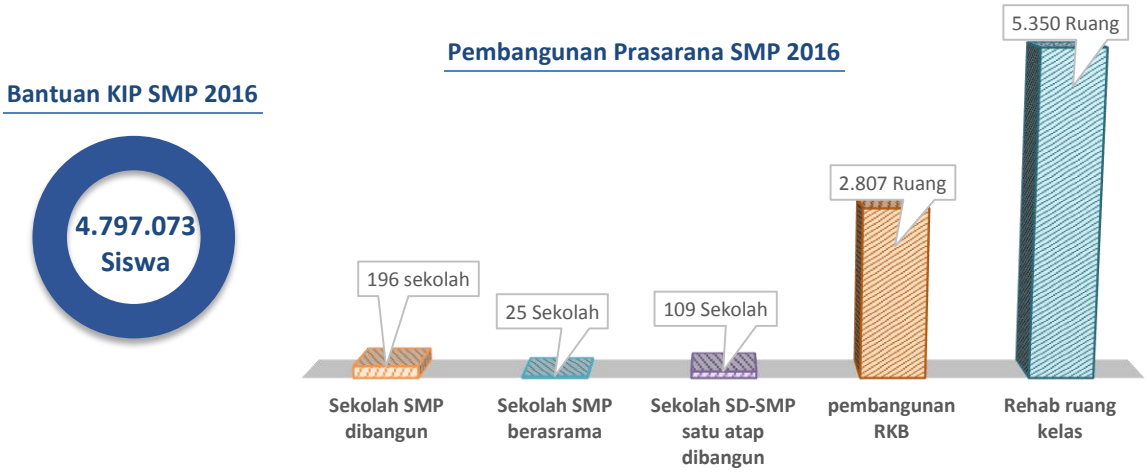

Dengan dilaksanakannya program pemberian kartu indonesia pintar tersebut, Kemendkbud berhasil menurunkan angkat putus sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Untuk tahun 2016 sendiri angka putus sekolah SMP sebesar 0,50. Berikut tren penurunan jumlah siswa angka putus sekolah menengah pertama selama tiga tahun terakhir.

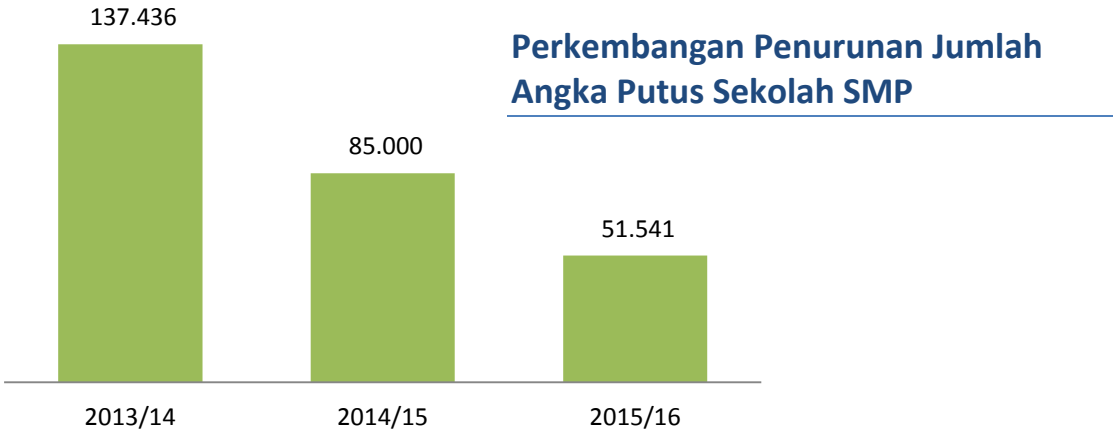

Permasalahan lain yang dihadapi dalam meningkatkan APM SMP/SMPLB antara lain karena rencana pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru yang terkendala oleh keterbatasan lahan, sehingga menghambat upaya pembangunan USB dan RKB. Permasalahan tersebut akan selalu menjadi kendala bilamana tidak dilakukan upaya untuk mengantisipasinya. Selain itu munculnya beberapa kasus tuntutan atau gugatan dari ahli waris terhadap lahan sekolah yang sudah berdiri maupun yang sedang dalam proses pembangunan.

Untuk memperkuat status kepemilikan lahan oleh pemerintah/sekolah, setiap perolehan lahan untuk fasilitas pendidikan hendaknya sesegera mungkin disahkan kepemilikannya oleh pejabat yang berwewenang dan dilakukan pencatatan atas nama Barang Milik Negara (BMN). Sementara itu untuk mengantisipasi keterbatasan lahan dalam

penambahan ruang kelas baru atau unit sekolah baru diperlukan regulasi teknis tentang tata cara pembangunan sekolah/ruang kelas bertingkat.

IKSS 6.5 "APK SMA/SMK/SMLB/Paket C" pada tahun 2016 realisasinya baru mencapai 71,48% dari target yang ditetapkan sebesar 79,31%, dengan persentase capaian sebesar 90%. APK sebesar 71,48% tersebut belum termasuk Madrasah Aliyah (MA) dan Salafiayah Ulya, jika ditambah dengan jumlah siswa MA Salafiyah Ulya maka APK Sekolah Menengah sederajat menjadi sebesar 81,95%. Provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan APK Sekolah Menengah sederajat tertinggi yaitu sebesar 98,80%, sedangkan APK Sekolah Menengah sederajat terendah berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 49,31%.

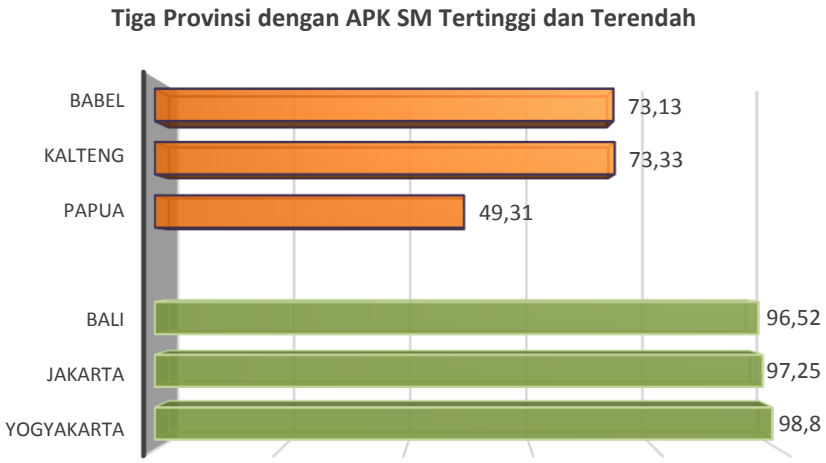

Beberapa hal yang menyebabkan APK SMA/SMK/SMLB/Paket C belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan anaknya di jenjang sekolah menengah;
2. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah menengah. Tercatat sebanyak 99.406 anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK;
3. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke SMA/setara sangat jauh;
4. kurangnya layanan pendidikan SMA/SMK yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat;
5. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
6. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah;
7. masih banyaknya siswa SMP usia 16-18 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SMP. Tercatat ada 24.815 siswa SMP yang mengulang pada tahun ajaran 2015/2016;
8. masih banyaknya orang tua yang memilih pesantren sebagai tempat pendidikan selain pendidikan jalur formal setelah lulus SMP.

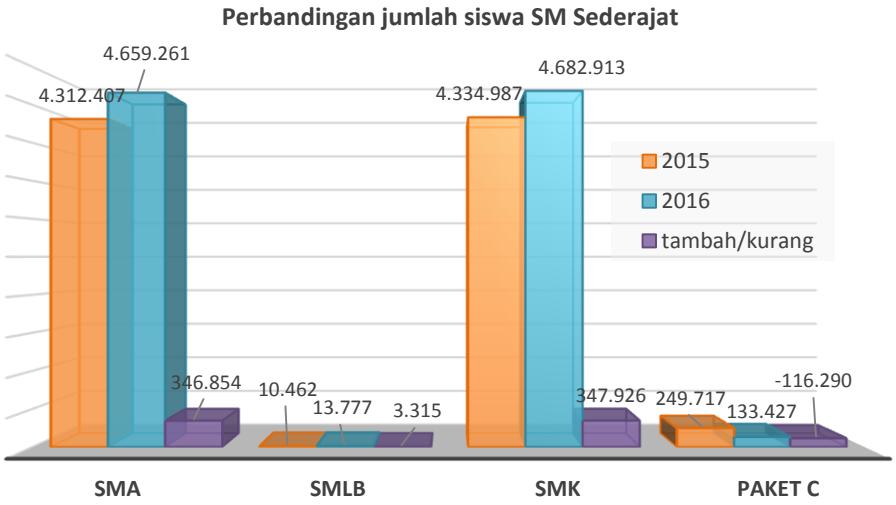

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 13.276.000 anak. Jumlah siswa SMA sebanyak 4.659.261 siswa, SMLB sebanyak 13.777 siswa, SMK sebanyak 4.682.913 siswa, dan Paket C sebanyak 133.427 siswa.

Dibandingkan tahun 2015, APK SM sederajat untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,41%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016, siswa SMA mengalami peningkatan sebanyak 346.854 siswa, siswa SMLB mengalami kenaikan sebanyak 3.315 siswa, siswa SMK mengalami kenaikan sebanyak 347.926 siswa, dan Paket C mengalami penurunan sebanyak 116.290 siswa.

IKSS 6.6 "APM SMA/SMK/SMLB" untuk tahun 2016 realisasinya baru mencapai 52,22%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 66,87%, dengan persentase capaian sebesar 78%. APM sebesar 52,22% tersebut belum termasuk siswa dari MA, Paket C dan Salafiyah Ulya. Jika digabungkan dengan jumlah siswa MA, Paket C dan Salafiyah Ulya maka APM SM Sederajat menjadi 61,20%. Provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan APM SM sederajat tertinggi yaitu sebesar 76.48%, sedangkan APM SM sederajat terendah berada Provinsi Papua yaitu sebesar 33,24%.

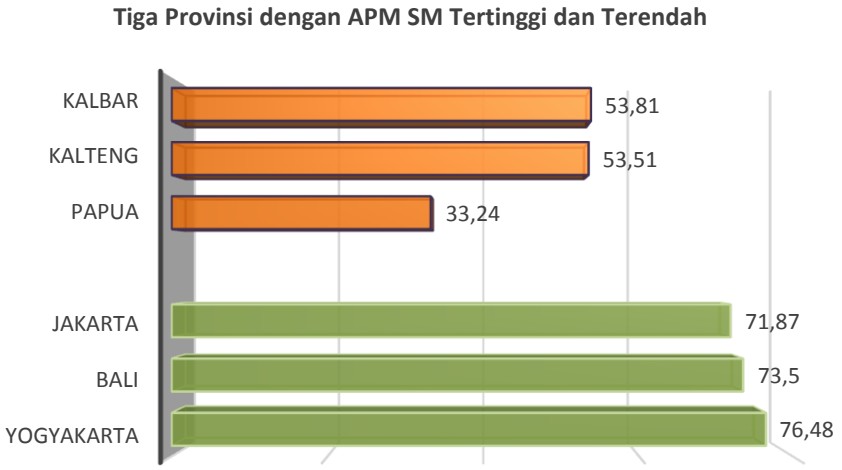

Sama seperti APK, beberapa hal yang menyebabkan APM SMA/SMK/SMLB belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan anaknya di jenjang sekolah menengah;
2. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah menengah. Tercatat sebanyak 99.406 anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK;
3. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke SMA/setara sangat jauh;
4. kurangnya layanan pendidikan SMA/SMK yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat;
5. faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
6. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah;
7. masih banyaknya siswa SMP usia 16-18 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SMP. Tercatat ada 24.815 siswa SMP yang mengulang pada tahun ajaran 2015/2016;
8. masih banyaknya orang tua yang memilih pesantren sebagai tempat pendidikan selain pendidikan jalur formal setelah lulus SMP.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 13.276.000 anak. Jumlah siswa untuk SMA usia 16-18 tahun sebanyak 3.389.846 siswa, SMLB usia 16-18 tahun sebanyak 48 siswa, SMK usia 16-18 tahun sebanyak 3.542.921 siswa, dan Paket C usia 16-18 tahun sebanyak 48.985 siswa.

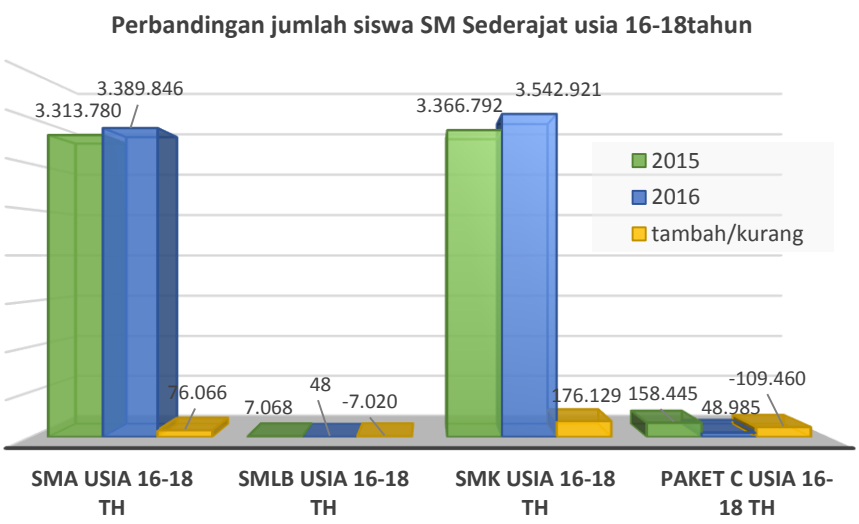

Dibandingkan tahun 2015, APM SM sederajat untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,87%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016, siswa SMA mengalami peningkatan sebanyak 76.066 siswa, siswa SMK mengalami kenaikan sebanyak 176.129 siswa, sedangkan SLB usia 16-18 tahun mengalami penurunan sebanyak 7.020 siswa, Paket C mengalami penurunan sebanyak 109.460 siswa.

Untuk mendukung peningkatan APK maupun APM SM sederajat, Kemendikbud telah dilaksanakan beberapan program diantaranya pemberian bantuan melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian BOS, pembangunan ruang kelas baru SM, pembangunan

Sekolah SM, sekolah berasrama, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa.

Untuk SMA, pada tahun 2016 telah disalurkan bantuan melalui KIP kepada 1.655.080 siswa SMA. Adapun sekolah SMA yang berhasil dibangun sebanyak 204 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 4.187 ruang, ruang pembelajaran yang berhasil direhabilitasi sebanyak 1.600 ruang, pemberian beasiswa SMA sebanyak 2.091 siswa.

Sedangkan SMK, pada tahun 2016 telah disalurkan bantuan melalui KIP kepada 1.842.537 siswa SMK. Adapun sekolah SMK yang berhasil dibangun sebanyak 216 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 5.478 ruang, ruang pembelajaran yang berhasil direhabilitasi sebanyak 999 ruang, pemberian beasiswa SMK sebanyak 23.525 siswa.

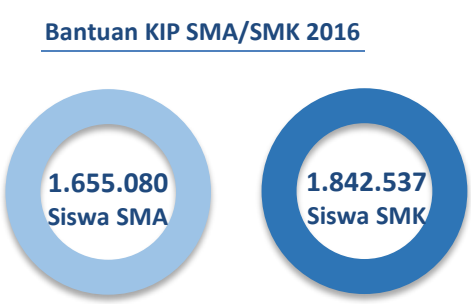

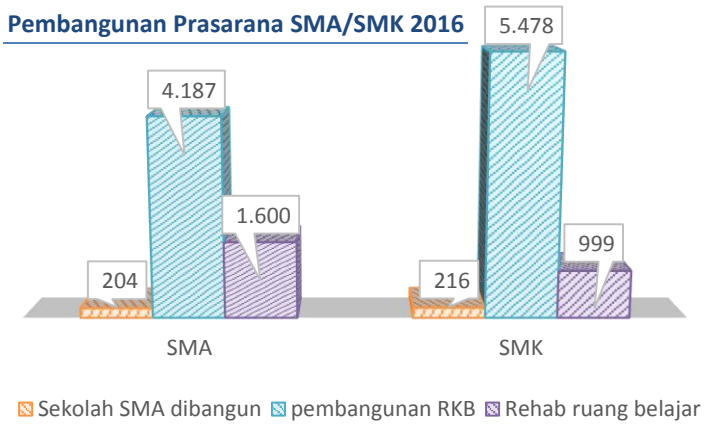

Dengan dilaksanakannya program pemberian kartu Indonesia pintar tersebut, Kemendkbud berhasil menurunkan angkat putus sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah menengah. Berikut tren penurunan jumlah siswa angka putus sekolah menengah pertama selama tiga tahun terakhir.

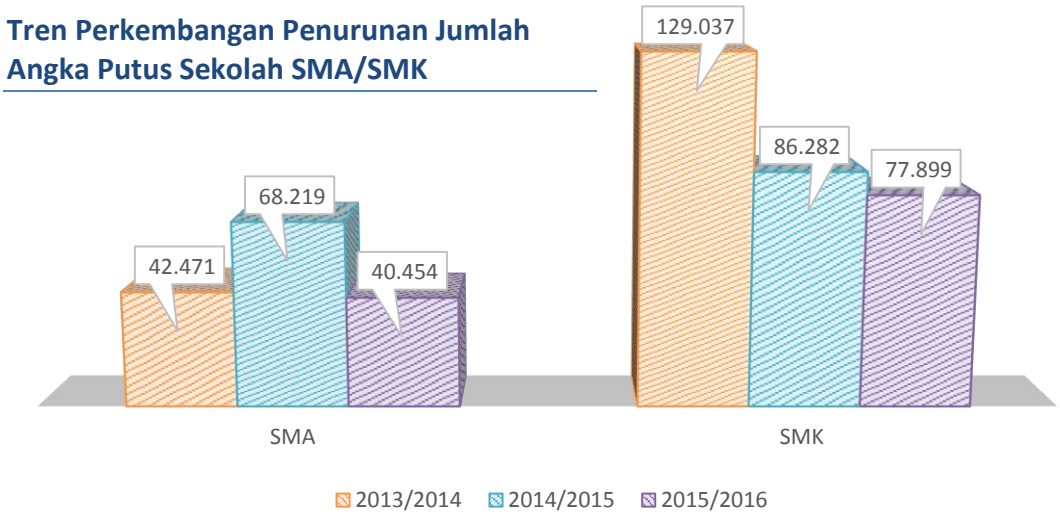

Untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah, Kemendikbud terus berupaya meningkatkan jumlah sekolah untuk setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2016

baru sebanyak 90,75% Kecamatan di Indonesia yang memiliki minimal satu sekolah menengah.

Program pemberian KIP menjadi salah satu andalan untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Selain itu PIP diharapkan dapat mencegah peserta didik dari putus sekolah (DO) dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penerima PIP diprioritaskan kepada:

- Peserta didik pemegang KIP
- Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah teregister di DAPODIK;
- Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan KKS;
- Siswa yatim/piatu/yatim piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial lainnya;
- Siwa terdampak bencana alam;
- Siswa drop out yang diharapkan bisa kembali bersekolah;
- Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terancam putus sekolah;
- Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konfilk, dari keluarga terpidana, berada di lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan PIP adalah sulitnya mendapatkan data calon penerima sasaran PIP. Untuk menentukan sasaran calon penerima PIP ini data disusun oleh Kementerian Sosial karena melibatkan data siswa maupun data penduduk usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah. Untuk itu diperlukan adanya penyelasaran antara data siswa dari DAPODIK dengan data dari Kemensos.

Perlu adanya sinergi yang lebih intensif antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendataan siswa dan penduduk sehingga permasalahan data PIP ini dapat teratasi dan juga ketepatan sasaran siswa penerima PIP ini bisa lebih akurat.

Untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah, pemerintah terus mendorong peningkatan angka melanjutkan lulusan siswa SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK. Pada tahun 2016, angka melanjutkan SMP/SMPLB/MTs ke sekolah SMA/SMK baru sebesar 96,96%.

Di beberapa daerah, terutama pada penduduk jenis kelamin perempuan masih terdapat kecenderungan menikah dini sehingga setelah menyelesaikan pendidikan SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini berpengaruh terhadap upaya meningkatkan angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB. Upaya meningkatkan jumlah lulusan SMP dan sederajat agar dapat melanjutkan pendidikan menengah dapat dilakukan melalui upaya persuasif terutama pada daerah yang masih memiliki tradisi memberikan akses kepada pekerja anak. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi wajib belajar dua belas tahun. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat orang tua agar putra-putrinya berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

IKSS 6.7 "Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya" pada tahun 2016 telah mencapai 0,91%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,87% maka capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 105%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 0,54, capaian tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,37 menjadi 0,91 di tahun 2016. Dengan adanya kenaikan rasio ini menandakan adanya peningkatan akses bagi siswa dari penduduk miskin untuk dapat mengakses pendidikan jenjang SMP/SMPLB.

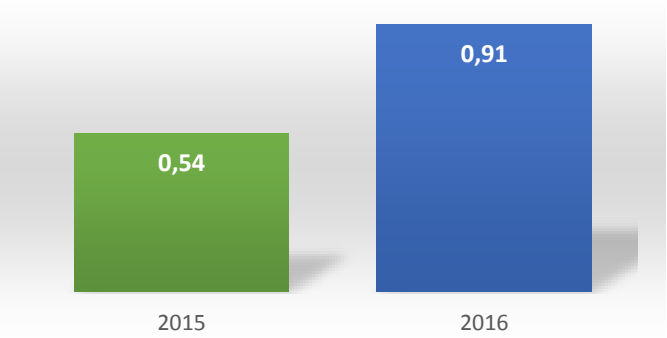

Tren Perkembangan Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

Ketercapaian rasio APK SMP/SMPK tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program yang dijalankan pemerintah yaitu program pemberian BOS dan Program Indonesia Pintar. Untuk tahun 2016 sendiri telah diberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin melalui KIP sebanyak 4.797.073 siswa. Sedangkan pemberian BOS diberikan kepada seluruh siswa SMP. Sedangkan untuk siswa SDLB/SMPLB/SMLB/SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS sebanyak 2.412 siswa.

IKSS 6.8 "Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya" pada tahun 2016 baru mencapai 0,59. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0,55, maka realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 107%.

Capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.04 dari capaian tahun 2015. Tercatat capaian tahun 2015 sebesar 0,55. Dengan peningkatan rasio ini menandakan adanya peningkatan akses bagi siswa dari penduduk miskin untuk dapat mengakses pendidikan jenjang pendidikan menengah.

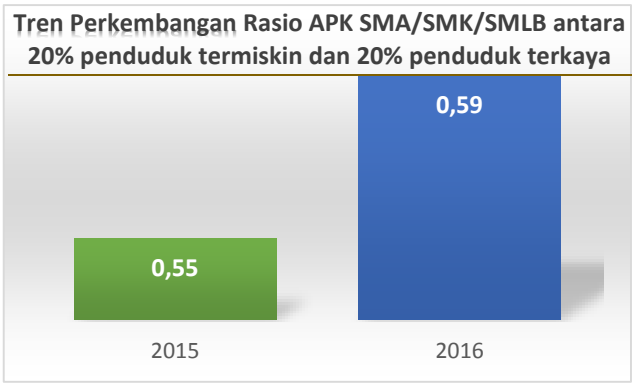

Pemerintah terus berupa meningkatkan rasio angka partisipasi jenjang pendidikan menengah. Untuk itu pemerintah menjalankan program pemberian bantuan BOS untuk jenjang pendidikan menengah dan Program Indonesia Pintar. Dengan dijalankannya program ini diharapkan akan meningkatkan

akses bagi penduduk miskin untuk meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud berhasil memberikan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sebanyak 1.655.080 sisiwa SMA; 1.842.537 siswa SMK; pemberian BOS kepada 4.316.579 siswa SMA; 4.682.381 siswa SMK.

IKSS 6.9 "Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun" untuk tahun 2016 realisasinya belum dapat diketahui. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran rata-rata lama sekolah dan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah sebesar 7,84 tahun. Angka tersebut meningkat 0,11 dari tahun 2014 (7,73 tahun). Untuk IPM Indonesia sendiri pada tahun 2015 mencapai 69,55 dengan status 'sedang'.

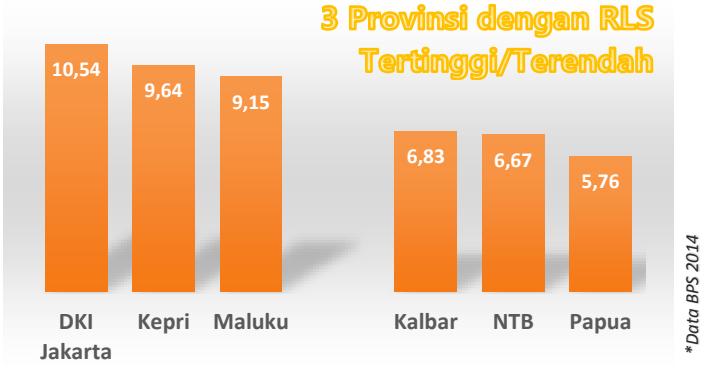

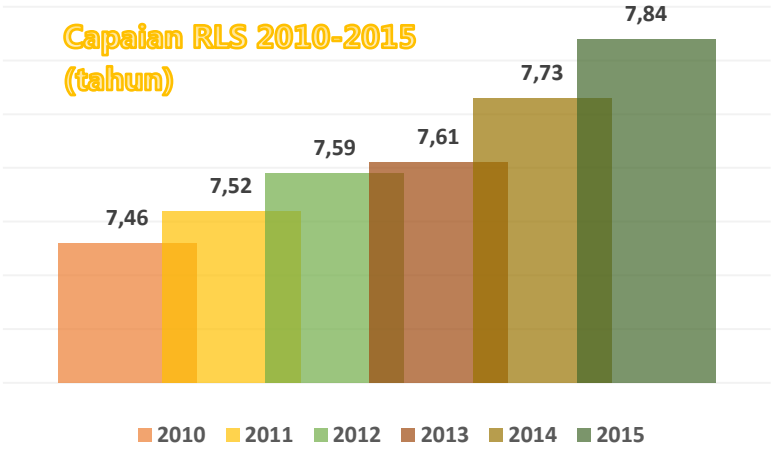

Kemendikbud berupaya terus meningkatkan rata-rata lama sekolah usia di atas 15 tahun, hal ini agar IPM dapat meningkat. Upaya yang dilakukan adalah dengan menekan angka putus sekolah baik di sekolah SD maupun sekolah SMP, dan meningkatkan angka melanjutkan siswa. Untuk tahun 2016, angka putus sekolah SD sebesar 0,26% dari target yang ditetapkan sebesar 1,01%. Sedangkan angka melanjutkan siswa SD/MI ke sekolah SMP sebesar 81,68%. Untuk jenjang sekolah SMP, angka putus sekolah sebesar 0,50% dari target yang ditetapkan sebesar 1,11%. Sedangkan untuk angka melanjutkan SMP/MTs ke sekolah menengah sebesar 96,96%.

SS7 Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keempat yaitu peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter (T4).

Ketercapaian sasaran strategis ini didukung melalui ketercapaian dua indikator kinerja, yaitu:

a. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi;
b. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI

Mutu pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan mutu tersebut terlihat dari makin banyaknya lembaga PAUD yang memperoleh akreditasi dan program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	**5.791**	36.051	**13.707**	**38**
	2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	**66%**	55,30%	**67%**	**121**

IKSS 7.1 "Jumlah lembaga PAUD terakreditasi" sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 13.707 lembaga. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 36.051 lembaga. Capaian sebanyak 13.707 lembaga PAUD terakreditasi tersebut belum menggambarkan capaian sebenarnya karena masih banyak lembaga PAUD yang telah memenuhi standar nasional pendidikan namun belum dapat di akreditasi oleh BAN PNF.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak 7916. Jika tahun 2015 lembaga PAUD yang terakreditasi sebanyak 5791 naik menjadi 13.707 pada tahun 2016.

Akreditasi PAUD kewenangannya berada di BAN PNF bukan menjadi kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud hanya membantu dan mempersiapkan lembaga PAUD agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk tahun 2016, BAN PNF hanya melakukan akreditasi kepada 8.096 lembaga PAUD. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.916 lembaga berhasil memperoleh akreditasi. Tercatat jumlah total lembaga PAUD,TK/RA,KB/TPA (Tempat Penitipan Anak), SPS (Satuan PAUD Sejenis), sendiri sebanyak 224.197 lembaga.

Lembaga	Terakreditasi			Tidak Terakreditasi	Batal	Jumlah	Diakreditasi	Terakreditasi
	A	B	C					
PAUD	714	4.352	2.850	180	1	8.097	8.096	7.916

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat terus mendorong peningkatan jumlah lembaga PAUD terakreditasi. Untuk itu pada tahun 2016 telah disiapkan sebanyak 36.051 lembaga PAUD yang memenuhi standar nasional yang ditetapkan dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PNF.

Untuk meningkatkan jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi, Kemendikbud melaksanakan beberapa program di antaranya adalah pemberian bantuan rehab gedung yang telah direalisasikan di 50 lembaga PAUD, pemberian APE dan Sarana & Prasarana Pembelajaran di 460 lembaga PAUD, bantuan Pusat Kegiatan Gugus PAUD yang merupakan bengkel kerja para pendidik PAUD di 2.198 PKG PAUD, dan program pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD di 100 Kab/Kota.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan PAUD diseluruh Indoensia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan PAUD Percontohan di lingkungan kantor Kemendikbud, yang diberi nama PAUD KM "0". Diharapkan, keberadaan PAUD ini bisa menjadi contoh bagi lembaga PAUD lain di Indonesia. Diharapkan PAUD di Kemendikbud dapat menjadi PAUD terbaik dan bisa dicontoh oleh pengelola PAUD lain se-Indonesia.

Salah satu sudut ruangan di PAUD KM "0" yang ada di komplek Kemendikbud, Senayan. PAUD KM "0" dibuat agar dapat dijadikan PAUD percontohan di seluruh Indonesia

Beberapa hal yang bisa dicontoh dari PAUD KM "0" adalah fasilitas dan kebijakan di PAUD Kemendikbud. PAUD KM "0" tidak mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) kepada anak-anak. Hal itu sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Fasilitas di PAUD KM "0" memang sangat lengkap dan baik. Ruangan-ruangannya terbagi menjadi ruangan yang tematik, antara lain ruang seni dan kreatif yang dilengkapi dengan berbagai mainan yang merangsang kreativitas anak, area bermain peran yang dilengkapi dengan pakaian anak dari berbagai profesi/pekerjaan dan peralatannya, ruang musik dengan berbagai alat musik tradisional maupun modern, area balok dan gerak, hingga area basah, di mana anak-anak dapat bermain air di kolam kecil serta bermain pasir. Selain itu ada juga ruang anak usia 1-2 tahun, ruang anak usia 2-3 tahun, ruang Pra SD, ruang tidur, ruang bayi, ruang laktasi, ruang ibadah, dan ruang makan.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan mutu layanan PAUD melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum 2013 di seluruh lembaga PAUD dan peningkatan mutu kelembagaan.

IKSS 7.2 "Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)" realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI ditargetkan mencapai 55,30% atau 13.010 program, dari target tersebut berhasil terealisasi 69% atau 13.602 program, dengan persentase capaian sebesar 121%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3%. Tercatat pada tahun 2015 program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI baru mencapai 66%.

Tercapainya target tersebut didukung adanya program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan satuan Pendidikan Non Formal lainnya serta organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pelatihan (misalnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama dll).

Meningkatnya persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI tersebut diantaranya ditunjang oleh sosialisasi, implementasi dan fasilitasi penerapan kurikulum berbasis KKNI kepada LKP yang relevan yang dilakukan secara sinergi baik oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota, Organisasi mitra kursus dan pelatihan, Konsorsium, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta mitra kursus dan pelatihan lainnya.

Walaupun target telah tercapai bahkan melebihi, masih dijumpai kendala dalam penerapan KKNI, diantaranya masih banyak program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di daerah terpencil atau desa-desa yang belum mengacu kepada SKL berbasis KKNI akibat belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* di daerah. Implementasi dan fasilitasi penerapan kurikulum berbasis KKNI pun masih terbatas dilakukan di wilayah regional dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Beberapa terobosan sudah dilakukan dalam rangka mendorong LKP untuk menggunakan SKL berbasis KKNI diantaranya:

a. penyebarluasan informasi tentang KKNI melalui laman *www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus* atau *www.infokursus.net*;
b. Mewajibkan kepada seluruh penerima program bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dengan tujuan bekerja untuk menggunakan SKL berbasis KKNI bagi program kursus dan pelatihan yang sudah disusun SKL berbasis KKNI nya. Sehingga nantinya pada saat dilakukan uji kompetensi harapannya tingkat persentase kelulusan akan tinggi;
c. Lebih mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan KKNI melalui APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
d. Bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan uji kompetensi bagi pendidik kursus dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi.

Berikut adalah rincian jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI:

No	Jenis Keterampilan	Program Kursus yang dilaksanakan	Program Kursus Menerapkan KKNI
1	Akuntansi	410	256
2	Akupuntur	83	42
3	Broadcasting (Kameramen)	48	36
4	Broadcasting (Penyiaran)	51	41
5	Broadcasting (Video Editing)	48	29
6	Ekspor Impor	19	14
7	Hantaran	265	208
8	Merangkai Bunga dan Desain Floral	94	65
9	Musik (Piano Pop dan Jazz)	372	215
10	Spa	211	184
11	Tata Boga (Jasa Usaha Makanan)	461	323
12	Tata Boga (Pastry and Bakery)	426	277
13	Tata Busana	3.270	2.649
14	Tata Kecantikan Kulit	945	682
15	Tata Kecantikan Rambut	1.929	1.386
16	Tata Rias Pengantin	1.734	1.219
17	Sekretaris	80	38
18	Bordir dan Sulam	323	188
19	Master of Ceremony	26	9
20	Mengemudi Kendaraan Bermotor	547	305
21	Sinshe	2	2
22	Baby Sitter	139	89
23	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	1	1
24	Otomotif (Mekanik Sepeda Motor)	601	427
25	Perpajakan	58	32
26	Pijat Refleksi	24	18
27	Senam	81	42
28	Perhotelan (Housekeeping)	188	119
29	Elektronika	250	122
30	Fotografi	31	14
31	Pekarya Kesehatan (Asisten Perawat)	109	45
32	Desain Grafis	172	97
33	Membatik	10	30
34	Las	107	15
35	Bahasa Jepang	248	12
	Jumlah	**13.640**	**9.231**

SS8 Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keempat yaitu peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter (T4).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah didukung dari ketercapaian tiga belas indikator kinerja, yaitu:

a. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B
b. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B
c. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B
d. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B

e. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM
f. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM
g. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
h. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB
i. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB
j. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK
k. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu

Sampai dengan tahun 2016, Mutu layanan pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan makin banyaknya satuan pendidikan dasar dan menengah yang memperoleh akreditasi setiap tahunnya. Peningkatan tersebut juga terlihat dari meningkatnya Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) siswa jenjang SMP dan Sekolah Menengah.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	**74,56%**	66%	**96,81%**	**147**
	2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	**76,87%**	62%	**91,42%**	**147**
	3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	**80,20%**	80,24%	**70.50%**	**87.9**
	4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	**85,57%**	54,90%	**53,2%**	**97**
	5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	**63.36%**	61,24%	**70,1%**	**114**
	6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	**76,62%**	75,01%	**70,9%**	**95**
	7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	**64,48%**	55%	**64,48%**	**117**
	8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	**7,12**	6,5	**7,29**	**112**
	9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	**6,21**	6,5	**5,85**	**90**
	10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	**6,13**	6,5	**5,5**	**85**
	11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	**51,8%**	70%	**100,37%**	**143,4**

Pada tahun 2016, siswa Indonesia memperoleh 83 medali dalam kompetisi Internasional

Berikut perolehan medali dari kompetensi internasional jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diikuti selama tahun 2016.

Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
Jumlah Total Medali			**19**	**30**	**34**	**83**
INTERNATIONAL MATHEMATICS COMPETITION	CHIANG MAI, THAILAND, 14 S.D. 20 AGUSTUS 2016	SD	-	-	2	2
COUPE INTERNATIONALE DE KAYL	LUXEMBOURG, 12 S.D. 18 OKTOBER 2016	SD	5	1	2	8
WORLD CREATIVITY FESTIVAL (WCF)	DAEJEON, REPUBLIK KOREA, 20 S.D. 24 OKTOBER 2016	SD	1	-	1	2
12th INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE OLYMPIAD (IMSO) FOR PRIMARY SCHOOL	KOTA TANGERANG, 9 S.D. 13 NOVEMBER 2016	SD	2	5	2	9
The Thailand International Mathematics Competition (TIMC 2016)	Chiang Mai, Thailand	SMP	1	4	5	10
The 13th Malaysia International Chess Festival (MICF 2016)	Kuala Lumpur, Malaysia	SMP	2	2	2	6
The 7th Basel Open Masters (BOM 2016)	Basel, Switzerland	SMP	6	3	3	12
the 13th International Junior Science Olympiad (IJSO 2016)	Bali, Indonesia	SMP	-	-	-	-
Emas, earth science project	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	-	1	1
Emas, Internasional Team Field Investigation	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	1	-	1
Finalis Intel ISEF	6 - 18 Mei 2016, Phoenix, USA	SMA	-	-	-	-
International Biology Olympiad (IBO)	17 s.d. 24 July 2016, Hanoi, Vietam	SMA	1	2	1	4
International Chemistry Olympiad (IChO)	20 s.d. 29 July 2016, Tbilisi, Georgia	SMA	-	2	2	4
International Earth Science Olympiad (IESO)	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	-	1	1
International Geography Olympiad (IGEO)	17 s.d. 23 Agustus 2016, Bejing, China	SMA	-	-	4	4
International Mathematics Olympiad (IMO)	6 s.d. 16 July 2016, Hongkong	SMA	-	3	3	6
International Olympiad in Informatics (IOI)	12 s.d.19 Agust 2016, Kazan, Rusia	SMA	-	-	4	4
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)	9 - 19 Desember 2016, Bhubaneswar, India	SMA	-	-	-	-
International Physics Olympiad (IPhO)	10 s.d. 18 July 2016, Zurich, Swiss	SMA	1	4	-	5
Meraih 2 Kemenangan World Schools Debating Championship	19 - 29 Juli 2016, Stuttgart, Jerman	SMA	-	-	-	-
Perunggu, Internasional Team Field Investigation	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	-	1	1
Dress The Cake		PKLK	-	3	-	3

IKSS 8.1 "Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B" persentase capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Persentase SD/SDLB yang berakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2016 mencapai 96,81% sedangkan target yang ditetapkan

sebesar 66%. Adapun jumlah sekolah SD/SDLB yang berakreditasi minimal B sebanyak 143.907 sekolah. Sedangkan total sekolah SD sesuai data Dapodik tercatat sebanyak 148.656 sekolah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,25%, yaitu dari 74,56 di tahun 2015 menjadi 96,81% pada tahun 2016.

Sekolah SD/SDLB Berakreditasi

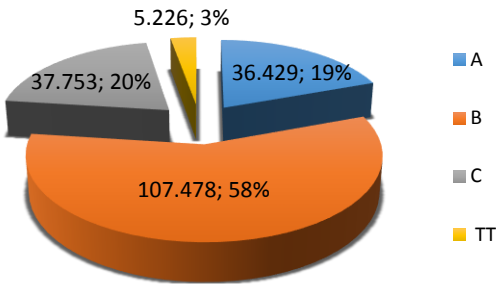

Akreditasi diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kewenangan pelaksanaan dan pemberian akreditasi sekolah SD sederajat bukan menjadi Kemendikbud melainkan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Kemendikbud sesuai dengan kewenangannya hanya membantu atau melakukan intervensi kepada sekolah agar sekolah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan makin banyaknya sekolah yang berakreditasi diharapkan akan mutu pendidikan semakin terjamin.

Beberapa hal yang menyebabkan makin meningkatnya jumlah sekolah yang memperoleh akreditasi antara lain disebabkan:

a. Peningkatan kesadaran sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu layanan dan lulusannya melalui usaha-usaha pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP),
b. Peran pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Direktorat Pembinaan terkait.

Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja, pada tahun 2016, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah diantaranya;

a. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1.141 ruang;
b. Rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB sebanyak 4.841 ruang;
c. Pembangunan perpustakaan SD/SDLB sebanyak 621 ruang;
d. Bantuan peralatan pendidikan SD sebanyak 3.360 SD;
e. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SD sebanyak 37.034 sekolah;
f. Revitalisasi sekolah sebanyak 129 SD;
g. Sekolah Rujukan sebanyak 452 SD;
h. Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 28.030 sekolah; dan
i. Sekolah yang mendapatkan standarisasi dan akreditasi sebanyak 7.012 sekolah.

Khusus untuk capaian akreditasi tahun 2016, BAN S/M telah melakukan akreditasi dengan rincian SD/MI sebanyak 30.901 satuan pendidikan dan SDLB sebanyak 165 satuan pendidikan, sehingga total SD/SDLB yang diakreditasi sebanyak 31.066 satuan pendidikan.

Dari total sekolah yang diakreditasi tersebut, SD/SDLB dengan peringkat akreditasi A sebanyak 10.830 satuan pendidikan atau 34,86% dan akreditasi B sebanyak 17.631 satuan

pendidikan atau 56,75%, sehingga total SD/SDLB berakreditasi minimal B sebanyak 28.461 satuan pendidikan atau 91,61%.

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK ditemui beberapa kendala/hambatan dan permasalahan diantaranya:

a. Dinamika peraturan perundangan. Berlakukanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana SD dan SMP dikelola oleh Pemkab/Pemkot dan SMA oleh Pemprov. Berakibat pada pengelolaan BAP di daerah, serta interaksinya dengan Dinas Pendidikan Provinsi, yang berujung pada proses akreditasi.
b. Perspektif daerah yang berbeda-beda terhadap proses akreditasi, mengakibatkan respon terhadap kebijakan akreditasi yang berbeda pula. Hal ini berdampak pada kinerja BAP dalam melaksanakan akreditasi.
c. Faktor geografis. Letak sekolah yag jauh dari ibukota kabupaten/kota mengakibatkan beberapa daerah memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih dari daerah lain, sehingga mempengaruhi lama proses akreditasi sekolah/madrasah.
d. Faktor cuaca/iklim. Beberapa daerah terhambat karena adanya bencana kabut asap sehingga menyebabkan beberapa satuan pendidikan di Kalimantan Tengah tidak dapat diakreditasi.

IKSS 8.2 "Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B" sampai dengan tahun 2016 mencapai 91,42%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 62%. Sampai dengan tahun 2016, jumlah sekolah SMP/SMPLB yang berakreditasi minimal B sebanyak 35.298 sekolah. Sedangkan total sekolah SMP sesuai data Dapodik tercatat sebanyak 38.298 sekolah.

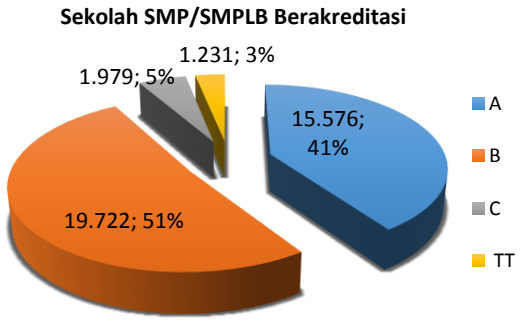

Meningkatnya jumlah sekolah SMP yang memperoleh akreditasi dikarenakan makin meningkatnya kesadaran sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu layanan dan lulusan. Dengan kesadaran tersebut sekolah berusaha melakukan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selain itu adanya peran pembinaan baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Direktorat Pembinaan terkait yang secara intensif melakukan pendampingan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian akreditasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,55%, yaitu dari 76,87 di tahun 2015 menjadi 91,42% pada tahun 2016.

Khusus pencapaian akreditasi tahun 2016, BAN S/M telah melakukan akreditasi untuk satuan pendidikan SMP/SMPLB, dengan rincian SMP/MTS sebanyak 9.668 satuan pendidikan dan SMPLB sebanyak 124 satuan pendidikan, sehingga total SMP/SMPLB yang diakreditasi sebanyak 9.792 satuan pendidikan.

SMP/SMPLB yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak 4.339 satuan pendidikan atau 44,31% dan akreditasi B sebanyak 4.294 satuan pendidikan atau 43,85%, sehingga total SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sebanyak 8.633 satuan pendidikan atau 88,16%.

Kewenangan akreditasi sekolah SMP sederajat menjadi kewenagan BAN S/M bukan menjadi kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud sesuai dengan kewenangannya hanya membantu atau mempersiapkan sekolah agar sekolah dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memperoleh akreditasi, pada tahun 2016, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah diantaranya;

a. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 2.807 ruang;
b. Rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 5.434 ruang;
c. Pembangunan perpustakaan SMP sebanyak 564 ruang;
d. Bantuan peralatan pendidikan SMP sebanyak 1.035 sekolah;
e. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMP sebanyak 10.273 sekolah;
f. Revitalisasi sekolah sebanyak 35 SMP;
g. Sekolah Rujukan sebanyak 514 SMP;
h. Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 252 sekolah;

IKSS 8.3 "Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B" capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan. Sampai dengan tahun 2016, persentase SMA/SMLB yang berakreditasi minimal B baru mencapai 70.50%, dari target yang ditetapkan sebesar 80,24%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9.7%, yaitu dari 80,20% di tahun 2015 menjadi 70.5% di tahun 2016.

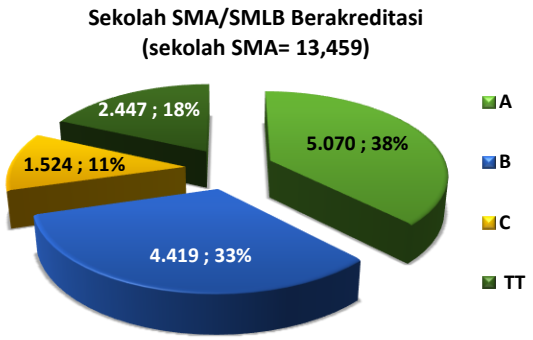

Terjadinya penurunan capaian dari dari tahun sebelumnya dan tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan banyak bermunculannya sekolah SMA baru dan banyaknya sekolah SMA yang belum dilakukan reakreditasi kembali setelah akreditasi sekolah tersebut habis jangka waktu akreditasinya. Perlu diketahui bahwa jangka waktu akreditasi sekolah adalah lima tahun, setelah lima tahun sekolah harus dilakukan akreditasi kembali. Selain itu, terjadinya penurunan dan tidak tercapainya target juga disebabkan masih banyaknya sekolah SMA yang belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

Untuk tahun 2016, BAN S/M telah melakukan akreditasi kepada satuan pendidikan SMA/SMALB, dengan rincian SMA/MA sebanyak 4.512 satuan pendidikan dan SMALB sebanyak 62 satuan pendidikan, sehingga total SMA/SMALB yang diakreditasi sebanyak 4.574 satuan pendidikan. Dari proses akreditasi tersebut diperoleh hasil yaitu SMA/SMALB

yang memperoleh peringkat akreditasi A sebanyak 2.244 satuan pendidikan atau 49,06% dan akreditasi B sebanyak 1.849 satuan pendidikan atau 40,42%, total SMA/SMALB berakreditasi minimal B sebanyak 4.093 satuan pendidikan atau 89,48%.

Kewenangan akreditasi sekolah SMA sederajat menjadi kewenangan BAN S/M bukan menjadi kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud sesuai dengan kewenangannya hanya membantu atau mempersiapkan sekolah agar sekolah dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memperoleh akreditasi, pada tahun 2016, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah diantaranya;

a. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 4.187 ruang;
b. Rehabilitasi ruang kelas SMA sebanyak 1.600 ruang;
c. Pembangunan perpustakaan SMA sebanyak 311 ruang;
d. Bantuan peralatan pendidikan SMA sebanyak 1.053 paket;
e. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMA sebanyak 4.852 sekolah;
f. Revitalisasi sekolah sebanyak 291 SMA;
g. Sekolah Rujukan sebanyak 818 SMA;
h. Sekolah yang mendapatkan standarisasi dan akreditasi sebanyak 8 sekolah.

IKSS 8.4 "Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B" pada tahun 2016 mencapai 53,2%. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 54,90%. Capaian kinerja tersebut belum mengambarkan total program keahlian yang ada karena masih ada sebanyak 16.003 (40%) program keahlian yang belum dilakukan akreditasi oleh BAN S/M.

Sampai dengan tahun 2016, total sebanyak 21.512 program keahlian pada sekolah SMK telah berakreditasi minimal B, sedangkan tercatat ada sebanyak 40.403 program keahlian yang ada di SMK.

Khusus tahun 2016, BAN S/M telah melakukan akreditasi untuk SMK sebanyak 5.581 paket keahlian, dengan perincian yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak 2.858 paket keahlian atau 51,21% dan akreditasi B sebanyak 2.343 paket keahlian atau 41,98%, sehingga total SMK berakreditasi minimal B sebanyak 5.201 paket keahlian atau 93,19%.

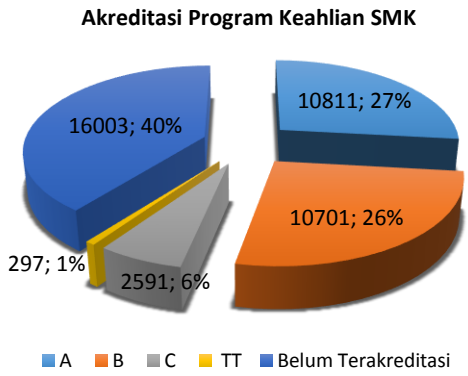

Kewenangan akreditasi sekolah SMA sederajat menjadi kewenangan BAN S/M bukan menjadi kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud sesuai dengan kewenangannya hanya membantu atau mempersiapkan sekolah agar sekolah dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan jumlah program keahlian pada sekolah SMK yang memperoleh akreditasi, pada tahun 2016, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah diantaranya;

a. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 5.478 ruang;
b. Rehabilitasi ruang kelas SMK sebanyak 999 ruang;
c. Bantuan peralatan pendidikan SMK sebanyak 1.274 paket;
d. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMK sebanyak 2.302 sekolah;
e. Sekolah Rujukan sebanyak 135 SMK;
f. Sekolah yang mendapatkan standarisasi dan akreditasi sebanyak 1.360 sekolah

IKSS 8.5 "Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM" realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk tahun 2016 SD/SDLB yang memenuhi SPM telah mencapai 70,10%, dari target yang ditetapkan sebesar 61,24%, dengan persentase capaian sebesar 114%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6,74%. Untuk tahun 2015, persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sendiri baru mencapai 63.36%.

Tren Kenaikan SD/SDLB yang memenuhi SPM

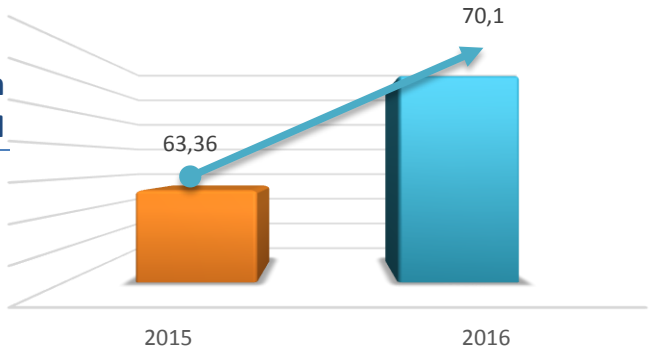

Pencapaian SPM untuk jenjang sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dasar.

Meskipun pencapaian SPM bukan menjadi tanggungjawab Kemendikbud, namun Kemendikbud terus mendorong peningkatan angka pencapaian SPM pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Beberapa program yang dilaksanakan Kemendikbud dalam pemenuhan SPM sekolah antara lain pembangunan sekolah dasar baru untuk daerah-daerah yang masih rendah akses ke sekolahnya, pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, pemberian bantuan pembangunan perpustakaan, bantuan peralatan pendidikan, pembinaan manajemen berbasis sekolah dan pembinaan proses belajar dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud telah membangun 24 sekolah SD, pembangunan 1.141 RKB, rehab ruang kelas sebanyak 4.811 ruang kelas, pembangunan 621 perpustakaan, pembinaan manajemen berbasis kinerja (MBS) sebanyak 28.030 sekolah, pembinaan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku sebanyak 37.034 sekolah, dan bantuan peralatan pendidikan kepada sebanyak 7.021 sekolah.

IKSS 8.6 "Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM" realisasi kinerjanya baru mencapai 70,90% dari target yang ditetapkan sebesar 75,01%, dengan persentase capaian sebesar 95%.

Sama seperti pencapaian SPM sekolah dasar, pencapaian SPM untuk jenjang sekolah menengah pertama merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan, hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

Meskipun pencapaian SPM tersebut bukan menjadi tanggungjawab Kemendikbud, namun Kemendikbud terus mendorong peningkatan angka pencapaian SPM pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Dengan pemenuhan SPM tersebut diharapkan mutu pendidikan dapat terus meningkat.

Beberapa program yang dilaksanakan Kemendikbud dalam pemenuhan SPM sekolah antara lain pembangunan sekolah dasar baru untuk daerah-daerah yang masih rendah akses ke sekolahnya, pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, bantuan pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan, bantuan peralatan pendidikan, dan pembinaan manajemen berbasis sekolah.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud telah membangun 109 sekolah SD-SMP satu atap, pembangunan 2.807 RKB SMP, rehab ruang kelas sebanyak 5.350 ruang kelas SMP, pembangunan 564 perpustakaan, pembangunan laboratorium IPA SMP sebanyak 562, pembinaan manajemen berbasis kinerja (MBS) sebanyak 252 sekolah, dan bantuan peralatan pendidikan kepada sebanyak 1.305 sekolah SMP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM antara lain mengenai penyediaan sekolah dan pemerataan guru. Untuk penyediaan sekolah, Pemerintah kesulitan melakukan pembangunan dikarenakan seringnya ditemui permasalahan legalitas lahan yang akan dibangun. Masalah tersebut menyebabkan pembangunan sekolah sering kali dibatalkan. Sedangkan untuk penyediaan guru yang sesuai SPM pada satuan pendidikan, Kemendikbud kesulitaan untuk memenuhinya karena mutasi guru yang ada sekarang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan bukan kewenangan Kemendikbud.

Untuk mengatasi masalah kekurangan guru tersebut, Kemendikbud telah menjalankan program Guru Garis Depan. Guru yang berprestasi akan dikirimkan ke daerah-daerah yang masih kekurangan guru terutama pada daerah terdepan, terluar dan Tertinggal (3T).

IKSS 8.7 "Kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1" untuk tahun 2016 capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016. kabupaten/kota yang memiliki indeks pencpaian SPM pendidikan dasar sebesar 1 ditargetkan mencapai 55%. Dan pada tahun tersebut kabupaten/kota yang berhasil memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1 mencapai 64,84%. Dengan persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 117%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, pencapaian SPM pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan. Ada empat belas butir pelayanan pendidikan dasar yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota, yaitu :

1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Meskipun menjadi kewenangan dan tanggungjawab kabupaten/kota, Kemendikbud berupaya mendukung pencapaian layanan SPM pendidikan dasar. Beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain pembangunan unit sekolah baru terutama pada daerah-daerah 3T, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembeian bantuan peralatan pendidikan, pembangunan perpustakaan dan laboratorium, dan pengiriman guru dan tenaga pendidik ke daerah-daerah 3T.

Untuk tingkat sekolah dasar pada tahun 2016 telah dibangun 24 sekolah, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1.141 ruang, rehabilitasi ruang kelas sebanyak 4.811 ruang, pembangunan perpustakaan sebanyak 621 buah, pemberian bantuan peralatan pendidikan kepada 3.360 sekolah.

Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah pertama telah dibangun sebanyak 196 sekolah SMP, 109 SD-SMP satu atap, 25 sekolah berasrama, pembangunan ruang kelas sebanyak 2.807 ruang, rehabilitasi 5.350 ruang, pembangunan perpustakaan sebanyak 564, pembangunan laboratorium sebanyak 562, dan pemberian bantuan peralatan pendidikan kepada 1.305 sekolah.

Untuk pemenuhan guru di daerah terpencil, Kemendikbud menjalankan program Guru Garis Depan. Guru yang berprestasi akan dikirimkan ke daerah-daerah yang masih kekurangan guru terutama pada daerah terdepan, terluar dan Tertinggal (3T).

IKSS 8.8 "Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB" realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, rata-rata nilai ujian sekolah tingkat SD/SDLB ditargetkan sebesar 6,5. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 7,29%, dengan persentase capaian sebesar 112%. Rata-rata sebesar 7,29 tersebut belum termasuk siswa dari MI. Jika digabungkan dengan rata-rata nilai dari MI maka rata-rata nilai ujian sekolah SD sederajat menjadi sebesar 7,26.

Ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah jenjang pendidikan sekolah SD sederajat adalah Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Porsi penyusunan soal ketiga mata pelajaran tersebut terdiri dari 75% soal yang disusun oleh daerah dan 25% soal disiapkan oleh Pusat.

Jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 7,12, rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 0,17 menjadi 7,29 di tahun 2016. Dilihat dari status satuan pendidikan, peningkatan pada SD dan MI negeri lebih tinggi jika dibandingkan pada SD dan MI swasta. Berikut rincian nilai ujian sekolah jenjang pendidikan dasar.

SEKOLAH MADRASAH	Status	2015			2016			NAIK/ TURUN
		SEKOLAH	PESERTA	NILAI RERATA	SEKOLAH	PESERTA	NILAI RERATA	
NASIONAL		166,751	4,671,330	70.99	167,796	4,645,472	72.61	1.62
SD	Total	144,241	4,191,800	71.22	144,806	4,145,828	72.98	1.76
	Negeri	131,042	3,774,134	71.06	131,067	3,710,097	72.91	1.85
	Swasta	13,199	417,666	72.64	13,739	435,731	73.66	1.02
MI	Total	22,510	479,530	68.95	22,990	499,644	69.53	0.58
	Negeri	1,705	64,905	70.50	1,705	67,035	71.70	1.20
	Swasta	20,805	414,625	68.70	21,285	432,609	69.20	0.50

IKSS 8.9 "Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB" untuk 2016 baru mencapai 5,85 dari target yang ditetapkan sebesar 6,5 dengan persentase capaian sebesar 90%. Rata-rata nilai UN tersebut belum termasuk siswa dari MTs dan SMP Terbuka. Jika termasuk MTs dan SMP terbuka maka nilai UN SMP sederajat sebesar 5,86. Untuk nilai rata-rata nilai UN MTS sendiri sebesar 5,9; dan SMP terbuka sebesar 4,83. Adapun mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMP sederajat antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tahun 2015, rata-rata nilai UN SMP/SMPLB untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,36, perlu diketahui bahwa nilai rata-rata UN SMP/SMPLB untuk tahun 2015 sebesar 6,21. Penurunan untuk jenjang SMP diketahui lebih besar dibanding penurunan pada sekolah MTs. UN SMP sederajat tahun 2016 diikuti sejumlah 3.157.689 siswa SMP dengan 36.018 sekolah; 95.401 siswa MTs dengan 16.611 sekolah; dan 30.208 siswa SMP Terbuka dengan 1.051 sekolah.

SEKOLAH/ MADRASAH		2015			2016			NAIK/ TURUN
NASIONAL		SEKOLAH	PESERTA	NILAI RERATA	SEKOLAH	PESERTA	NILAI RERATA	
Kemendikbud + Kemenag		51.817	4.119.189	61,81	53.680	4.163.307	58,60	-3,21
SMP	Total	34.680	3.124.750	62.18	36.018	3.157.698	58.56	-3.62
	Negeri	21.381	2.322.375	62.37	21.990	2.364.935	58.85	-3.52
	Swasta	13.299	802.375	61.63	14.028	792.763	57.70	-3.93
MTs	Total	16.112	962.370	60.98	16.611	975.401	59.06	-1.92
	Negeri	1.457	234.685	63.41	1.457	237.485	60.12	-3.29
	Swasta	14.655	727.685	60.20	15.154	737.916	58.72	-1.48
SMP terbuka	Total	1.025	32.069	51.09	1.051	30.208	48.37	-2.72
	Negeri	1.024	32.063	51.09	1.049	30.196	48.37	-2.72
	Swasta	1	6	36.55	2	12	36.30	-0.25

Penurunan nilai rata-rata UN dikarenakan berbagai faktor diantaranya: Pertama, semakin meningkatnya kejujuran dalam pelaksanaan UN dan semakin banyak pula sekolah yang menggunakan UNBK yang menjadikan kecurangan tidak lagi terjadi. Kedua, dengan tidak digunakannya hasil UN dalam menentukan kelulusan siswa, keseriusan siswa dan guru dalam menyiapkan diri menghadapi ujian nasional mungkin juga berkurang. Faktor yang tidak kalah penting adalah bentuk kisi-kisi UN tahun 2016 yang tidak lagi berupa indikator soal yang rinci. Dengan kisi-kisi yang tidak rinci maka bentuk soal ujian tidak lagi bisa ditebak oleh bimbingan belajar atau latihan soal intensif (*drilling)* yang cenderung menyempitkan kurikulum dan soal-soal UN tahun 2016 menggunakan irisan dari kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, pendekatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 mengalami sedikit perbedaan prinsip jika dibandingkan dengan pendekatan pada Kurikulum 2006. Hal ini kemungkinan besar mempengaruhi capaian nilai UN pada sekolah tertentu.

Selain itu, dalam UN 2016 jumlah soal dengan ketrampilan berpikir orde tinggi HOTS *(Higher Order Thinking Skill)* juga ditingkatkan hingga mencapai 10%. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi penilaian yang terus dilakukan untuk lebih mendorong siswa dan guru melakukan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan kompetensi abad 21.

Meskipun nilai rata-rata UN tingkat SMP/SMPLB mengalami penurunan namun indeks Integritas Ujian nasional (IIUN) tahun 2016 mengalami kenaikan. Dengan meningkatnya nilai IIUN, menunjukkan tingkat kejujuran naik, maka nilai yang keluar adalah lebih akurat mendekati kemampuan siswa yang sebenarnya. Dengan semakin jujurnya UN, maka diharapkan hasil UN dapat makin tepat memetakan capaian pendidikan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengoptimalkan pembinaan sekolah secara lebih baik.

Ujian Nasional (UN) untuk SMP sederajat dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2016. Untuk UN Utama dan UN Susulan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2016. Pelaksanaan UN tahun 2016 untuk tingkat SMP sederajat telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan penurunan pengaduan secara drastis dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Selama pelaksanaan UN 2016, Kemendikbud telah membentuk Pusat Informasi atau Posko UN. Posko tersebut disediakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), BSNP, Pusat Penilaian Pendidikan, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat terkait. Layanan pengaduan diberikan mulai H-2 sampai dengan H+1. Adanya pusat informasi pengaduan UN ini merupakan bentuk peningkatan layanan layanan publik yang disediakan Kemendikbud untuk masyarakat.

Pada tahun 2016 hanya terjadi 68 pengaduan, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah pengaduan 96. Pengaduan paling banyak adalah pada tahun 2014 dengan jumlah kasus 368, dan terbanyak kedua adalah tahun 2013 dengan jumlah kasus 312.

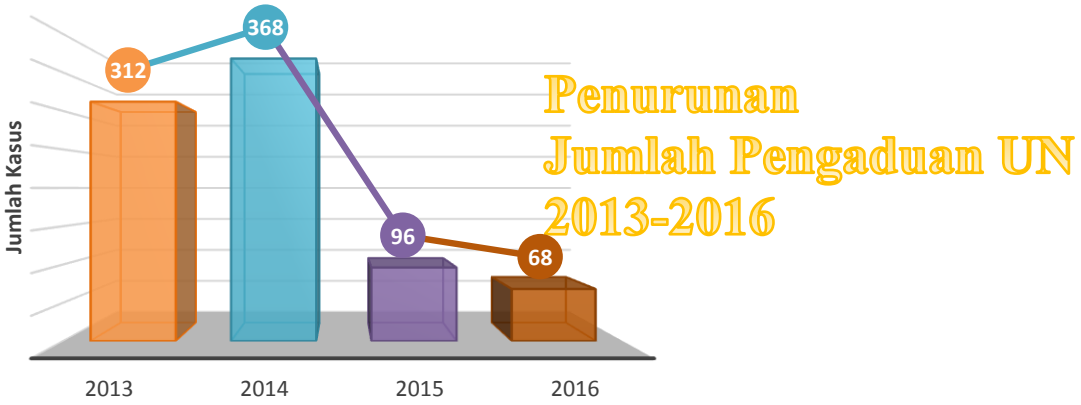

Dari 11 jenis pelaporan pengaduan, jenis kritik dan saran menjadi pengaduan dengan posisi tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 32. Posisi kedua adalah permohonan informasi dengan jumlah kasus sebanyak tujuh. Isu kecurangan dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) menduduki posisi ketiga dengan jumlah kasus masing-masing 6 kasus. Sementara itu tertukar soal UN kosong alias tidak ada kasus.

Dalam pelaksanaan UN SMP sederajat tahun ini masih ditemukan laporan terkait dengan kunci jawaban dan naskah soal masing-masing dengan 4 kasus. Pengaduan tentang standar kelulusan dan gangguan system UNBK, masing-masing dengan 3 kasus. Sementara isu kebocoran hanya ada 2 kasus. Yang menarik adalah, masih ditemukannya laporan adanya pungutan UN dengan satu kasus, sementara pada tiga tahun sebelumnya tidak ada laporan.

Menurunkan jenis pelaporan atau pengaduan yang masuk ke Pusat Informasi UN ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UN SMP sederajat tahun ini jauh lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan POS UN yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

IKSS 8.10 "Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK" untuk tahun 2016 baru mencapai 5,5. Realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 6,5 dengan persentase capaian sebesar 85%. Rata-rata nilai tersebut merupakan gabungan dari sekolah negeri dan swasta. Rata-rata nilai UN untuk sekolah negeri sebesar 5,54 sedangkan dari sekolah swasta sebesar 5,38. Adapun mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMA/SMK sederajat antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Kejuruan.

Dibandingkan dengan tahun 2015 rata-rata nilai UN SMA/SMK mengalami penurunan sebesar 0,63. Tercatat pada tahun 2015 rata-rata nilai UN SMA/SMK sebesar 6,13. Namun jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di bawah Kemenag nilai rata-rata UN sekolah dilingkungan Kemendikbud lebih tinggi. Nilai rata-rata SM di bawah Kemenag sendiri sebesar 5.39 sedangkan untuk nilai rata-rata sekolah di lingkungan Kemendikbud sebesar 5,5.

KEMENDIKBUD	2015		2016		Perubahan	
NASIONAL	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	UN	IIUN
NEGERI & SWASTA	61,93	61,98	55,03	64,04	-6.9	2.06
NEGERI	62,70	61,65	55,45	63,28	-7,25	1.63
SWASTA	59,90	62,39	53,87	64,96	-6,03	2.57
KEMENAG	2015		2016		Perubahan	
NASIONAL	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	UN	IIUN
NEGERI & SWASTA	58,99	59,10	53,92	61,19	-5.07	2.09
NEGERI	62,18	58,80	55,30	63,00	-6.88	4.2
SWASTA	57,45	60,57	53,20	60,88	-4.25	0.31

Meskipun rata-rata nilai UN SMA/SMK sederajat mengalami penurunan namun kita patut bersyukur Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tingkat SMA/SMK sederajat mengalami kenaikan. IIUN SMA tahun 2016 mencapai 64.05 lebih tinggi dari tahun 2015 yang baru mencapai 61,98.

Penurunan nilai rata-rata UN dikarenakan berbagai faktor diantaranya: Pertama, semakin meningkatnya kejujuran dalam pelaksanaan UN dan semakin banyak pula sekolah yang menggunakan UNBK yang menjadikan kecurangan tidak lagi terjadi. Kedua, dengan tidak digunakannya hasil UN dalam menentukan kelulusan siswa, keseriusan siswa dan guru dalam menyiapkan diri menghadapi ujian nasional mungkin juga berkurang. Faktor yang tidak kalah penting adalah bentuk kisi-kisi UN tahun 2016 yang tidak lagi berupa indikator soal yang rinci. Dengan kisi-kisi yang tidak rinci maka bentuk soal ujian tidak lagi bisa ditebak oleh bimbingan belajar atau latihan soal intensif (*drilling)* yang cenderung menyempitkan kurikulum. Kebijakan UN tahun 2016 menggunakan *blue print* atau kisi-kisi yang lebih luas (general), sedangkan pada tahun sebelumnya menggunakan kisi-kisi yang sangat rinci atau detil per indikator, sehingga sebagian besar sekolah yang terbiasa melakukan *"drilling"* dan *"narrowing curriculum"* mengalami penurunan capian nilai UN. Soal-soal UN Tahun 2016 menggunakan irisan dari Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, pendekatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 mengalami sedikit perbedaan prinsip jika dibandingkan dengan pendekatan pada Kurikulum 2006. Dengan demikian terjasi hal yang kurang sinkron pada sekolah yang berbasis K-2013. Hal ini kemungkinan besar mempengaruhi capaian nilai UN pada sekolah tertentu.

Selain itu, dalam UN 2016 jumlah soal dengan ketrampilan berpikir orde tinggi juga ditingkatkan hingga mencapai 10%. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi penilaian yang terus dilakukan untuk lebih mendorong siswa dan guru melakukan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan kompetensi abad 21.

UN SMA/SMK Sederajat tahun 2016 ini dilaksanakan oleh sebanyak 19.952 sekolah, dengan 1.297 diantaranya menggunakan UNBK (UN Berbasis Komputer) dan selebihnya menggunakan UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil). Penyelenggaraan UN tingkat SMA/SMK sederajat baik berbasis kertas dan berbasis komputer untuk tahun 2016 berjalan lancar.

Sesuai dengan laporan dari posko UN, terjadi penurunan jumlah laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan UN tahun 2016.

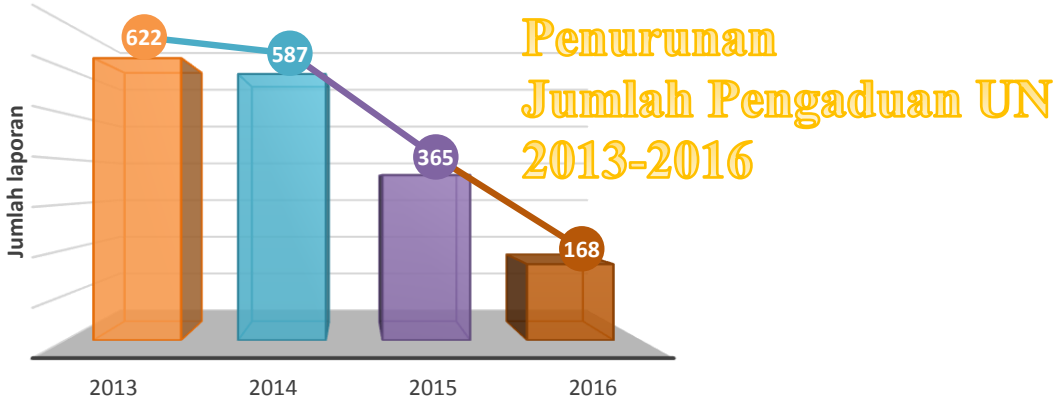

Hasil dari pelaksanaan UN setiap tahun dianalisa dan disajikan dalam laporan dari tingkat satuan pendidikan hingga tingkat nasional. Laporan hasil UN akan digunakan oleh pengambil kebijakan di semua tingkat untuk melakukan peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan.

Untuk tahun 2017, Kemendikbud tetap akan menyelenggarakan Ujian Nasional. Selain UN, Ujian Sekolah yang dilakukan masing-masing sekolah akan ditingkatkan mutunya menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). USBN dilakukan hanya untuk beberapa mata pelajaran. Kemendikbud akan terus memperluas pelaksanaan UN berbasis Komputer baik untuk UN maupun USBN.

IKSS 8.11 "Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu" realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rumusan kebijakan peningkatan mutu ditargetkan sebesar 70%, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 100,37%, dengan persentase capaian sebesar 143,4%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 70%, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 48,57%. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang berhasil digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, hasil penelitian dan pengembangan tersebut antara lain:

a. Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan, yang difokuskan pada:
   1) Jumlah model perbukuan. Dihasilkan 153 buku, terdiri dari 121 buku mata pelajaran wajib telah disampaikan kepada direktorat terkait untuk digunakan oleh siswa dan guru kelas I, IV, VII, X; serta 32 buku mata pelajaran wajib yang telah selesai ditelaah untuk kelas II, III, V, VI pada beberapa mata pelajaran untuk siswa dan guru dalam mendukung penyelesaian secara keseluruhan buku teks pelajaran dari kelas I - XII.

2) Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD Dikmas. Dihasilkan 75 dokumen, terdiri dari: penyempurnaan perangkat kebijakan, desain dan pembelajaran kurikulum 2013 untuk SD/MI (13 Kurikulum), SMP/MTs (15 Kurikulum), SMA/SMK/MA (31 Kurikulum), kebijakan kurikulum dan perbukuan (9 dokumen), 7 silabus untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
3) Jumlah model kurikulum dan pembelajaran. Dihasilkan 10 dokumen meliputi:
   a) Pengembangan model kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai karakteristik dan konteks daerah (2 model kurikulum sekolah).
   b) Pengembangan model pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi satuan pendidikan dalam merancang dan menerapkan proses pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, kapasitas dan karakteristik satuan pendidikan (8 model).

b. Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, yang difokuskan pada:
1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Pendidikan. Dihasilkan 30 dokumen kebijkan dikbud terdiri dari:
   a) Kajian Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan (6 judul)
   b) Kajian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (4 judul)
   c) Kajian Penilaian Pendidikan (2 judul)
   d) Kajian Model Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (3 judul)
   e) Kajian Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan
   f) Pengembangan Wahana Praktek Baik Pendidikan dan Kebudayaan
   g) Fasilitasi Pelaku Pendidikan (3 judul)
   h) Kajian Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (3 judul)
   i) Deseminasi Hasil-hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan;
   j) Kajian Isu Aktual (6 judul)
   k) Forum Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Kebudayaan. Dihasilkan 11 dokumen kebijakan hail penelitian kebudayaan terdiri dari:
   a) Kajian Transformasi Budaya Gotong Royong
   b) Kajian Pendidikan Kebhinekaan di Satuan pendidikan
   c) Kajian Pendidikan Budaya Maritim
   d) Kajian peningkatan kreatifitas & apresiasi karya budaya
   e) Kajian Pewarisan Budaya melalui Pendidikan
   f) Kajian Pemberdayaan Masyarakat Adat untuk Pelestarian dan Pewarisan Nilai-Nilai Budaya
   g) Kajian Dampak Penetapan Warisan Budaya Takbenda dalam Daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO

h) Kajian Akulturasi Kebudayaan di Daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
i) Penelitian Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat
j) Kajian Pemanfaatan Media Online dalam Promosi Warisan Budaya.
k) Kajian Isu Aktual Kebudayaan: Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan terhadap Anak.

c. Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan, yang difokuskan pada Penyusunan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal. Dihasilkan 137.830 soal, yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Soal Akademik yang dikembangkan untuk Bank Soal	79.230	Soal
2.	Soal Ujian untuk Peserta Didik	47.100	Soal
3.	Sinkronisasi Soal CBT	7.000	Soal
4.	Soal kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	4.500	Soal
	Jumlah	137.830	Soal

d. Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi, yang difokuskan pada Hasil akreditasi sekolah yang dimanfaatkan oleh unit terkait di Pusat, daerah dan sekolah dalam penyusunan program. Telah diakreditasi 51.504 sekolah/madrasah sesuai standar nasional pendidikan (SNP), dengan rincian sebagai berikut.

Capaian Akreditasi Biaya APBN						Capaian Akreditasi Biaya Non APBN (APBD dan Kemenag)			
No	Jumlah	Peringkat			Jumlah	Peringkat			Jumlah
		A	B	C		A	B	C	
1.	SD/MI	8.877	15.312	2.210	26.399	1.997	2.491	361	4.849
2.	SMP/MTs	3.739	3.627	933	8.299	589	721	172	1.482
3.	SMA/MA	2.093	1.640	401	4.134	136	217	62	415
4.	SMK	2.596	2.092	310	4.998	268	260	37	565
5.	SLB	77	172	26	275	44	34	10	88
	Jumlah	**17.382**	**22.843**	**3.880**	**44.105**	**3.034**	**3.723**	**642**	**7.399**
TOTAL = 51.504									

Keberhasilan pencapaian yang melebih target IKSS dikarenakan kegiatan Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi sekolah/madrasah dapat melampaui target tahun 2016 secara signifikan. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian tersebut adalah dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam membantu pelaksanaan akreditasi sekolah/madrash melalui Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Dukungan pemerintah daerah dan Kementerian Agama memberi kontribusi sebesar 14,37% dari keseluhan capaian.

Walaupun secara umum capaian IKSS ini melebihi target yang ditentukan, proses pencapaian IKSS tersebut tidak terlepas dari hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Misalkan, sebagai akibat adanya kebijakan efisiensi dan *selfblocking* anggaran ada kegiatan yang mengalami pemrioritasan ulang sasaran dan target, serta menjadwalan ulang kegiatannya.

Adapun langkah antisipasi yang di ambil agar target IKSS dapat tercapai dengan melakukan perubahan sasaran dan target berdasarkan prioritas. Hal ini terjadi pada kegiatan untuk menghasilkan target model kurikulum. Pada awal sasaran ditujukan untuk semua buku teks pelajaran kelompok A dan B sesuai dengan kebijakan hasil revisi kurikulum 2013, namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya/tenaga maka dilakukan pemberian prioritas pada pengembangan dan revisi buku teks untuk kelas I, IV, VII, X, sedangkan untuk kelas II, III, V, VI hanya dilakukan penelahaahan beberapa mata pelajaran. Pengembangan atau revisi buku teks untuk kelas II, III, V, VI, IX dan XII dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya

SS9 Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keempat yaitu peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter (T4).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan didukung melalui ketercapaian lima indikator kinerja, yaitu:

a. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional
b. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar
c. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar

Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru yang merata di seluruh daerah menjadi masalah utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sampai dengan tahun 2016, kita mengakui profesionalisme guru masih kurang bagus, hal tersebut tercermin dari nilai rata-rata nasional Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang baru mencapai 56.69 dan angka kelulusan sertifikasi yang hanya 39.14% pada tahun 2016.

Masalah distribusi guru juga belum menunjukkan kemajuan. Secara keseluruhan jumlah guru yang tersedia telah memenuhi bahkan melebihi, namun distribusinya masih belum merata. Di satu sisi ada daerah yang kelebihan guru, di sisi lain masih banyak daerah yang kekurangan guru. Kemendikbud sangat sulit untuk melakukan pemerataan guru, karena masalah mutasi guru menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah Provinsi dan bukan lagi kewenangan Kemendikbud.

Namun begitu, untuk mengurangi kekurangan guru khususnya pada daerah Terdepan, Terluar, dan tertinggal (3T), Kemendikbud telah melaksanakan program Guru Garis Depan (GGD) dan Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T). Tahun 2016, untuk GGD sebanyak 6.296 guru telah ditempatkan di 93 kabuapten, sedangkan untuk SM3T sebanyak 2.996 guru.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	**84,02%**	50,9%	**49,6%**	**97,4**
	2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	**91%**	68,13%	**75,52%**	**111**
	3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	**46,51%**	67%	**52,09%**	**77,7**

IKSS 9.1 "Persentase guru pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional" sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 49,6%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 50,9%.

Guru profesional adalah guru yang bersertifikat dan berkualifikasi sesuai dengan UU Guru dan Dosen tahun 2005. Sertifikasi 2016 diikuti oleh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang diangkat sebelum tahun 2016 serta mempunyai berstatus guru CPNS, PNS, atau guru tetap. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Ristek Dikti.

Mendikbud Bapak Muhadjir Effendy sedang memberikan penghargaan kepada guru-guru berprestasi

Untuk mempercepat penyelesaian program sertifkasi, pada tahun 2016, pemerintah melakukan perubahan pola sertifikasi yang awalnya ditetapkan melaui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirubah menjadi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). Perubahan tersebut menyebabkan terjadi penambahan kuota sertifikasi yang awalnya 25.000 orang menjadi 70.000 orang.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan dalam mekanisme sertifikasi baik dalam calon peserta ataupun prasyarat kelulusan. Calon peserta sertifikasi 2016 dipersyaratkan sudah mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru) dengan nilai mencapai 5,5 point. Kelulusan sertifikasi 2016 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) ujian akhir PLPG yang meliputi uji kinerja dan

uji tulis LPTK (UTL) dan (2) uji kompetensi guru (UKG) dalam bentuk uji tulis nasional (UTN). Kelulusan ujian akhir PLPG merupakan prasyarat untuk mengikuti UTN.

Kedua tahap uji kompetensi tersebut tidak sekedar mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, tetapi lebih kepada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Peserta yang lulus sertifikasi merupakan guru profesional yang memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Persyaratkan kelulusan sertifikasi tersebut menyebabkan rendahnya kelulusan sertifikasi 2016 yang hanya mencapai 39.14%.

Rendahnya tingkat kelulusan peserta dikarenakan adanya perubahan proses PLPG dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Nilai Uji Tulis Nasional pada tahun 2016 menjadi syarat kelulusan dengan nilai minimal 80.

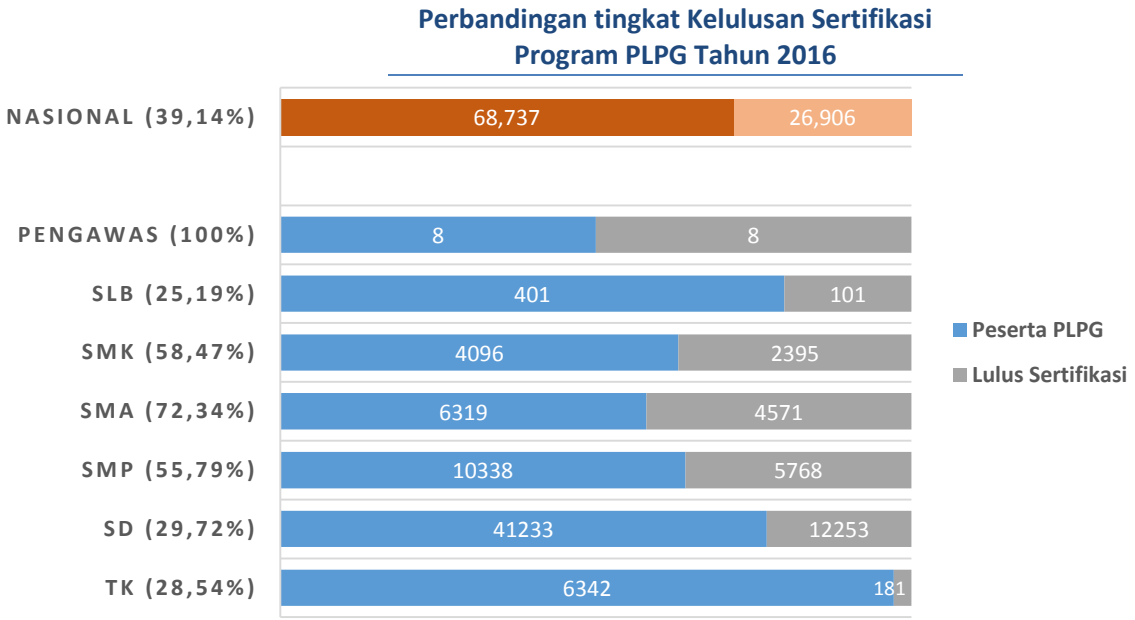

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, terkesan capaian tahun 2016 mengalami penurunan. namun sebenarnya capaian kinerja tersebut tidak mengalami penurunan. adanya koreksi angka capaian tersebut dikarenakan adanya perubahan pada angka pembanding yang digunakan. Hal itu disebabkan adanya kebijakan yang baru yang dikeluarkan.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan arah kebijakan sertifikasi. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 yang mensyaratkan peserta sertifikasi adalah bagi guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005 diubah menjadi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2016. Permen baru tersebut menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang diangkat sebelum tahun 2016. Perubahan ini berakibat perubahan *baseline* data guru dari 1,7 juta menjadi 2,9 juta guru dan berpengaruh dalam pengukuran capaian target indikator program. Hingga tahun 2016 total guru yang lulus sertifikasi mencapai 1.449.609 orang atau **49,60%** dari total guru 2.922.826 orang.

IKSS 9.2 "Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar" realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 68,13%, berhasil terealisasi sebesar 75,52%, dengan persentase capaian sebesar 111%.

Pencapaian kinerja yang melampaui target tesebut didukung oleh adanya pemenuhan standar-standar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar sendiri pemenuhannya merupakan kewenangan kabupaten/kota dan satuan pendidikan bukan menjadi kewenangan Kemendikbud.

Pada tahun 2016 satuan pendidikan dasar yang memiliki jumlah guru sesuai standar baru mencapai 75,52% atau 139.636 sekolah dari jumlah keseluruhan sekolah SD dan SMP sebanyak 184.895 sekolah. Untuk sekolah SD, sekolah yang telah memiliki guru sesuai standar sebesar 84,11%, (124.232 sekolah) dari total sekolah SD 124.707 sekolah. Sedangkan untuk sekolah SMP sekolah yang telah memiliki guru sesuai standar sebesar 41.42%, (15.404) sekolah) dari total sekolah SD 37.188 sekolah.

Jenjang	Jumlah Sekolah	SPM	%
SD	147,707	124,232	84.11
SMP	37,188	15,404	41.42
Dikdas	184,895	139,636	75.52

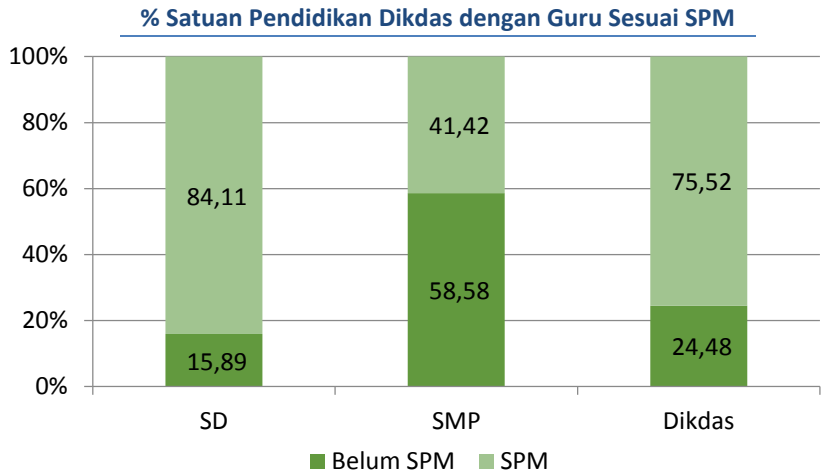

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa satuan pendidikan SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) guru untuk setiap satuan pendidikan, untuk daerah khusus 4 (empat) orang untuk satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan SD/MI minimal mempunyai 2 (dua) orang guru berkualifikasi S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik.

Pada satuan pendidikan SMP/MTs tersedia 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Selain itu,

satuan pendidikan SMP/MTs minimal tersedia guru berkualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah bersertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 40% dan 20%.

Untuk daerah perkotaan, pemenuhan guru sesuai SPM pada satuan pendidikan sebagian besar dapat terpenuhi dengan cukup baik. Namun hal itu berbeda untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dimana jumlah guru pada daerah 3T tersebut masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Pencapaian indikator tersebut di atas tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Kemendikbud. Guru menjadi wewenang pemerindah daerah, sehingga dengan mudahnya guru dapat dipindah tugaskan. Apabila perpindahan guru tersebut tidak berdasar dengan perhitungan kebutuhan guru maka akan terjadi ketidakmerataan sebaran guru di daerah. Kondisi tersebut pada guru penempatan daerah tertinggal yang dipindahkan ke kota.

Hambatan lain adalah tidak cepatnya respon pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan guru PNS di sekolah negeri karena keterbatas formasi CPNS. Kondisi tersebut menyebabkan kepala sekolah mengangkat guru honorer yang belum berstandar guru (berkualifkasi S1 dan bersertifikasi). Penambahan guru honorer tersebut dapat merubah capaian indikator.

Meskipun pemenuhan guru pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, Kemendikbud membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui program Guru Garis Depan (GGD) dan SM3T (Sarjana Mengajar di daerah 3T). GGD dan SM3T merupakan upaya pemerintah untuk meyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang paling membutuhkan. Khususnya untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Berbeda dengan program SM3T yang masa kerjanya setahun dan tak diangkat menjadi PNS, GGD ditugaskan menjadi guru permanen dan berstatus PNS di daerah penempatan. Pada tahun 2016, telah dipersiapkan formasi untuk 7000 orang GGD untuk ditempatkan di 93 kabupaten yang tersebar di 28 empat provinsi. Namun formasi yang akan terserap hanya 6.296. Sedang untuk SM3T dari kuota sebanyak 3000 terserap 2.996 orang. Untuk tahun 2017, melalui program GGD, Kemendikbud akan memberangkatkan sebanyak 3500 guru ke berbagai daerah 3T.

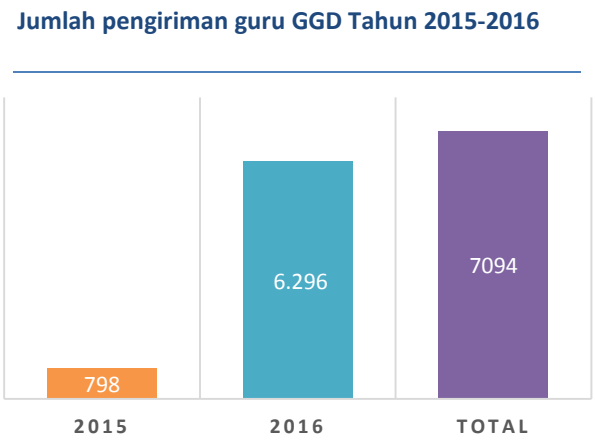

IKSS 9.3 "Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar" realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 persentase satuan pendidikan menengah yang memiliki jumlah guru sesuai standar baru mencapai 52,09%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 67%.

Berbeda dengan pendidikan dasar yang telah memiliki peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kemendikbud saat ini masih merancang SPM untuk pendidikan menengah. Sehingga dalam menghitung pencapaian indikator ini menggunakan aturan satuan pendidikan SMA/SMK tersedia 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran.

Sesuai rumusan tersebut, pada tahun 2016 satuan pendidikan menengah yang memiliki jumlah guru sesuai standar untuk SMA baru mencapai 55.28% atau 6.986 sekolah dari jumlah keseluruhan sekolah SMA sebanyak 12.637 sekolah; sedangkan untuk SMK baru mencapai 48,85% atau 6.071 sekolah dari jumlah keseluruhan sekolah SMK sebanyak 12.428 sekolah.

Jenjang	Jumlah Sekolah	Sesuai Standar	%
SMA	12,637	6,986	55.28
SMK	12,428	6,071	48.85
Dikmen	25,065	13,057	52.09

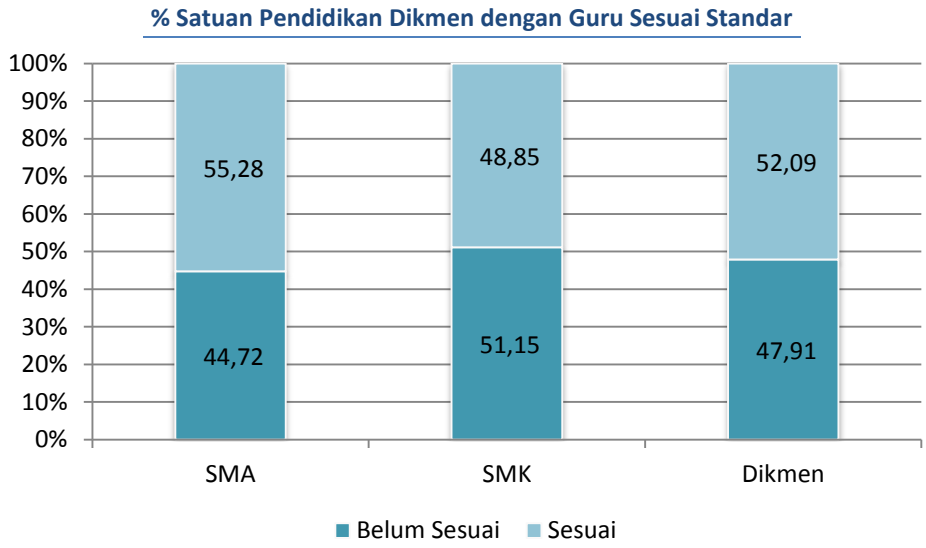

Permasalahan pemenuhan guru untuk jenjang pendidikan dasar tidak jauh berbeda dengan permasalahan pemenuhan guru untuk jenjang pendidikan menengah, dimana Kemendikbud tidak bisa sepenuhnya mengontrol pemenuhan guru di sekolah sesuai standar. Pada satu sisi Pemda dengan mudah melakukan pemindahan guru PNS, pada sisi lain sekolah dengan mudah mengangkat guru honorer untuk mengatasi kekurangan guru PNS.

Selain itu program vokasi yang dicanangkan oleh Presiden menyebabkan terjadi pertumbuhan jumlah sekolah SMK yang pesat. SMK tersebut menawarkan berbagai macam program keahlian. Pertumbuhan tersebut tidak dibarengi oleh ketersedian guru produktif yang memadai. Pada tahun 2016 ini Kemdikbud mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di SMK khususnya ada program Alih fungsi dari guru normative ke produktif untuk bidang

keahlian maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi dan rekayasa.

Mulai tahun 2017, pengelolaan guru pendidikan menengah diserahkan ke provinsi termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gurunya. Dalam kaitan tersebut Kemendikbud melakukan program untuk menyamakan presepsi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan guru dikmen di provinsi melalui workshop dan pendampingan. Sedang untuk melakukan pemenuhan kebutuhan guru di SMK khususnya ada program alih fungsi dari guru normative ke produktif untuk 4 bidang keahlian.

Kemendikbud berupaya terus meningkatkan jumlah sekolah menengah agar memiliki jumlah guru yang sesuai standar. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja guru antara lain dengan memberikan beasiswa kualifikasi guru agar seluruh guru khususnya pada sekolah menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

SS10 Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keempat yaitu peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter (T4).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga didukung melalui ketercapaian indikator kinerja "Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi".

Pada tahun 2016, Lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 181.836 lembaga/satuan pendidikan telah memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 60.836 dar tahun 2015. Untuk tahun 2015 sendiri jumlah tersebut baru mencapai 121.000.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	**121.000**	52.628	**60.836**	**116**

IKSS 10.1 "Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga" pada tahun 2016 tingkat realisasinya telah mencapai melampaui target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 52.628 lembaga/satuan pendidikan berhasil terealisasi sebanyak 60.836 lembaga/satuan pendidikan, dengan persentase capaian sebesar 116%.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini terlaksana dengan baik berkat adanya efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk menambah volume sasaran baru dengan hasil yang lebih merata dan maksimal. Selain dari itu keberhasilan capaian ini didukung oleh adanya program lanjutan dengan melibatkan 160 Dinas Pendidikan Kab/Kota di 34 Provinsi dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan keluarga pada 60.836 satuan pendidikan.

Pada tahun 2016, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas telah melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggarakan pendidikan keluarga kepada 10.400 lembaga/satuan pendidikan di 160 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Dengan rincian PAUD sebanyak 1800 lembaga; SD sebanyak 2400 lembaga; SMP sebanyak 1620 lembaga; SMA sebanyak 640 lembaga; SMK sebanyak 480 lembaga PKBM sebanyak 1000 lembaga; SLB sebanyak 60 lembaga, dan organisasi mitra sebanyak 2400 lembaga.

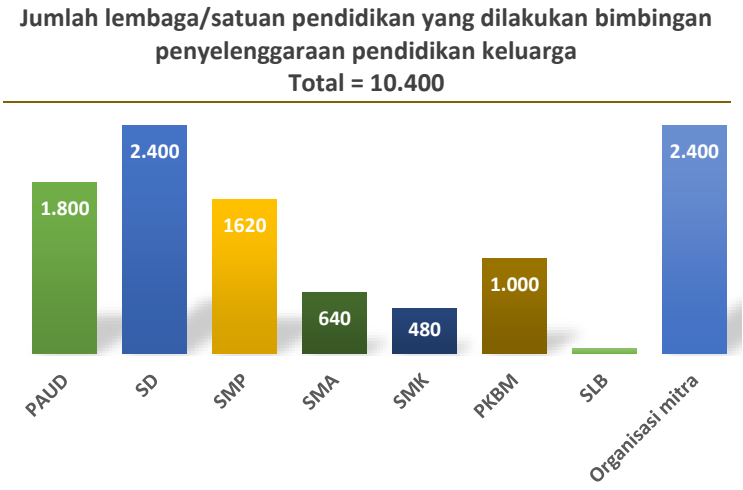

Selain melakukan bimbingan penyelenggaraan keluarga, Kemendikbud juga melakukan pemberian bantuan pendidikan keluarga pasca bencana. Kegiatan bantuan ini merupakan respons Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga untuk meringankan juga memulihkan lembaga/satuan pendidikan untuk dapat segera melakukan aktivitas pendidikan kembali setelah terkena musibah bencana.

Untuk tahun 2016, ada sebanyak 20 lembaga/satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan pendidikan pasca bencana meliputi tiga lembaga/satuan pendidikan di Purworejo, Jawa Tengah, 14 lembaga/satuan pendidikan di Garut, Jawa Barat, dan tiga lembaga/satuan pendidikan di

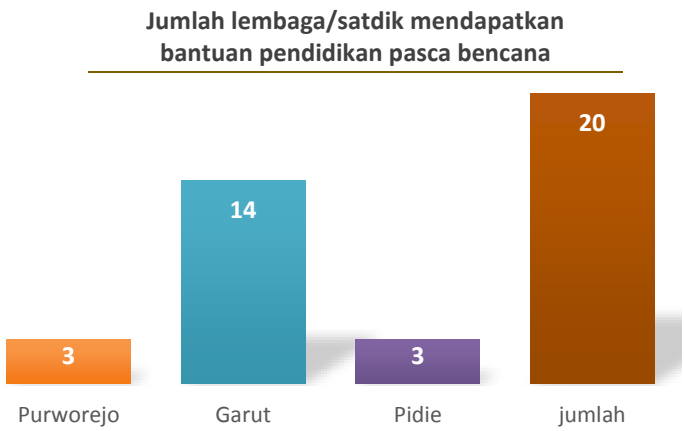

Pidie Jaya, Nangro Aceh Darussalam.

Selain dua kegiatan tersebut di atas, Kemendikbud juga melakukan penguatan pelaku pendidikan kepada 50.416 satuan pendidikan.

Kedepan yaitu Tahun 2017 telah disiapkan sosiasilasi Penguatan Pelaku Pendidikan Keluarga melalui agenda bimbingan lanjutan kepada 4.000 lembaga/satuan pendidikan sebagai tindak lanjut pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2017 termasuk di dalamnya satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) dan melalui dampak dari pembentukan kelompok kerja (POKJA) pendidikan keluarga pada 34 Provinsi, dan 160 kabupaten/kota terpilih yang telah menyelenggarakan pendidikan keluarga mulai tahun 2015.

SS11 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis kelima yaitu peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan (T5). Ketercapaian sasaran strategis ini didukung melalui ketercapaian indikator kinerja "Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional".

Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pemahaman dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masyarakat Indonesia masih dalam kategori menengah. Hal itu tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2016 yang baru mencapai 52,49 poin (skala 1-100). Semakin tinggi capaian angka IPK suatu wilayah mencerminkan semakin berhasilnya pembangunan bidang kebudayaan di wilayah tersebut. Pengukuran IPK dilakukan Kemendikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan. pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	Penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan baru akan dilakukan tahun 2016	34	**52,49**	**154**

IKSS 11.1 "Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional" realisasinya telah mencapai 52,49 poin (skala 1-100). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 34 poin maka target yang telah ditetapkan tersebut telah terlampaui.

Provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan IPK berkategori tinggi masing-masing 61,78 dan 61,65. Sedangkan IPK berkategori rendah berada di provinsi Papua (47,10), DKI Jakarta (48.30) dan Banten 48,78), Maluku Utara (48,79) dan Kalimantan Barat (49,26).

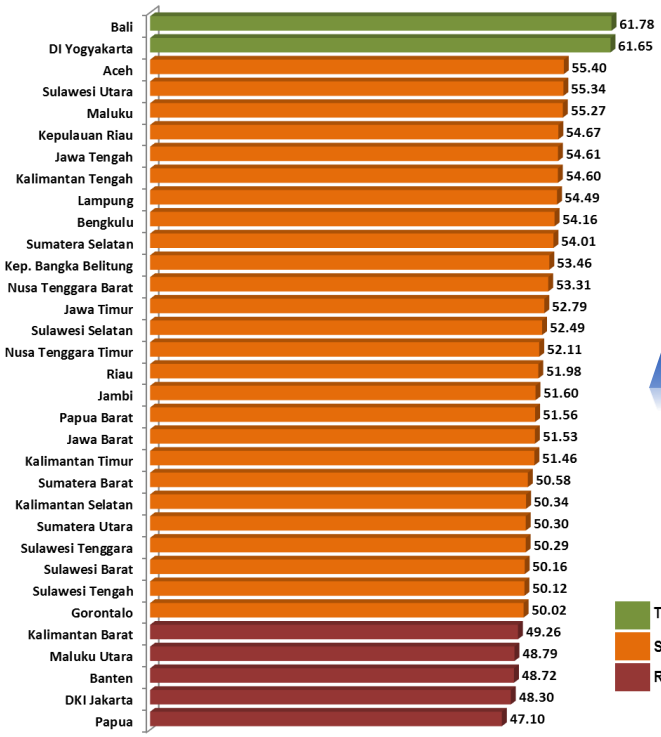

IPK : 52.49

Apabila di lihat dari masing-masing dimensi, maka profil IPK secara keseluruhan dapat ditunjukkan dalam 6 dimensi yang dapat dihitung berdasarkan hasil perhitungan tahun 2016 dalam grafik di bawah ini.

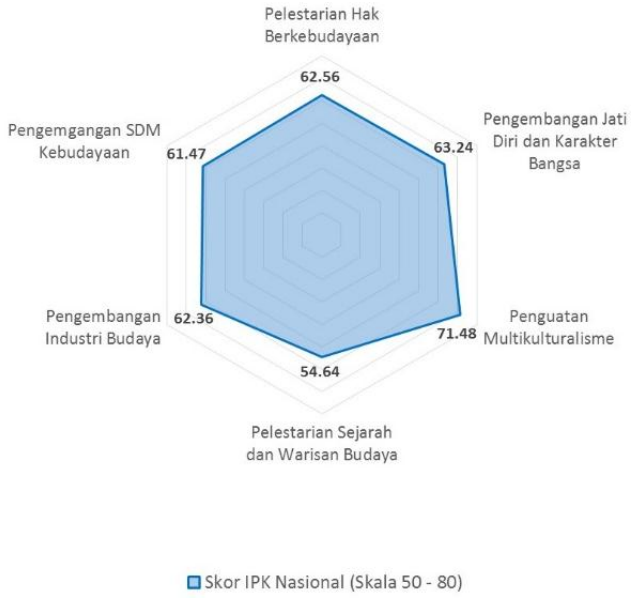

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara nasional, pembangunan bidang kebudayaan dalam aspek Pengembangan Jati Diri dan Karakter Bangsa (Dimensi 2) serta Penguatan Multikulturalisme (Dimensi 3) telah berjalan baik. Namun masih perlu usaha yang lebih optimal dalam hal pembangunan kebudayaan dalam aspek Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya (Dimensi 4), Pengembangan Industri Budaya (Dimensi 5), dan Pengembangan SDM Kebudayaan (Dimensi 7).

Berdasarkan hasil perhitungan angka IPK tersebut, dapat tersusun suatu simulasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan bidang kebudayaan, baik tingkat nasional (Direktorat Jenderal Kebudayaan), maupun di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah angka indeks yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan pada suatu titik waktu tertentu. Semakin tinggi capaian angka IPK suatu wilayah mencerminkan semakin berhasilnya pembangunan bidang kebudayaan di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Kebudayaan dirumuskan berdasarkan skor numerik dari enam dimensi dan indikator-indikator penyusunannya yang bisa mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan.

DIMENSI	INDIKATOR	No	INDIKATOR PROKSI 2015	SUMBER DATA
PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan formal	1	Persentase perempuan lulusan SLTA ke atas	SUSENAS KOR 2015
	Meningkatnya penggunaan hak berpolitik oleh penduduk	2	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada pilpres dan pileg (proporsi pengguna terhadap yang memiliki hak pilih)	SUSENAS HANSOS 2014: R.1304 & 1306
	Meningkatnya kepemilikan jaminan sosial dan kesehatan oleh penduduk	3	Persentase rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan)dan jaminan sosial	SUSENAS KOR 2015 : Blok VII R.7-8 Alternatif data dari BPJS
PENGEMBANGAN JATIDIRI DAN KARAKTER BANGSA	Meningkatnya apresiasi penduduk terhadap simbol-simbol jatidiri bangsa	4	Persentase rumah tengga yang mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus terakhir	SUSENAS MSBP 2015 : R.1604
		5	Persentase penduduk 5 tahun keatas yang bisa berbahasa Indonesia	Publikasi SP 2010
	Meningkatnya apresiasi penduduk terhadap karakter asli Indonesia	6	Persentase penduduk yang menggunakan pakaian tradisional dalam 3 bulan terakhir	SUSENAS MSBP 2015 : R.1605A
		7	Persentase desa yang masih memiliki kebiasaan gotong-royong	PODES 2014 : R.807

DIMENSI	INDIKATOR	No	INDIKATOR PROKSI 2015	SUMBER DATA
	Meningkatnya upaya pelestarian bahasa daerah	8	Persentase ART 5 th keatas yang menggunakan bahasa daerah (sebagai bahasa yang paling sering digunakan) di dalam rumah tangga maupun di lingkungan	SUSENAS MSBP 2015 : Blok XI R.1105-1106
	Meningkatnya partisipasi penduduk dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal	9	Persentase ART 10 th keatas yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan di lingkungan tempat tinggalnya dalam setahun terakhir	SUSENAS MSBP 2015 : Blok XIV R.1403
	Meningkatnya aktivitas penduduk dalam kehidupan beragama	10	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya dalam 3 bulan terakhir	SUSENAS MSBP 2015 : Blok XIV R.1405
PENGUATAN MULTIKULTURALISME	Meningkatnya jiwa toleransi penduduk terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suku/etnis lain dan atau agama lain	11	Persentase yang memiliki jiwa toleran terhadap suku/etnis dan atau agama lain	SUSENAS MSBP 2015 : R.1609-1610
PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA	Meningkatnya upaya pemerintah terhadap pelestarian sejarah dan warisan budaya tradisional	12	Tidak tersedia	
		13	Eselon tertinggi yang fokus/khusus membidangi kebudayaan	survei IPK Setditjen Kemdikbud 2015 : Blok I R.3 (semakain tinggi eselon,skor semakin tinggi
	Meningkatnya apresiasi penduduk terhadap peninggalan sejarah dan warisan budaya tradisional	14	Persentase penduduk 5 th keatas yang mengunjungi tempat bersejarah atau warisan budaya tradisional dalam setahun terakhir	SUSENAS MSBP 2015 : Blok XI R.1103
PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk budaya	15	Persentase penduduk 5 th keatas yang menonton/menikmati secara langsung event budaya	SUSENAS MSBP 2015 : Blok XI R.1104
	meningkatnya penyelenggaraan event budaya di lingkungan masyarakat	16	Persentase anggota rumah tangga yang pernah terlibat dalam pertunjukan/pameran seni	SUSENAS MSBP 2015 : R.1606A
PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA	Meningkatnya upaya pemerintah untuk mempromosikan budaya lokal	17	Tidak tersedia	
	meningkatnya upaya mempromosikan budaya asli Indonesia kepada bangsa lain	18	Tidak tersedia	

DIMENSI	INDIKATOR	No	INDIKATOR PROKSI 2015	SUMBER DATA
PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN	Meningkatnya minat penduduk terhadap profesi budaya tradisional	19	Rasio jumlah SDMK Aparatur per 100.000 penduduk	SDM Aparatur dari hasil pendataan SDMK 2012
	Meningkatnya kompetensi budaya para SDM kebudayaan yang ada di masyarakat	20	Rata-rata bimtek/diklat per SDMK Aparatur	SDM Aparatur dari hasil pendataan SDMK 2013
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	Berkembangnya prasarana budaya tradisional	21	Tidak tersedia	
	Berkembangnya sarana budaya tradisional	22	Tidak tersedia	

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara umum disusun dengan semangat awal untuk menggeser paradigma pembangunan kebudayaan di setiap negara (termasuk Indonesia), yaitu dari *Growth Development Model* yang berdasarkan pertimbangan ekonomi menjadi *Human Face Development* yang lebih berwajah manusiawi. Dalam tataran praktis, IPK merupakan *composite index* pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui secara cepat (*rapid assessment*) tentang posisi dan prestasi pembangunan bidang Kebudayaan dari tiap daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Manfaat Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah: untuk membandingkan kemajuan/perkembangan pembangunan bidang kebudayaan antar wilayah pada suatu titik waktu tertentu; membandingkan kemajuan/perkembangan pembangunan bidang kebudayaan suatu wilayah dari waktu ke waktu; informasi yang valid untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan kebudayaan sebagai ukuran kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

Penghitungan IPK tersebut masih menemui beberapa kendala yaitu tidak tersedianya data untuk Dimensi Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya, dengan indikator, meningkatnya upaya pemerintah terhadap pelestarian sejarah dan warisan budaya tradisional; Dimensi Penguatan Diplomasi Budaya, dengan indikator, meningkatnya upaya pemerintah untuk mempromosikan budaya lokal, dan meningkatnya upaya mempromosikan budaya asli Indonesia kepada bangsa lain; serta Dimensi Pengembangan Sarana dan Prasarana, dengan indokator, berkembangnya prasarana budaya tradisional, dan berkembangnya sarana budaya tradisional.

Kendala tersebut perlu dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penelitian kualitatif pada dimensi dan indikator terkait guna mendapatkan validitas hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional.

SS12 Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis kelima yaitu peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan (T5).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia didukung melalui melalui dua indikator kinerja, yaitu:

a. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA
b. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Sampai dengan tahun 2016 mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan skor literasi (kemampuan berbahasa) dalam penilaian PISA tahun 2015. Skor literasi pada tahun 2015 telah mencapai 397 meningkat satu poin dari tahun 2012 yaitu 396. Peringkat Indonesia untuk tahun 2015 meningkat sebanyak enam peringkat, yakni dari peringkat 71 pada tahun 2012 menjadi 64 pada tahun 2015.

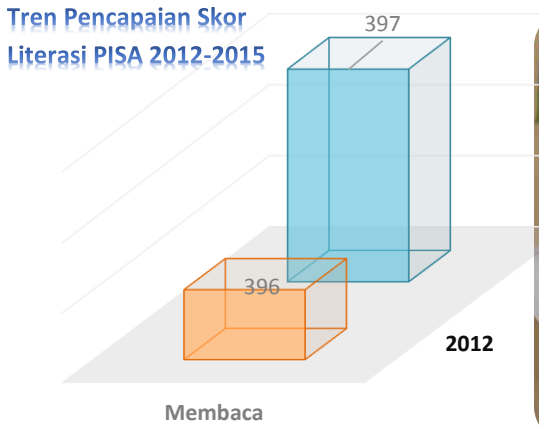

Seorang siswa sedang melakukan pembacaan puisi dalam acara Gerakan Literasi Nasional tahun 2016. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan literasi siswa

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	**397**	402	*	-
	2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK /SMKLB	**7,1 dan 6,7**	6,3 dan 6,8	7,1 dan 6,2	**113 dan 91**

** untuk tahun 2016 tidak dilakukan pengukuran PISA, Pengukuran PISA dilakukan 3 tahun sekali*

IKSS 12.1 "Kemampuan berbahasa dalam skor PISA" siswa baru mencapai skor 397 dari target yang ditetapkan sebesar 402, dengan persentase capaian sebesar 99%. Skor sebesar 397 tersebut diperoleh dari hasil publikasi *Organisation for Economic and Development* (OECD) untuk pengukuran tahun 2015. Untuk tahun 2016 sendiri pengukuran PISA tidak dilakukan. Perlu diketahui bahwa OECD melakukan pengukuran skor PISA tiga tahun sekali. *Programme for International Student Assessment* (PISA) merupakan program penilaian kompetensi siswa yang berbasis di Paris, Prancis merupakan sebuah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains yang diperuntukkan bagi siswa berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak diseluruh dunia. Tes ini berguna untuk memberikan informasi perbaikan sistem pendidikan.

Survei yang diadakan tiga tahun sekali ini mengambil sampel 236 sekolah di seluruh Indonesia dengan rentang usia pelajar antara 15 tahun sampai 15 tahun 11 bulan. Sebagian besar pelajar yang mengikuti survei berada di kelas 9 (54,51%) dan sisanya di kelas 10 (45,49%). Hal tersebut terjadi karena Indonesia menggunakan *regulasi late entrance* atau memulai pendidikan Sekolah Dasar di usia 7 tahun.

Hasil survei PISA 2015 yang dirilis pada 6 Desember 2016 lalu memperlihatkan bahwa kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 22,1 poin. Berdasarkan nilai mean, peningkatan nilai PISA Indonesia terjadi pada ketiga bidang kompetensi yang diujikan (matematika, sains, dan membaca). Peningkatan terbesar terdapat pada kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 2015. Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kendati tidak terlalu signifikan, pengukuran terhadap **kompetensi membaca juga memperlihatkan peningkatan, yakni dari 396 pada 2012 menjadi 397 poin pada 2015**. Sedangkan, berdasar nilai median, capaian membaca siswa Indonesia meningkat dari 337 poin di tahun 2012 menjadi 350 poin di tahun 2015.

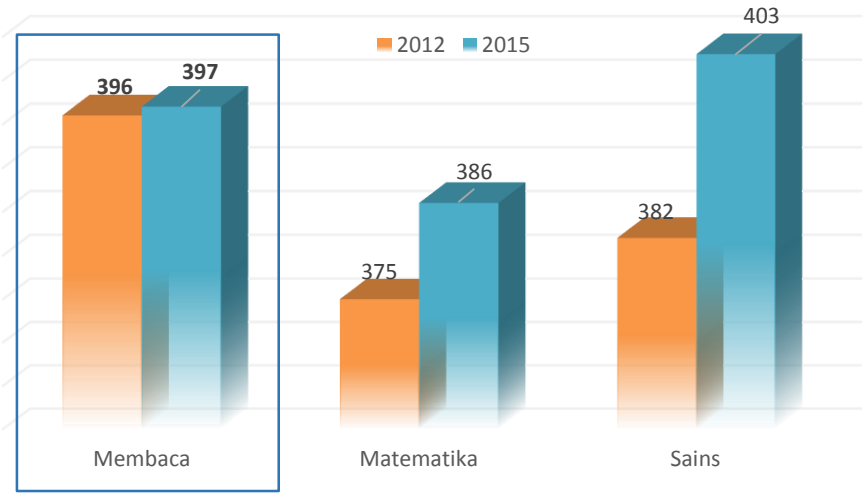

Tren Pencapaian PISA 2012-2015

Perlu diketahui pada tahun 2015, dari 72 negara, Indonesia ungul atas delapan negara yakni Brasil, Peru, Lebanon, Macedonia, Kosovo, Algeria, dan Dominika. Indonesia menjadi negara tercepat ke-4 dalam hal pencapaian murid secara menyeluruh yaitu sebesar 22.1 poin yang mencerminkan perbaikan sistem pendidikannya diantara 72 negara.

Peringkat dan capaian nilai PISA Indonesia untuk tahun 2015 meningkat enam peringkat dari peringkat ke-71 pada tahun 2012 menjadi peringkat ke-64 pada tahun 2015. Hasil survei 2015 tersebut yang dirilis pada 6 Desember 2016.

Kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. Sedangkan, berdasar nilai median, capaian membaca siswa Indonesia meningkat dari 337 poin di tahun 2012 menjadi 350 poin di tahun 2015.

SKOR RATA-RATA PRESTASI LITERASI MEMBACA UNTUK INDONESIA (PISA)

Tahun Studi	Mata Pelajaran	Skor Rata-Rata Indonesia	Skor Rata-Rata Internasional	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara Peserta
2000	**Membaca**	**371**	**500**	**39**	41
	Matematika	367	500	39	
	Sains	393	500	38	
2003	**Membaca**	**382**	**500**	**39**	40
	Matematika	360	500	38	
	Sains	395	500	38	
2006	**Membaca**	**393**	**500**	**48**	56
	Matematika	391	500	50	57
	Sains	393	500	50	
2009	**Membaca**	**402**	**500**	**57**	65
	Matematika	371	500	61	
	Sains	383	500	60	
2012	**Membaca**	**396**	**500**	**71**	**72**
	Matematika	375	500		
	Sains	382	500		
2015	**Membaca**	**397**	**500**	**64**	**72**
	Matematika	386	500		
	Sains	403	500		
2018	**Membaca**		**500**		???
	Matematika		500		
	Sains		500		

Kemendikbud terus berupaya meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa melalui program Gerakan literasi. Pelaksanaan gerakan literasi dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan kolaborasi diantara sesama pemangku kepentingan pendidikan. memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kemendikbud tahun ini merintis 31 Kampung Literasi pada lokasi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) yang dibina oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Jumlah tersebut akan terus berkembang ke daerah-daerah lain. Kampung Literasi tersebut adalah Aceh Utara, Samosir, Kota Padang, Bangka, Kota Bengkulu, Bandar Lampung, Kota Jambi, Pekan Baru, Pelembang, Lebak, Ciamis, Banyumas, Gunung Kidul, Pamekasan, Karangasem, Lombok Barat, Nunukan, Singkawang, Palangkaraya, Banjarbaru, Kota Samarinda, Kupang, Gorontalo, Manado, Polewali Mandar, Kota Kendari, Gowa, Ambon, Ternate, Lanny Jaya, Manokwari.

Selain itu program tersebut, Kemendikbud melalui Badan Bahasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung yang diharapkan dapat mendorong peningkatan skor PISA, terutama untuk prestasi berbahasa (membaca) siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, penyusunan kamus, penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia, peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia dan siswa, dan kajian-kajian kebahasaan dan kesastraan.

Beberapa capaian yang dihasilkan Badan Bahasa untuk mendukung peningkatan kemampuan berbahasa siswa antara lain: dihasilkannya sebanyak 34.784 hasil penelitian pengembangan bahasa dan sastra; meningkatkan jumlah pendidik yang memiliki kemahiran UKBI unggul kepada sebanyak 289 pendidik; membina 24.871 pendidik dalam penggunaan bahasa dan sastra; dihasilkannya sebanyak 200 bahan ajar kebahasaan dan kesastraan.

Selain itu, capaian kinerja lain yang dihasilkan antara lain penerbitan KBBI V dengan penambahan kosakata sebanyak 17.952 lema, penyediaan bahan bacaan pengayaan dalam Gerakan Literasi Bangsa sebanyak 173 buku bacaan, pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 4.212 tenaga pendidik, dan pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri sebanyak 74 orang.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Kemendikbud melalui Badan bahasa melakukan beberapa kegiatan antara lain:

a. melakukan pengembangan bahasa dan sastra, seperti penyusunan kamus pelajar, kamus bidang ilmu, kajian-kajian kebahasaan dan kesastraan terkait pemelajaran sehingga meningkatkan jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra;
b. mengintensifkan pelatihan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) bagi guru sehingga jumlah guru yang memegang predikat kemahiran UKBI unggul meningkat;
c. meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan penyuluhan bahasa dan sastra sehingga dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pendidik yang penggunaan bahasa dan sastra terbina; dan
d. melakukan penyusunan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan bagi siswa dan guru sehingga ketersediaan jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan meningkat. Secara khusus, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong meningkatnya kompetensi berbahasa (membaca) siswa dan guru.

Secara umum, Badan Bahasa tidak menemui kendala berat dalam memenuhi ketercapaian target kinerja yang ditetapkan untuk tiap indikator kinerja. Target kinerja yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, ketercapaian target kinerja ini belum dapat dipastikan mampu menunjang peningkatan skor PISA tahun 2016 ini sebanyak 399 sebagaimana yang ditargetkan. Sebab, penilaian PISA yang dikoordinasi oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dilaksanakan 3 tahun sekali dan baru diketahui nilainya pada tahun 2018. Badan Bahasa berharap ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatannya dapat memberi andil dan daya dukung pada peningkatan kemampuan berbahasa dalam skor PISA tahun 2015/2016 ini.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang dilakukan, seperti penyusunan kamus, bahan ajar bahasa Indonesia, peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia dan siswa, dan kajian-kajian kebahasaan dan kesastraan. Secara umum,

dalam pencapaian target kinerja, Badan Bahasa tidak mengalami kendala. Target kinerja yang sudah ditetapkan dalam sasaran program yang didukung oleh indikator kinerja program dapat terealisasi dengan baik.

Pada satu sisi, pengukuran skor PISA dilakukan 3 tahun sekali. Sementara, pada sisi lain, tiap tahun progres pencapaian skor PISA harus disampaikan demi memenuhi tuntutan Renstra Kemendikbud. Untuk mengatasi persoalan disparitas capaian ini, Badan Bahasa menetapkan target per tahun, yang pada akhirnya menargetkan tercapainya skor kemampuan berbahasa sebesar 414 pada tahun 2019. Dengan demikian, yang dalam hal ini tiap tahun diperlukan laporan tentang progres pencapaian skor PISA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

	SKOR RATA-RATA PRESTASI LITERASI MEMBACA UNTUK INDONESIA (PISA)					
	Tahun Pengukuran					
	2012	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Skor	**396**	**397**	399	402	414	414

Perlu dijelaskan bahwa skor 399 dan 402 pada tahun pengukuran 2016 dan 2017 adalah semu. Skor tersebut merupakan target-bayangan (*pseudo-target*) yang penetapannya dilakukan hanya untuk memenuhi laporan tentang progres pencapaian skor PISA tiap tahun. Pada hakikatnya, skor 399 dan 402 tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan adanya progres yang harus dicapai tiap tahun. Bagaimana pun juga, skor PISA baru dapat diketahui pada tahun 2019 yang pengukurannya dilaksanakan pada tahun 2018.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator **"Kemampuan berbahasa dalam skor PISA"** jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2016 target kinerjanya adalah sebesar 399 sebagai target-bayangan. Untuk mencapai jumlah indikator kinerja tersebut, Badan Bahasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung yang diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan skor PISA, terutama untuk prestasi berbahasa (membaca) siswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah, antara lain penyusunan kamus, penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia, peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia dan siswa, dan kajian-kajian kebahasaan dan kesastraan. Secara umum, Badan Bahasa tidak menemui kendala berat dalam memenuhi ketercapaian target kinerja yang ditetapkan untuk tiap indikator kinerja. Target kinerja yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. **Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas, target kinerja ini tidak dapat dipastikan karena pengukuran baru akan dilakukan pada tahun 2018.** Sebab, penilaian PISA yang dikoordinasi oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dilaksanakan 3 tahun sekali dan baru diketahui nilainya pada tahun 2018. Namun, bagaimana pun juga, Badan Bahasa bertekad agar ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatannya dapat memberi andil dan daya dukung terhadap peningkatan kemampuan berbahasa dalam skor PISA tahun yang akan dilakukan pada tahun 2018 nanti.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang dilakukan, seperti penyusunan kamus, bahan ajar bahasa Indonesia, peningkatan kompetensi guru

bahasa Indonesia dan siswa, dan kajian-kajian kebahasaan dan kesastraan. Sebagaimana sudah dijelaskan, cukup berhasilnya pelaksanaan program prioritas melalui, antara lain, pengayaan kosakata dan penyediaan bahan bacaan pengayaan literasi diharapkan berdampak positif pada upaya pencapaian meningkatnya skor PISA pada tahun 2019.

Ada dua kendala yang dapat diidentifikasi dalam hal peningkatan skor PISA. Pertama adalah lokus pengukuran. Selama ini, Badan Bahasa kurang optimal membangun koordinasi dengan OECD dan Tim PISA Indonesia sehingga sasaran dan lokasi pengukuran PISA tidak diketahui. Kedua adalah materi pengukuran. Berbeda dari materi-materi umum yang terdapat di dalam kurikulum sekolah dan materi-materi pemelajaran lainnya, materi yang diujikan dalam pengukuran PISA memiliki kekhasan teknis tersendiri. Dari berbagai aspek dan dimensi, antara materi pengukuran skor PISA dengan materi pemelajaran umum sangat berbeda. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada tahun 2017 ini, Badan Bahasa sudah mempersiapkan strategi khusus untuk mengitensifkan upaya-upaya peningkatan skor PISA. Antara lain adalah berfokus pada lokus pengukuran PISA, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat, dan menyusun bahan bacaan yang berorientasi pada materi dan substansi mengikuti tuntutan materi pengukuran skor PISA.

IKSS 12.2 "Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB" untuk tahun 2016 realisasinya mencapai target yang khususnya untuk jenjang SMP/SMPLB sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah realisasinya belum mencapai target. Untuk jenjang SMP, nilai UN untuk mata pelajaran bahasa Indonesia telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dari target yang ditetapkan sebesar 6,3 berhasil tercapai sebesar 7,1 dengan persentase capaian sebesar 113%. Berbeda dengan jenjang SMP, nilai UN jenjang Sekolah menengah belum dapat mencapai target yang ditetapkan, dari target sebesar 6,8, baru terealisasi sebesar 6,2 dengan persentase capaian sebesar 91%. Berikut rincian nilai UN untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tahun 2015-2016.

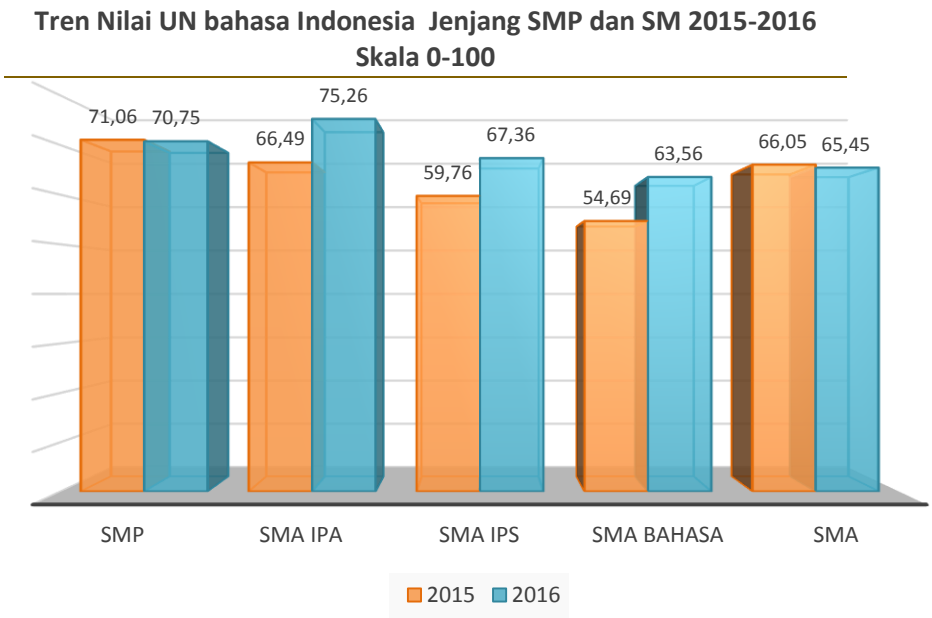

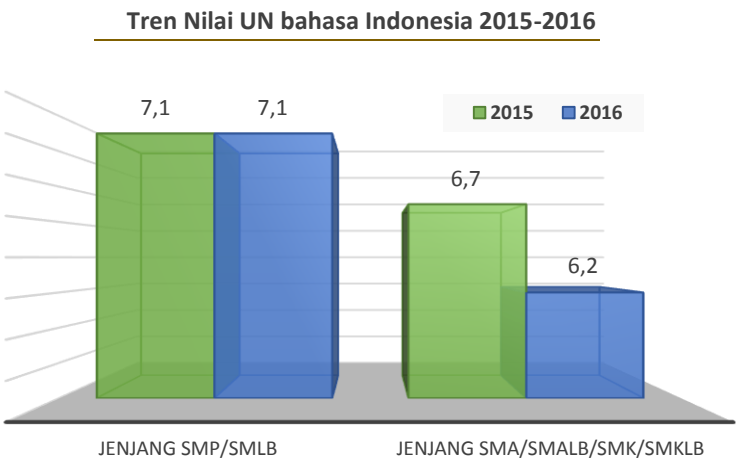

Jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun 2015, untuk capaian target kinerja nilai UN Bahasa Indonesia tingkat menengah pertama tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan (stabil) yaitu terlihat dari capaian target kinerja mencapai 7,1 pada tahun 2016. Sedangkan untuk nilai UN Bahasa Indonesia tingkat menengah atas terjadi penurunan sebesar 0,5 poin, dari sebelumnya 6,7 di tahun 2015 menjadi 6,2 di tahun 2016.

Beberapa hal yang kemungkinan menyebabkan nilai rata-rata UN mata pelajaran mengalami penurunan antara lain:

1. Kebijakan terkait dengan hasil UN tidak dijadikan sebagai faktor penentu kelulusan dari satuan pendidikan berakibat pada motivasi peserta didik cenderung menurun.
2. IIUN pada tahun 2016 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa nilai UN yang diperoleh lebih objektif atau menggambarkan kemampuan sebenarnya, sedangkan nilai yang diperoleh pada tahun sebelumnya sebagian kurang objektif.
3. Kebijakan UN tahun 2016 menggunakan *blue print* atau kisi-kisi yang lebih luas (general), sedangkan pada tahun sebelumnya menggunakan kisi-kisi yang sangat rinci atau detil per indikator, sehingga sebagian besar sekolah yang terbiasa melakukan *"drilling"* dan *"narrowing curriculum"* mengalami penurunan capaian nilai UN.
4. Pendekatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 ada perbedaan prinsip jika dibandingkan pendekatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2006, sedangkan soal-soal UN menggunakan irisan dari kedua kurikulum tersebut. Dengan demikian terjadi hal yang kurang sinkron pada sekolah yang berbasis K-2013.
5. Pada UN 2016, terjadi peningkatan jumlah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat lebih tinggi (*Higher Order Thinking Skills – HOTS*), dimana sebagian besar sekolah belum terbiasa melakukan penilaian dengan jenis soal tersebut.

Kemendikbud melalui Badan Bahasa, terus berupaya meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia khususnya siswa SMP dan Sekolah Menengah. Untuk itu, Badan Bahasa menjalankan beberapa program/kegiatan seperti bengkel bahasa dan sastra, Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis (GIMM), gerakan literasi, pelatihan menulis naskah dan puisi, musikalisasi puisi, gerakan cinta bahasa Indonesia dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sasarannya adalah siswa. Pada tahun 2016, Badan Bahasa telah melayani pengembangan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat sebanyak 580.842 orang. Dengan kemahiran berbahasa Indonesia pada siswa tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi sehingga nilai UN bahasa Indonesia dapat meningkat.

Melihat adanya tren penurunan nilai UN bahasa Indonesia khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah, Badan Bahasa memandang perlu untuk menambah jumlah dan cakupan sasaran atau memperluas pelibatan publik sehingga dapat mendorong peningkatan kompetensi bahasa Indonesia siswa tingkat menengah atas, lebih dioptimalkan lagi program-program terkait kesastraan dan kebahasaan yang telah dijalankan seperti literasi sekolah dan penyiapan bahan-bahan literasi untuk siswa dan guru.

SS13 Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis kelima yaitu peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan (T5).

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN didukung melalui ketercapaian dua indikator kinerja, yaitu:

a. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya;
b. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia.

Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean menunjukkan peningkatan peran. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikannya. Peningkatan tersebut jumlah terlihat dari banyaknya penutur non Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia di kawasan Asean.

Sampai dengan tahun 2016 sudah ada tujuh negara Asean yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikannya. Ketujuh negara tersebut antara lain Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sedangkan jumlah penutur non Indoensia yang menggunakan bahasa bahasa Indoensia telah mencapai 5.448 orang.

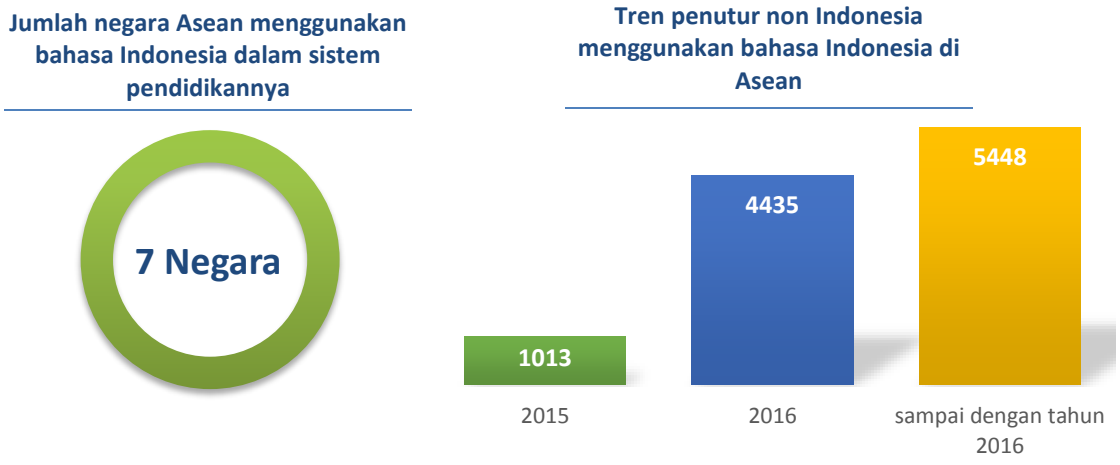

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	**3**	3	**4**	**133**
	2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	**1.013**	1.310	**4.435**	**339**

Mendikbud berfoto bersama tenaga pengajar BIPA untuk luar negeri

IKSS 13.1 "Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya" untuk tahun 2016 mencapai empat negara. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu tiga negara, realisasi tersebut telah melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 133%.

Terlampauinya capaian target tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016. Selain itu, Badan Bahasa terus menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Negara Asean dan kerja sama dengan lembaga-lembaga kebahasaan di tingkat Asean.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya pada tahun 2015 mencapai 3 negara (Singapura, Vietnam, dan Thaliand), sedangkan pada tahun 2016 capaian kinerjanya mencapai 4 negara (Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos) terdapat capaian sebesar 133%. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan program prioritas "Pengiriman Tenaga Pengajar BIPA sebanyak 80 Orang" dan adanya permintaan yang intensif dari negara tujuan.

Kerja sama dan kemitraan yang terjalin pada tahun 2015 antara Badan Bahasa dengan tiga negara Asean yaitu (Singapura, Vietnam, dan Thaliand). Sedangkan pada tahun 2016, kemitraan yang dijalin bertambah 4 negara yaitu (Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean.

Universitas Khon Khaen, Thailand merupakan salah satu universitas yang mengajarkan bahasa Indoensia

Peningkatan jumlah negara Asean yang memasukkan pengajaran bahasa Indonesia ke dalam sistem pendidikannya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui Badan Bahasa untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean. Melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Bahasa membuka ruang kerja sama dan kemitraan baru dengan sejumlah negara Asean. Bahkan, tidak hanya berawal dari inisiatif kerja sama dan kemitraan baru, pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke negara Asean didorong oleh adanya permintaan langsung dari negara-negara yang bersangkutan agar mereka dikirimkan tenaga-tenaga pengajar bahasa Indonesia.

Perlunya membuka akses yang lebih luas dan adanya permintaan langsung dari negara Asean terkait menjadi jalur utama yang dilalui Badan Bahasa guna memasukkan pelajaran bahasa Indonesia ke dalam sistem pendidikan nasional negara Asean terkait. Bahkan, adanya permintaan langsung dari negara Asean terkait semakin memberi akses bagi Badan Bahasa untuk melakukan banyak hal lainnya, seperti fasilitasi penutur bahasa Indonesia, Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), pengiriman duta bahasa Indonesia ke negara Asean, dan peningkatan kerja sama dengan lembaga kebahasaan di tingkat Asean.

Ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami antara lain adalah faktor perbedaan agenda dan jadwal pelaksanaan pendidikan antara negara tujuan dengan negara Republik Indonesia. Kendala lainnya yang juga memerlukan perhatian khusus adalah penyiapan tenaga pengajar dan pengiriman tenaga pengajar yang jumlahnya jauh lebih besar secara sendirian, menimbulkan persoalan tersendiri. Dengan pengertian lain, upaya perekrutan tenaga pengajar BIPA yang andal dan profesional menjadi permasalahan lain yang pada tahun-tahun ke depan perlu memperoleh persiapan khusus.

Hambatan dan permasalahan tersebut tentunya perlu diantisipasi agar pelaksanaan kegiatan yang serupa berikutnya tidak terjadi lagi atau dapat diminimalisasi. Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipatif yang diambil adalah (1) dengan mendorong upaya kerja sama yang lebih dini dan intensif, terutama untuk menyesuaikan agenda dan jadwal dengan negara tujuan dan (2) dengan melakukan perekrutan calon tenaga pengajar BIPA yang lebih dini dan matang sehingga dapat bersinergi dengan permintaan tenaga pengajar BIPA dari negara tujuan.

IKSS 13.2 "Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia" realisasi pada tahun 2016 berhasil mencapai 4.435 penutur. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 1.310, realisasi tersebut telah melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 339%.

Jumlah tersebut merupakan rekapitulasi jumlah pemelajar BIPA yang telah terfasilitasi dalam program pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri. Capaian sebanyak 4.435 tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah pengajar yang dikirim keluar negeri pada tahun 2016. Berikut persebaran penutur bahasa Indonesia di negara Asean.

No.	NEGARA SASARAN	JUMLAH PENGAJAR	JUMLAH PENUTUR
1.	Thailand	26	3.524
2.	Singapura	1	25
3.	Vietnam	2	153
4.	Filipina	3	126
5.	Kamboja	4	296
6.	Myanmar	2	50
7.	Laos	2	261
		Jumlah	**4.435**

Seorang Pengajar sedang memberikan pelajaran bahasa Indoensia bagi penutur asing pada sebuah sekolah di luar negeri

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian 2016 mengalami peningkatan yang pesat. Jika pada tahun 2015 hanya ada 1013 penutur non Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia, maka pada tahun 2016 bertambah 4.435 orang. Terjadi peningkatan sebesar 3422 orang. Jadi sampai dengan tahun 2016 sudah ada sebanyak 5.448 penutur non Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia.

Selain peningkatan jumlah akses di kawasan Asean, Kemendikbud melalui Badan Bahasa juga menargetkan penutur asing dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah, antara lain, penyelenggaraan uji kemahiran bahasa Indonesia bagi penutur asing (UKBIPA) di sejumlah negara Asean, sebagai tambahan dari pengiriman tenaga pengajar BIPA yang dilakukan ke berbagai negara Asean. Upaya untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran secara mandiri di negara terkait juga digalakkan. Permintaan untuk penyelenggaran UKBIPA di negara Asean sangat tinggi. Upaya yang dilakukan Badan Bahasa dapat ditegaskan bahkan melampaui capaian yang ditargetkan.

SS14 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud

Dalam penyelenggaraan negara, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mengedepankan asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kemendikbud berkomitmen untuk terus meningkatkan penyelenggaraan negara yang baik melalui peningkatan akuntabiltas kinerja.

Sasaran strategis ini ditetapkan guna mendukung terwujudnya tujuan strategis keenam yaitu peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (T6). Tingkat ketercapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur melalui indikator kinerja "Skor LAKIP".

Akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2016 menunjukkan peningkatan. Peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut tercermin dari diperolehnya **kategori/predikat "BB" dengan nilai sebesar 75,78** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan diperolehnya kategori/predikat "BB" tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menunjukkan hasil yang baik.

Peringkat akuntabilitas kinerja Kemendikbud 2006-2016

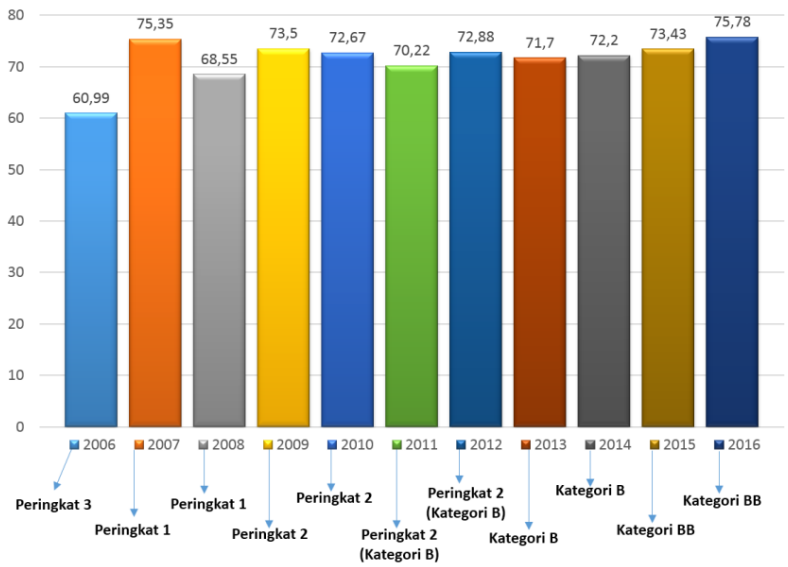

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Skor LAKIP yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	**73,43 (BB)**	75	**75,78**	**101**

Tahun 2016 Kemendikbud memperoleh Predikat BB, peringkat 10 dari 86 K/L

Pada tahun 2016, tingkat pencapaian **IKSS 14.1 "Skor SAKIP"** telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Dari target skor yang ditetapkan sebesar 75 poin, berhasil terealisasi sebesar 75,78 poin, dengan persentase capaian sebesar 101%.

Pada tahun 2016, Kemendikbud berhasil memperoleh kategori/predikat akuntabilitas kinerja "BB" dengan nilai 75,78 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai tersebut meningkat 2,35 poin dari nilai tahun 2015. Pada tahun 2015, Kemendikbud baru berhasil

memperoleh kategori/predikat akuntabilitas kinerja "BB" dengan nilai 73,43 poin. Dengan diperolehnya kategori/predikat "BB" mengandung arti bahwa akuntabilitas kinerja Kemendikbud sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Nilai akuntabilitas kinerja tersebut merupakan akumulasi dari komponen penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebesar 80% dan komponen capaian kinerja sebesar 20%. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Berikut rincian nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud selama dua tahun terakhir.

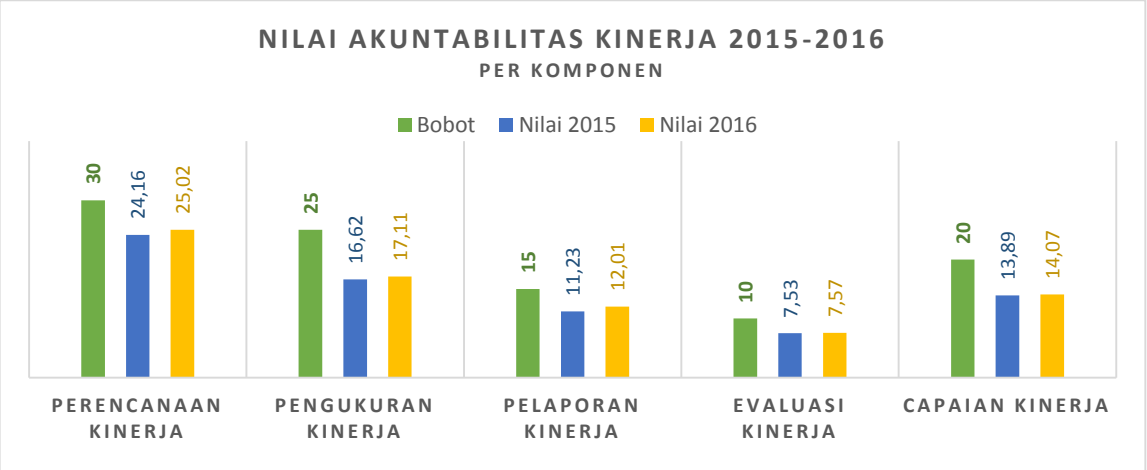

Dibandingkan nilai tahun 2015, pada tahun 2016 nilai seluruh komponen penilaian mengalami peningkatan. Komponen perencanaan kinerja meningkat sebesar 0.86 poin, komponen pengukuran kinerja meningkat 0,49 poin, komponen pelaporan kinerja meningkat 0,78 poin, komponen evaluasi kinerja meningkat 0,04 poin, dan komponen capaian kinerja meningkat 0,18 poin. Komponen perencanaan kinerja menjadi komponen dengan peningkatan nilai tertinggi sedangkan komponen evaluasi kinerja menjadi komponen dengan peningkatan nilai terkecil.

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2016, beberapa kelemahan/permasalahan yang dihadapi Kemendikbud dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

1. *Casscading* kinerja dari tingkat kementerian sampai dengan tingkat unit kerja terkecil yang belum tergambar secara optimal;
2. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja yang belum berjalan secara optimal dan berkala, terutama pada unit kerja yang ada;
3. Analisis kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum tajam;
4. Masih banyak perjanjian kinerja pada level unit kerja mandiri yang belum ditandatangani, hal ini menjadi hambatan dan penyusunan laporan kinerja di level unit kerja mandiri;
5. Laporan kinerja belum dimanfaakan secara optimal oleh pimpinan unit kerja.

Melihat kelemahan/permasalahan tersebut, Kemendikbud telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan agar akuntabilitas kinerja dapat meningkat di masa datang, beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan *casscading* indikator kinerja mulai dari tingkat kementerian sampai pada unit pelaksana teknis yang akan dikoordinasikan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
2. Melakukan optimalisasi pengunakan aplikasi sistem pengukuran kinerja *(eperformance)* yang telah dibangun pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud;
3. Melakukan pengembangan aplikasi *eperformance* agar aplikasi yang telah dibuat dapat terintegrasi dengan aplikasi perencanaan *(e-planning)*
4. Mewajibkan unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri untuk menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
5. Mewajibkan adanya penandatangan perjanjian kinerja atas dana dekonsentrasi yang telah diberikan Kemendikbud kepada SKPD di daerah;
6. Membuat dan melaksanakan rencana aksi pencapaian kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan;
7. melakukan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja melalui pendampingan/asistensi penyusunan Rencana strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan LAKIP kepala seluruh unit kerja dengan melibatkan Kemenpan dan RB;
8. terus meningkatkan kualitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja internal, dengan meningkatkan kompetensi evaluator dan koordinasi baik antara Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

SS15 Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pengelolaan keuangan yang akuntabel tingkat pencapaiannya diukur dari opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk memperoleh opini WTP, pengelolaan keuangan instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keenam yaitu peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (T6). Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja "Laporan Keuangan Kemendikbud".

Kemendikbud memperoleh Opini WTP tiga kali berturut-turut (2013, 2014, dan 2015)

Tahun 2016 opini atas Laporan Keuangan Kemendikbud belum dapat diketahui tingkat capaiannya, hal tersebut dikarenakan BPK belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 Kemendikbud berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2015 tersebut, maka dapat dipastikan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dapat dipertahankan dengan baik.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis "dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	**WTP**	WTP	**WTP**	**100**

Tingkat capaian realisasi **IKSS 15.1 Laporan Keuangan Kemendikbud** untuk tahun 2016 belum dapat diketahui tingkat realisasinya. Hal ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga. BPK baru akan mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2016 pada tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2015, Kemendikbud berhasil memperoleh opini WTP kembali. Dengan capaian tersebut, Kemendikbud berhasil mempertahankan opini WTP yang berhasil diperoleh dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2013.

Tercapainya opini WTP, tidak terlepas dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendikbud, Inspektorat Jenderal secara rutin melakukan reviu terhadap laporan Keuangan Kemendikbud termasuk mengawal laporan keuangan dari setiap unit utama.

Meskipun telah berhasil memperoleh opini WTP, Kemendikbud masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangannya. Untuk mengatasi hal tersebut BPK memberikan rekomendasi yang perlu dilaksanakan. Rekomendasi tersebut terkait dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penataan dan pengamanan aset.

Tahun 2015 penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan untuk penyampaian Laporan Keuangan tahun 2016 Ke Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari 2017.

Beberapa upaya yang dilakukan Kemendikbud dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP antara lain:

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemendikbud mulai dari pimpinan sampai dengan staf;
2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan;
6. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja baik pusat maupun di daerah yang dilakukan oleh Setjen, Itjen dan BPKP;
7. Menyelesaikan revaluasi aset dan meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan aset tetap sehingga penyajian aset tetap memadai;
8. Penertiban BMN melalui inventarisasi, validasi, dan pengklasifikasian BMN;
9. Pendampingan penyusunan dan riveu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka penjaminan mutu Laporan Keuangan;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan dan BMN;
11. Meningkatkan sistem pengelolaan PNPB. Untuk tahun 2016 telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Meningkatkan sistem pengendalian belanja sehingga permasalahan kegiatan yang terindikasi fiktif dan tidak di dukung bukti yang valid dapat dihindari;
13. Penetapan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Setjen, Itjen dan PAUDNI;
14. Pembentukan Unit Pelayanan Gratifikasi di Inspektorat JenderaI;
15. Penerapan sistem pembayaran transaksi virtual di lingkungan Kemendikbud, yaitu transaksi keuangan menggunakan transaksi virtual *(cashless)* dengan meminimalkan pembayaran tunai pada seluruh kegiatan;
16. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan terus mendorong untuk lebih terbuka, lebih efektif, lebih akuntabel, serta memberikan ruang bagi pelibatan publik;
17. Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat, audit khusus, temuan internal dan eksternal;
18. Melakukan audit khusus tujuan tertentu untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
19. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Berikut rekapitulasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan trahun 2015-2016.

Pemeriksaan	2015		2016	
	Tinjut Rekomendasi	Tinjut Keuangan	Tinjut Rekomendasi	Tinjut Keuangan
BPK-RI	68,34%	58,40%	67%	71%
BPKP	77,41%	72%	80%	72%
ITJEN	68,89%	66%	79,33%	82%

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Penyelesaian/tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum tuntas;
2. Permasalahan pengelolaan aset dan inventarisasi BMN belum optimal;
3. Aplikasi SAIBA dari Kementerian Keuangan belum sepenuhnya berjalan sempurna sehingga menghambat dalam penyusunan Laporan Keuangan;
4. Keterbatasan auditor Inspektorat Jenderal yang bersertifikat. Saat ini jumlah auditor Inspektorat Jenderal 272 orang, namun yang sudah bersertifikasi standar internasional baru 19 orang, yaitu 9 orang bersertifikat ahli kecurangan *(Certified Fraud Auditor)* dan 10 orang bersertifikat ahli audit internal *(Qualified Internal Auditor)*. Pada tahun 2015 ini sedang berlangsung proses sertifikasi ahli audit internal (QIA) terhadap 22 orang auditor. Dengan keterbatasan SDM auditor tersebut, maka secara langsung akan berimplikasi pada mutu audit yang belum sempurna. Audit belum dapat merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah organisasi Kemendikbud. Audit yang dilakukan saat ini sebagian besar masih menerapkan pola audit operasional yang menekankan pada 3 E (ekonomis, efisien, efektif) belum menyentuh aspek perbaikan sistem tata kelola.
5. Cakupan sasaran audit sangat besar dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, ke depan masih perlu diterapkan metodologi audit berbasis risiko secara konsisten sehingga audit yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan berorientasi mutu.

SS16 Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis keenam yaitu peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (T6). Pelibatan publik sangat diperlukan dalam memperbaiki tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelibatan publik dibutuhkan untuk mengawal kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang diambil. Kemendikbud terus berkomitmen melibatkan publik dalam gerakan pendidikan guna memperkuat efektifitas pendidikan nasional.

Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan didukung melalui ketercapaian indikator kinerja "Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud".

Pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayan setiap tahun menunjukkan tren meningkat.

Peningkatan tersebut terlihat dari indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Indeks Kepuasan pelayanan di Kemendikbud telah mencapai 75.19 poin dengan kategori "sangat baik".

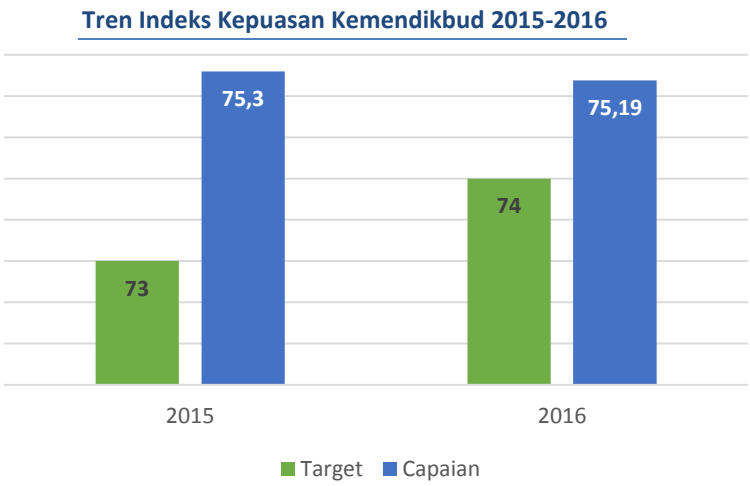

Pada tahun 2016, Kemendikbud berhasil mendapatkan Anugerah Predikat Kepatuhan dalam Pelayanan Publik dari Ombudsmen RI. Kemendikbud berada di peringkat 9 dari 25 kementerian yang masuk dalam zona hijau (nilai tinggi), yaitu kementerian/lembaga yang memiliki nilai kepatuhan antara 81-100. Kemendikbud berhasil memperoleh nilai 93,10 atas penilaian terhadap kepatuhan dalam pelayanan publik.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap kementerian/lembaga dalam menjalankan pelayanan publik. Penghargaan tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu Kategori Kementerian dan Lembaga, dan Kategori Pemerintah Daerah.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	**75,3**	74	**75,19**	**101,6**

IKSS 16.1 "Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud" untuk tahun 2016 realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Indeks kepuasan tersebut telah mencapai 75,19 poin dari target yang ditetapkan sebesar 74 poin, dengan persentase capaian sebesar 101,61%. Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi, angka indeks sebesar 75,19 masuk dalam kategori 'sangat baik'.

Indeks sebesar 75,19 merupakan indeks keseluruhan dari layanan bidang pendidikan dan kebudayaan. Indeks layanan pendidikan sendiri sebesar 77,52 untuk internal dan 76,63 untuk eksternal sedangkan untuk indeks layanan kebudayaan sebesar 74,72 untuk internal dan 71,90 untuk eksternal. Berikut rincian indeks untuk bidang pendidikan dan kebudayaan.

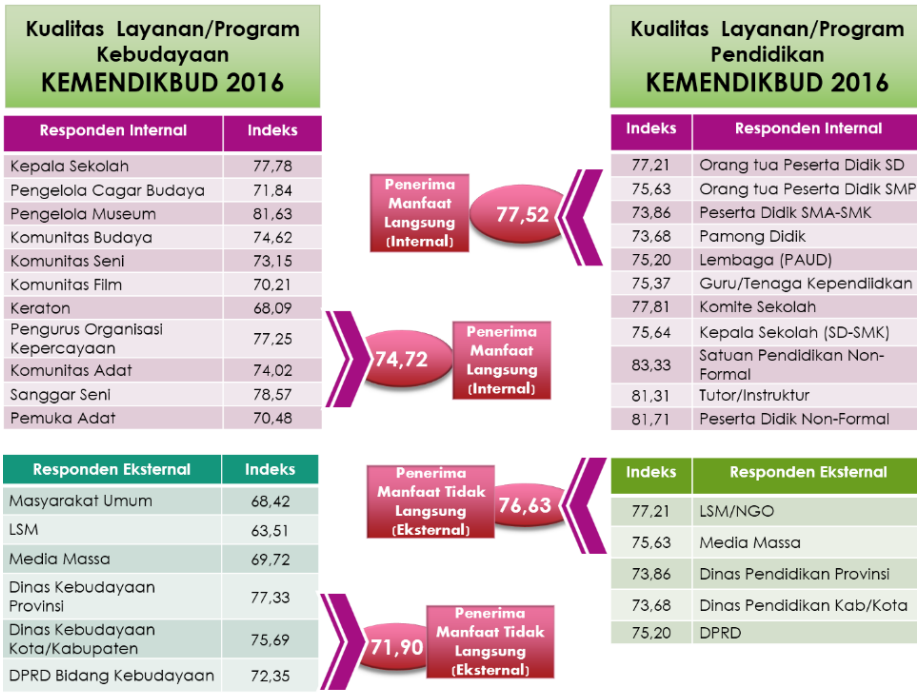

Tingginya Indeks kepuasan Kemendikbud pada tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa program yang diberhasil dijalankan diantaranya: 1) Unit Layanan Terpadu (ULT) yang telah dibuat Kemendikbud telah memberikan layanan yang memuaskan terhadap pemangku kepentingan, 2) meningkatnya pelayanan/program Kemendikbud seperti program pengembangan karir dan kepangkatan guru dan Penyebarluasan informasi dan sosialisasi program/kebijakan baik melalui media cetak, elektronik dan media sosial, telah dilakukan secara maksimal terhadap pemangku kepentingan, 3) penyempurnaan kurikulum pendidikan, 4) peningkatan kinerja kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

Pengukuran indeks dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan Kemendikbud terhadap prgram dan kebijakan yang telah dijalankan. Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei terhadap pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan baik internal maupun eksternal dengan jumlah responden 12.223 (responden bidang pendidikan berjumlah 10.847 dan responden bidang pendidikan berjumlah 1398) di 34 Provinsi. Berikut daftar responden yang digunakan untuk mengukur Indeks kepuasan di Kemendikbud.

BIDANG PENDIDIKAN			
INTERNAL	**STAKEHOLDERS KEMENDIKBUD**	**EKSTERNAL**	**STAKEHOLDERS KEMENDIKBUD**
	Pendidikan Anak Usia Dini 1. Peserta PAUD (diwakili orang tuanya) 2. Pamong belajar pendidikan non formal &informal 3. Peserta, pelaksana, dan lembaga PAUDNI (PKBM, Kursus dan SKB)		1. LSM/NGO/Mitra Pendidikan 2. Media massa (wartawan bidang pendidikan) 3. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota 4. DPR/DPRD (Komisi bidang pendidikan, Komisi X/E)
	Pendidikan dasar 1. Peserta Didik SD-SMP (diwakili orang tua)		

	2. Pendidik, Pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan SD-SMP 3. Komite Sekolah SD-SMP 4. Manajemen/Pengelola SD-SMP swasta		
	Pendidikan Menegah 1. Peserta Didik SMA 2. Pendidik, Pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan SMA 3. Komite Sekolah SMA 4. Manajemen/Pengelola SMA swasta		
	Pendidikan Kejuruan 1. Peserta Didik SMK 2. Pendidik, Pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan SMK 3. Komite Sekolah SMK 4. Manajemen/Pengelola SMK swasta		

BIDANG KEBUDAYAAN			
INTERNAL	**STAKEHOLDERS KEMENDIKBUD** 1. Kepala sekolah SD, SMP dan SMA 2. Pengelola situs atau cagar budaya 3. Masyarakat umum 4. Pengelola dan pelaku seni di taman budaya 5. Komunitas budaya 6. Komunitas seni 7. Komunitas film 8. Keraton 9. Pengurus organisasi kepercayaan 10. Komunitas adat 11. Sanggar seni dan budaya 12. Pemuka adat	**EKSTERNAL**	**STAKEHOLDERS KEMENDIKBUD** 1. LSM/NGO/Mitra Kebudayaan 2. Media massa (wartawan bidang kebudayaan) 3. Dinas kebudayaan provinsi/kab/kota 4. DPR/DPRD (Komisi bidang pendidikan, Komisi X/E)

Parameter survey digunakan untuk mengukur indeks kepuasan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan terdiri dari sembilan parameter sesuai Perman PAN Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014. Tiga belas parameter pada layanan bidang pendidikan dan Sepuluh parameter pada bidang kebudayaan. Parameter biaya/tarif dari Permen PAN RB tersebut tidak dijadikan alat ukur sehubungan dengan layanan Kemendikbud adalah layanan yang bebas biaya. Alat ukur parameter indeks kepuasaan pemangku kepentingan sebagai berikut :

Permen PAN RB No.16/2014	**Layanan Bidang Pendidikan**	**Layanan Bidang Kebudayaan**
1. *Persyaratan* 2. *Prosedur* 3. *Waktu Pelaksanaan* 4. *Biaya/Tarif* 5. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan* 6. *Kompetensi Pelaksana* 7. *Perilaku Pelaksana* 8. *Maklumat Pelayanan* 9. *Penanganan Pengaduan*	1. Kurikulum 2. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 3. Sertifikasi guru 4. Pengembangan karir dan kepangkatan guru 5. Tunjangan profesi guru 6. Program Indonesia Pintar 7. Ujian Nasional 8. Pendidikan Keluarga (Kemitraan antara	1. Revitalisasi cagar budaya dan permuseuman 2. Pemeliharaan cagar budaya 3. Registrasi cagar budaya 4. Revitalisasi taman budaya 5. Fasilitasi kegiatan budaya 6. Bansos komunitas budaya 7. Revitalisasi desa adat 8. Kemah budaya (pramuka) dan kemah perbatasan 9. Warisan budaya beda dan

	keluarga dan sekolah) 9. Block Grant sarana dan prasarana pendidikan 10. Reformasi Birokrasi Kemendikbud 11. Pendidikan kecakapan kerja unggulan 12. Pendidikan kecakapan kerja 13. Pendidikan kecakapan kewirausahaan	takbenda yang sudah mendapatkan pengakuan dunia dan dinominasikan 10. Pencatatan warisan budaya tak benda nasional

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dengan indeks sebesar 75,3 poin, capaian tahun 2016 terjadi koreksi sebanyak 0,11 poin. Koreksi Indeks sebesar 0,11 tersebut antara lain dikarenakan: 1) Target program PIP belum tepat sasaran, penyaluran dana PIP sering terjadi keterlambatan, prosedur pengajuan PIP masih sulit dipahami, adanya kartu PIP yang tidak sampai ke alamat penerima, 2) kurangnya sarana dan prasarana pendukung UN, 3) pencairan tunjangan profesi guru sering terlambat, 4) revitalisasi cagar budaya dan permuseuman serta taman budaya belum sepenuhnya dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan lainnya, 5) Pencatatan warisan budaya takbenda nasional belum dilakukan secara optimal.

Terjadinya koreksi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dimungkinkan diakibatkan parameter yang digunakan dalam survey berbeda. Pada tahun 2015, survey berfokus pada pengukuran atas dampak dari layanan yang diberikan Kemendikbud sedangkan pada survey tahun 2016 pengukuran difokuskan untuk mengukur layanan yang diberikan. Perbedaan metode pengukuran survey ini karena sesuai dengan program dan kebijakan yang digunakan.

Dengan penuh keramahan, petugas ULT sedang melayani masyarakat. ULT merupakan unit yang dibuat khusus untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayan yang ada di Kemendikbud.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA tahun 2016 sebesar Rp43.605.863.439.000. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp3.925.485.699.000 mengalami *selfblocking*, sehingga total pagu yang dapat digunakan Kemendikbud menjadi Rp39.680.377.740.000. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian enam belas sasaran strategis dengan 45 indikator kinerjanya yang terdistribusi ke dalam delapan program pendidikan dan kebudayaan.

Grafik di bawah ini menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan Kemendikbud.

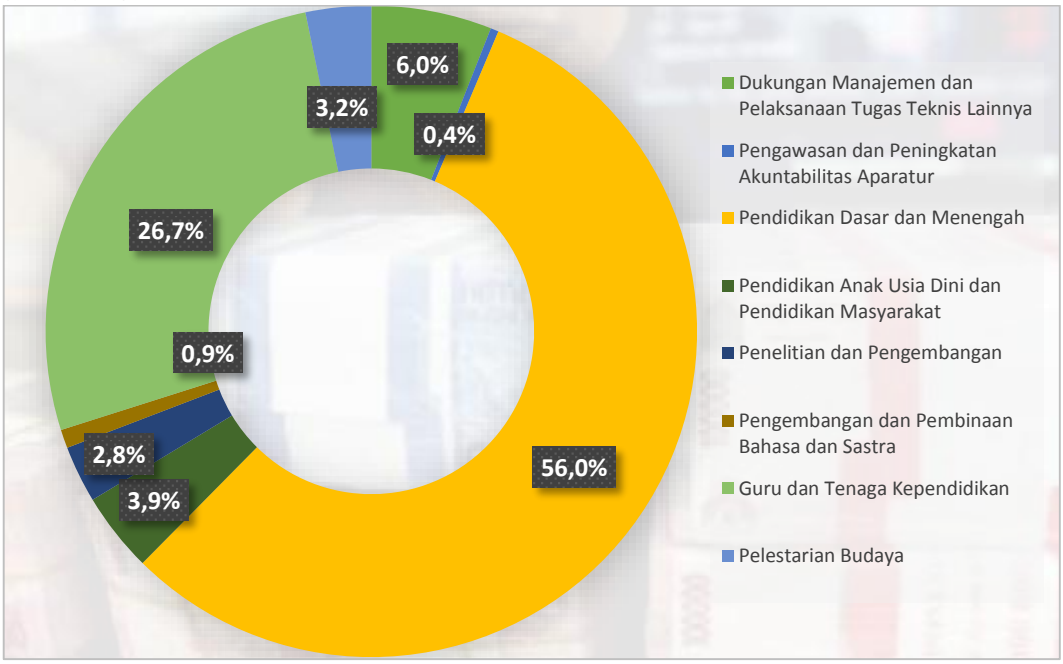

Anggaran terbesar masing-masing dialokasikan untuk membiayai program pendidikan dasar dan menengah yaitu sebesar 56% dan program guru dan tenaga kependidikan sebesar 26,7%. Untuk program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar 6%; program pelestarian budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 3,2%; program penelitian dan pengembangan mendapat alokasi anggaran 2,8%; program pengembangan dan pembinaan bahasa mendapat alokasi anggaran sebesar 0,9%; program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar 6%; dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar 0,4%.

Berikut tabel alokasi anggaran tahun 2016 pada delapan program Kemendikbud.

Nama Program	Pagu	Pagu Setelah Blokir
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.603.949.701.000	2.373.530.869.000
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	166.550.467.000	158.444.066.000
3. Pendidikan Dasar dan Menengah	24.195.401.503.000	22.227.892.303.000

Nama Program	Pagu	Pagu Setelah Blokir
4. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.826.883.710.000	1.566.872.238.000
5. Penelitian dan Pengembangan	1.253.314.938.000	1.123.628.256.000
6. Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	415.666.040.000	365.946.633.000
7. Guru dan Tenaga Kependidikan	11.596.822.351.000	10.575.782.217.000
8. Pelestarian Budaya	1.547.274.729.000	1.288.281.158.000

Dari total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp43.605.863.439.000, ada *self blocking* sebesar Rp3.925.485.699.000, sehingga pagu Kemendikbud setelah *selfblocking* menjadi Rp39.680.377.740.000. Dari pagu anggaran Rp39.680.377.740.000 telah berhasil terserap sebesar Rp38.554.662.130.586 sehingga persentase daya serap Kemendikbud untuk tahun 2016 adalah sebesar 97,16% setelah *selfblocking,* atau 88,42% dari pagu awal.

Berikut grafik daya serap anggaran tahun 2016 pada delapan program yang dilaksanakan oleh delapan unit utama di lingkungan Kemendikbud.

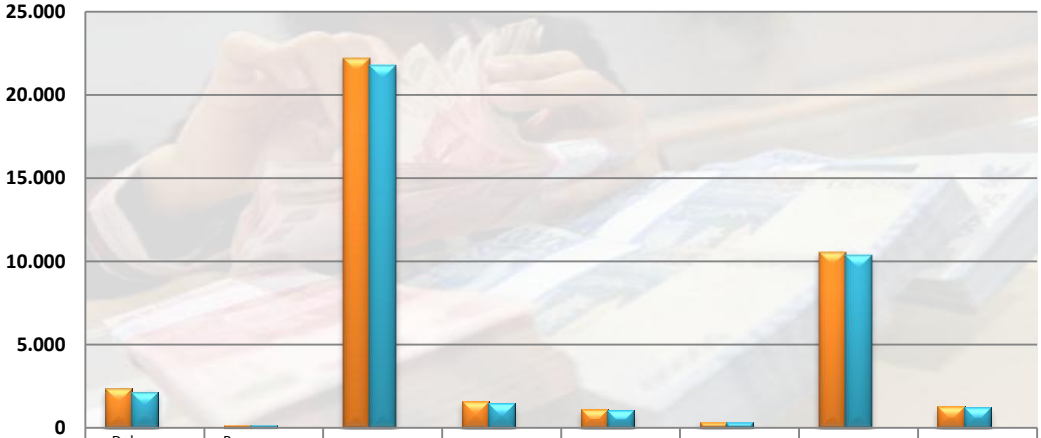

	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Pendidikan Dasar dan Menengah	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Guru dan Tenaga Kependidikan	Pelestarian Budaya
Pagu	2.373.530.869.0	158.444.066.000	22.227.892.303.	1.566.872.238.0	1.123.628.256.0	365.946.633.000	10.575.782.217.	1.288.281.158.0
Realisasi	2.159.070.165.0	139.319.200.043	21.787.109.129.	1.473.019.025.3	1.070.743.267.0	323.451.680.095	10.381.090.068.	1.220.859.595.2
%	90,96	87,93	98,02	94,01	95,29	88,39	98,16	94,77

Mendikbud Bapak Muhadjir Effendy sedang memberikan penghargaan kepada satker dengan pengelolaan keuangan dan SAKIP terbaik tahun 2016 di lingkungan Kemendikbud

Efisiensi anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tantang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Penddapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, seluruh Kementerian/lembaga agar melakukan penghematan penggunaan anggaran. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5.626.936.035.000, sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan No. S-377/MK.02/2016. Selain itu, Kemendikbud juga diminta untuk menghemat anggaran sebesar Rp3.925.485.699.000 pada APBN-P tahun 2016 melalui blokir mandiri *(self blocking)*.

Sumber penghematan anggaran terutama berasal dari penghematan belanja honorarium, perjalanan dinas honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, operasional perkantoran lainnya, peralatan kantor, pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Sedangkan untuk program prioritas seperti rehab sekolah dan pembangunan sekolah atau kelas baru tidak dilakukan penghematan.

Strategi efisiensi anggaran yang dilakukan dengan penggunaan anggaran tahun 2016 lebih kepada pengurangan volume, yaitu dengan cara volumenya dikecilkan sebagian sehingga kegiatan masih tetap berjalan. Beberapa sumber penghematan meliputi biaya operasional non gaji (belanja langganan daya, jasa dan pemeliharaan lainnya), pembangunan gedung baru (yang masih diblokir karena moratorium), pengadaan tanah baru, perjalanan dinas yang tidak terkait dengan kegiatan prioritas, jasa konsultan dan jasa profesi, belanja barang non infrastruktur termasuk kendaraan yang belum terkontrak, dan bantuan pembangunan sarana pendidikan dan peralatan pendidikan yang diserahkan kepada masyarakat/daerah yang jika dikurangi tidak menimbulkan gejolak sosial.

C. CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN

Sejumlah siswa melakukan aksi teatrikal perjuangan Panglima Jenderal Sudirman saat perang gerilnya melawan Belanda. Dengan kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan pelajar

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Salah satu isi nawacita yang akan dicapai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah 'Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan'. Untuk merealisasikan janji tersebut, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, menugaskan Kemendikbud untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Menindaklanjuti tugas yang diamanatkan tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.

Program PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun. Secara umum, PIP yang dijalan memiliki empat tujuan:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
3. Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja

PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6-21 tahun dengan prioritas antara lain:

1. Peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Peserta dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan pertimbangan khusus;
   - Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
   - Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
   - Peserta didik berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial;
   - Peserta didik terkena dampak bencana alam;
   - Peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah;

- Peserta didik mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
- Peserta pada lembaga kursus dan satuan pendidikan nonformal

3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

KIP sendiri merupakan kartu penanda identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan PIP apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Besaran dana PIP adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.

Berikut rincian target dan realisasi siswa penerima PIP dan realisasi pembagian KIP pada tahun 2016.

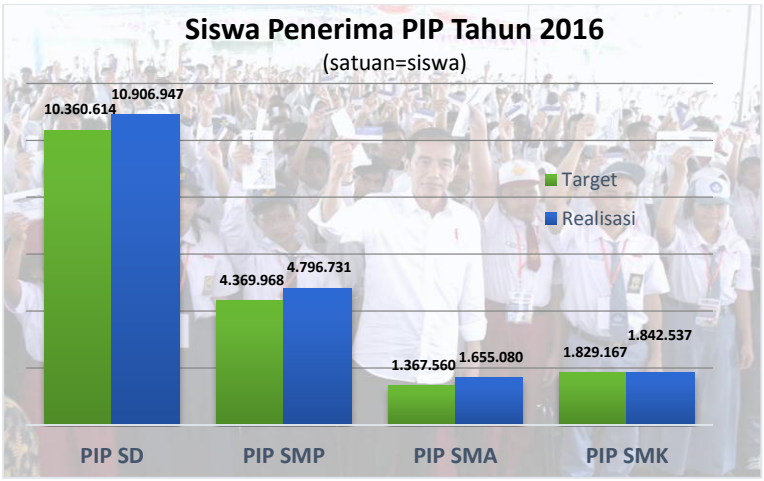

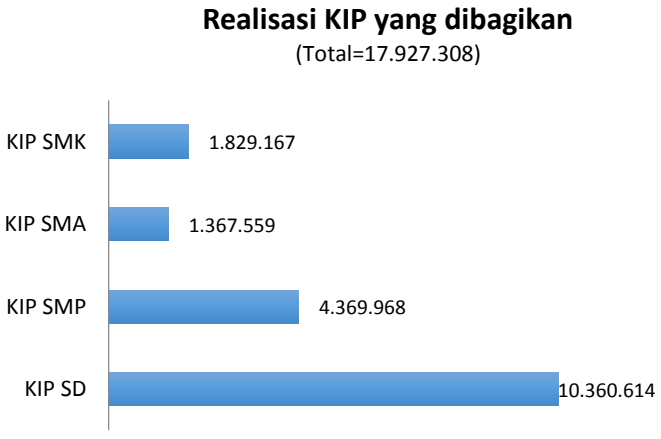

Sedangkan alokasi anggaran PIP pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Alokasi Anggaran PIP tahun 2016

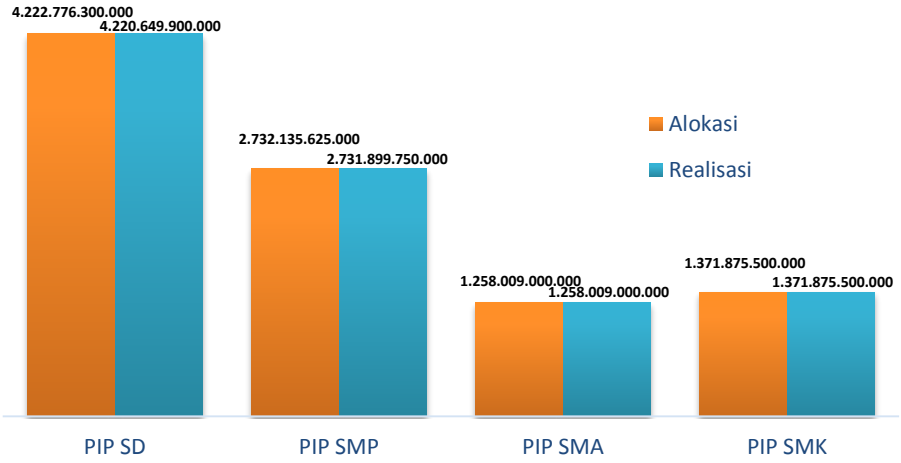

Selain Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mensukseskan PIP juga didukung dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 8.286 orang peserta didik kursus dan pelatihan yang diusulkan menjadi penerima bantuan PIP. Jumlah ini meningkat dibandingkan usulan tahun 2015 sebanyak 3.084 orang. Keberhasilan tersebut didukung melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) maupun peserta didik kursus reguler yang diajukan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Dalam rangka pengiriman dan penyaluran PIP terdapat beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Luasnya wilayah dan sulitnya akses untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala utama dalam pengiriman dan penyaluran KIP;
2. Adanya penerima KIP yang pindah alamat atau alamatnya tidak diketahui juga menyulitkan pendistribusian KIP;
3. Tidak sinkronnya data.

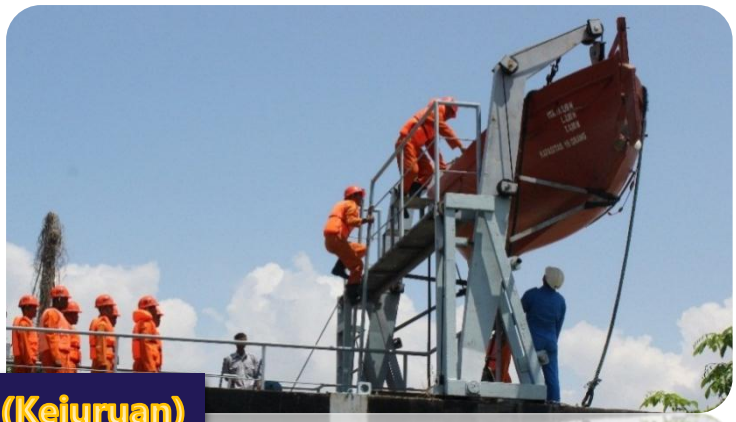

2. Program Vokasi (Kejuruan)

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan mengintruksikan agar Kementerian/Lembaga terkait agar melakukan revitalisasi pendidikan SMK. Hal itu untuk menjawab kebutuhan proyeksi perekonomian Indonesia ke depan. Selain itu, revitalisasi SMK diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan regional dan global seperti pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan setiap warga negara siap bersaing dengan warga negara lain.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kemendikbud menjadikan Program Vokasi (kejuruan) menjadi program unggulan yang dilaksanakan di tahun 2016. Berbagai persiapan baik infrastruktur, kurikulum dan tenaga pengajar disiapkan Kemendikbud.

Untuk tahun 2016, kemendikbud memberikan bantuan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan kepada 142 SMK yang bergerak di bidang pertanian (agrobisnis dan agroteknologi), maritim/kelautan, dan pariwisata. Untuk mendukung pencapaian program vokasi tersebut, Kemendikbud juga telah mengembangkan 350 SMK rujukan di tahun 2016. SMK rujukan memiliki siswa lebih dari 1000 siswa. SMK rujukan dibangun agar bisa menjadi model dan membina SMK regular (jumlah siswa sebanyak 600-1000), SMK aliansi (jumlah siswa 200-600), dan SMK konsorsium (jumlah siswa kurang dari 200).

Keahlian Ganda

Keberhasilan program vokasi tidak terlepas dari kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di SMK. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menindaklanjutinya dengan melaksanakan Program Keahlian Ganda pada jenjang pendidikan menengah. Program Alih Fungsi Guru yang dimaksud adalah program pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu yang masih relevan dengan latar belakang pendidikannya.

Program ini memberikan kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA dilakukan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola "ON-1 IN-1 ON-2 dan IN-2" dan diakhiri dengan sertifikasi keahlian di

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikat keahlian dan sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di LPTK untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sasaran paket keahlian yang menjadi tujuan program alih fungsi adalah 51 paket keahlian yang dikelompokkan ke dalam bidang maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi dan rekayasa.

Sasaran total jumlah guru yang akan mengikuti Program Keahlian Ganda adalah 30.000 guru yang dibagi ke dalam 2 (dua) tahapan pelaksanaan, tahun 2016 sejumlah 15.000 orang dan 2017 sejumlah 15.000 orang. Tercatat 16.487 guru mendaftar program keahlian ganda secara online. Kemudian tersaring sebanyak 15.170 guru calon peserta program keahlian ganda yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun sebanyak 998 guru mengundurkan diri sehingga hanya 12.827 guru yang mengikuti pembekalan dan menandatangani pakta integritas. Sejumlah 12.827 guru tersebut akan melanjutkan tahap lanjutan dari program keahlian ganda pada tahun 2017. Dari 51 paket keahlian yang dibuka, ada dua paket keahlian yang tidak memiliki pendaftar yaitu Budidaya Rumput Laut dan Teknik Pendingin dan Tata Udara.

Dukungan keberhasilan program vokasi juga datang dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dukungan tersebut melalui Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Melalui pendidikan kecakapan kerja, telah diberikan pendidikan kecakapan kerja kepada angkatan kerja muda sebanyak 55.837 orang pada tahun 2016. Meningkat dari tahun 2015 yang hanya 4000 orang. Selain itu, juga diberikan pendidikan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha bagi angkatan kerja muda sebanyak 19.990 orang pada tahun 2016.

3. Program Pendidikan Karakter (PPK)

Salah satu butir Nawacita Presiden Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Joko Widodo membuat Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Menindaklanjuti program tersebut Kemendikbud melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa dan olah raga. Tujuan program Penguatan Pendidikan Karakter adalah menanamkan nilai-nilai

pembentukan karakter bangsa ke secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang akan menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut dalam pendidikan karakter bangsa tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas. Dalam pelaksanaan program PPK, Kemendikbud menfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.** PKK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA/SMK.

Implementasi PKK dilakukan baik di lingkungan Sekolah maupun dikeluarga/di lingkungan. Pada lingkungan sekolah PKK dilakukan melalui kegiatan pembiasaan (memulai hari dengan Upacara/Apel, menyanyikan lagu nasional/daerah, doa bersama, membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran), kegiatan Intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.

Untuk tahun 2016, Kemendikbud telah memilih 542 sekolah untuk pelaksanaan PPK. Pelaksanaan tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 21 sekolah SD dan 21 sekolah SMP, sedangkan tahap kedua 250 sekolah SD dan 250 sekolah SMP.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program penguatan pendidikan karakter tersebut, Kemendikbud melakukan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan komite sekolah terkait program penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar, prinsip implementasi, dan strategi penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Pada tahun 2016 program dilakukan dalam skala kecil hanya melingkupi 42 sekolah dengan melibatkan sasaran peserta sebanyak 221 orang yang tersebut di 37 Kab/Kota.

Keberhasilan program PPK tersebut juga didukung dengan membangun kebudayaan yaitu dengan meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya. Beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tersebut diantaranya : persemaian nilai budaya, belajar bersama maestro, seniman masuk sekolah, lawatan sejarah nasional, kemah budaya nasional, dan jejak tradisi nasional. untuk tahun 2016, sebanyak 17.000 siswa mengikuti persemaian nilai budaya sebagai penguatan karakter bangsa, 149 siswa mengikuti program belajar bersama maestro, 1.400 siswa mengikuti program seniman masuk sekolah, 200 siswa mengikuti program lawatan sejarah nasional, 528 siswa mengikuti kemah budaya nasional, dan 180 siswa mengikuti program jejak tradisi nasional.

Dalam rangka penguatan karakter melalui kebudayaan, pada tahun 2016, Kemendikbud melakukan revitalisasi 20 museum, pembangunan 7 museum, revitalisasi 6 cagar budaya dan 3 taman budaya, dan pembangunan 4 laboratorium seni budaya dan film.

Terkait dengan memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal, pada tahun 2016 telah dilakukan revitalisasi 139 desa adat, fasilitasi komunitas budaya kepada 348 komunitas budaya, fasilitasi alat kesenian di 200 sekolah, revitalisasi 4 seni yang hampir punah, penetapan 12 cagar budaya peringkat nasional, penetapan 150 warisan budaya tak benda nasional.

Untuk mendukung program pendidikan karakter, Inspektorat Jenderal Kemendikbud melaksanakan Gerakan Anti Korupsi di satuan pendidikan. Gerakan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilakukan melalui internalisasi pencegahan korupsi kepada kepala sekolah dan guru baik negeri maupun swasta. Tahun 2016, sebanyak 1860 dari target 1980 kepala sekolah dan guru di 30 provinsi di Indonesia mengikuti program tersebut.

Tujuan internalisasi pencegahan korupsi tahun 2016 kepada kepala sekolah dan guru:

a. menyampaikan tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
b. memberikan pemahaman tentang gratifikasi
c. mensosialisasikan program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Kemendikbud tahun 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas delapan program yang dilaksanakan Kemendikbud, yang mencakup tingkat capaian enam belas sasaran strategis dengan 45 indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. Kedelapan program tersebut adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, program pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, program penelitian dan pengembangan, program pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, program guru dan tenaga kependidikan, dan program pelestarian budaya.

Dari 45 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, sebanyak 27 IKSS atau 60% telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan, 17 IKSS atau atau 38% belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan satu IKSS belum dilakukan pengukuran di tahun 2016 karena pengukuran IKSS tersebut dilakukan tiap tiga tahun sekali, IKSS tersebut adalah 'kemampuan berbahasa dalam Skor PISA'.

Rincian Pencapaian IKSS tahun 2016

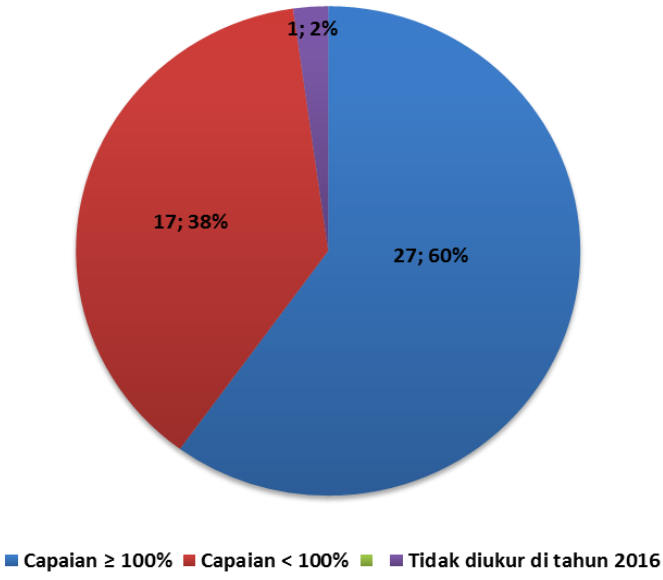

Sedangkan untuk kinerja keuangan, dari total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp43.605.863.439.000, ada *self blocking* sebesar Rp3.925.485.699.000, sehingga pagu Kemendikbud setelah *selfblocking* menjadi Rp39.680.377.740.000. Dari pagu anggaran Rp39.680.377.740.000 telah berhasil terserap sebesar Rp38.554.662.130.586 sehingga persentase daya serap Kemendikbud untuk tahun 2016 adalah sebesar 97,16% setelah *selfblocking,* atau 88,42% dari pagu awal.

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun kedua atau tahun kedua pelaksanaan Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019, merupakan dasar bagi Kemendikbud dalam menyempurnakan program dan kegiatan di tahun mendatang, sehinga target-target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 dapat tercapai. Pada tahun mendatang Kemendikbud akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan program dan anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun pada anggaran 2017 yang sedang berjalan ini, program dan anggaran Kemendikbud lebih diprioritaskan kepada program-program pro rakyat, diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, tunjangan profesi guru, rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana prasarana sekolah, penguatan karakter siswa, pendidikan vokasi (kejuruan), peningkatan layanan di bidang kebudayaan dan kebahasaan, serta bantuan pendidikan lainnya. Program-program tersebut akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelibatan publik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kemendikbud 2016
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementeian Pendidikan dam Kebudayaan di daerah;
8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan.

TARGET KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB /SMK	70 dan 72
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	970.900
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	70%
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.200.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	72,10%
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	46%
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	2.621
		4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,43%
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	9%
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	97,85%
		2. APM SD/SDLB	82,51%
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	81,89%
		4. APM SMP/SMPLB	72,69%
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	79,31%
		6. APM SMA/SMK/SMLB	66,87%
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,87
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,55
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,3 tahun
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	36.051
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55,30%
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	66%
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	62%
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	80,24%
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	54,90%
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,24%
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,01%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	55%
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,5
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,5
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,5
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	70%
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	50,9%
		2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	68,13%
		3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	67%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	52.628
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	34
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	402
		2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,3 dan 6,8
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	3
		2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	1.310
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP	75
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	74

Nama Program	Pagu
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.603.949.701.000
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	166.550.467.000
3. Pendidikan Dasar dan Menengah	24.195.401.503.000
4. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.826.883.710.000
5. Penelitian dan Pengembangan	1.253.314.938.000
6. Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	415.666.040.000
7. Guru dan Tenaga Kependidikan	11.596.822.351.000
8. Pelestarian Budaya	1.547.274.729.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Anies Baswedan

Pengukuran Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik	Baik	-
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB /SMK	70 dan 72	73,25 dan 64,04	104,6 dan 88,94
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik	Baik	-
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	970.900	993.000	102,28
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	70%	68,42%	97,7
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.200.000	1.233.120	102,76
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	72,10%	72,16%	100,08
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	46%	46%	100
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	2.621	2.824	107,75
		4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,43%	96.56%	100,13
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	9%	8,6%	96
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	97,85%	93,05%	95
		2. APM SD/SDLB	82,51%	81,54%	99
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	81,89%	76,69%	94
		4. APM SMP/SMPLB	72,69%	56,55%	78
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	79,31%	71,48%	90
		6. APM SMA/SMK/SMLB	66,87%	52,22%	78
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,87	0,91	105
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,55	0,59	107
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,3 tahun	7,84 tahun	94

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	36.051	13.707	38
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55,30%	67%	121
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	66%	96,81%	147
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	62%	91,42%	147
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	80,24%	70,50%	87,9
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	54,90%	53,2%	97
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,24%	70,1%	114
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,01%	70,9%	95
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	55%	64,48%	117
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,5	7,29	112
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,5	5,85	90
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,5	5,5	85
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	70%	100,37%	143,4
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	50,9%	49,6%	97,4
		2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	68,13%	75,52%	111
		3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	67%	52,09%	77,7
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	52.628	60.836	116
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	34	52,49	154
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	402	*	-
		2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,3 dan 6,8	7,1 dan 6,2	113 dan 91

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	3	4	133
		2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	1.310	4.435	339
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP	75	75,78	101
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	-
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	74	75,19	101,9

*tidak dilakukan pengukuran di tahun 2016, pengukuran skor PISA dilakukan 3 tahun sekali

Nama Program		Pagu	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.603.949.701.000	2.373.530.869.000	2.159.070.165.062	90,96
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	166.550.467.000	158.444.066.000	139.319.200.043	87,93
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah	24.195.401.503.000	22.227.892.303.000	21.787.109.129.448	98,02
4.	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.826.883.710.000	1.566.872.238.000	1.473.019.025.383	94,01
5.	Penelitian dan Pengembangan	1.253.314.938.000	1.123.628.256.000	1.070.743.267.074	95,29
6.	Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	415.666.040.000	365.946.633.000	323.451.680.095	88,39
7.	Guru dan Tenaga Kependidikan	11.596.822.351.000	10.575.782.217.000	10.381.090.068.224	98,16
8.	Pelestarian Budaya	1.547.274.729.000	1.288.281.158.000	1.220.859.595.257	94,77

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2017
Inspektur Jenderal,

Daryanto
NIP 19620104 198302 1 002

CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

	Aspek Reviu	Unsur yang direviu	Status	
1.	Format		Ya	Tidak
a.	Laporan Kinerja (LK) telah menampilkan data penting IP	1) Dasar Hukum	✓	
		2) Tugas dan Fungsi	✓	
		3) Visi dan Misi	✓	
		4) Struktur Organisasi	✓	
		5) Permasalahan strategis	✓	
		6) Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan	✓	
		7) Hasil yang sudah dicapai (sesuai dengan IKU/IKSS)	✓	
		8) Anggaran yang digunakan selama kurun waktu tertentu	✓	
b.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	1) Indikator kinerja Utama/IKSS	✓	
		2) Rencana kinerja tahunan	✓	
		3) Sasaran strategis	✓	
		4) Perjanjian kinerja	✓	
		5) Target-target	✓	
c.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	1) Kelengkapan penyajian seluruh indikator kinerja	✓	
		2) Kelengkapan penyajian target-target kinerja	✓	
		3) Kelengkapan penyajian target-target keuangan	✓	
		4) Kelengkapan realisasi dari target-target kinerja dan keuangan	✓	
		5) Analisis capaian kinerja	✓	
d.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	1) Kelengkapan lampiran sesuai isi laporan	✓	
		2) Ketepatan lampiran sesuai isi laporan	✓	
e.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke dapan	1) Menyajikan rekomendasi perbaikan	✓	
		2) Ketepatan rekomendasi	✓	
f.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	1) Menyajikan informasi keuangan	✓	
		2) Informasi keuangan sesuai dengan capaian kinerja	✓	
		3) Realisasi anggaran	✓	
		4) Menyajikan analisis akuntabilitas keuangan	✓	
2.	Mekanisme Penyusunan		✓	
a.	LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	1) Terdapat unit kerja yang menyusun LKj	✓	
		2) Unit melakukan koordinasi dalam	✓	

		penyusunan LKj		
		3) Terdapat supporting data LKj dari masing-masing eselon I	✓	
		4) Setiap eselon I memiliki unit penanggungjawab LKj	✓	
b.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓	
c.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusunan LKj	1) Terdapat sistem pengumpulan data	✓	
		2) Terdapat sistem monitoring pengumpulan data	✓	
		3) Sistem pengumpulan data berjalan dengan baik	✓	
d.	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	1) Terdapat penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		2) Penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja menjalankan tugasnya	✓	
e.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	1) Data yang digunakan relevan	✓	
		2) Data yang digunakan dari sumber yang sesuai	✓	
		3) Data yang digunakan terkini	✓	
		4) Data yang digunakan tepat satuan ukuran	✓	
f.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	1) Analisis/penjelasan dalam LKj sudah dibahas secara internal unit kerja	✓	
		2) Analisis/penjelasan sudah disetujui oleh Pimpinan unit kerja	✓	
g.	LKj bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	1) LKj bukan merupakan kompilasi dari LKj unit kerja	✓	
		2) LKj merupakan hasil rekonsiliasi unit kerja yang disusun sesuai dengan Renstra	✓	
3.	Substansi		✓	
a.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam pernjian kinerja dan selaras dengan Renstra	1) Tujuan sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	
		2) Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3) Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang meadai	✓	

		2) Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3) Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang meadai	✓	
		4) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6) Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		7) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9) Jika 'tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		10) IKU dan IK telah SMART	✓	
		Persentase Ya	100%	

Jakarta, 23 Februari 2017
Pengendali Mutu

Pandji Dwi Prasetyo
NIP. 195911291988031003